

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PER KECAMATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Kerjasama
Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
dan
Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Anggaran 2019

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PER KECAMATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Kerjasama
Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
dan
Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Anggaran 2019

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PER KECAMATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Katalog : 4102002
Ukuran Buku : 21cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 145 halaman

Kerjasama:



**Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**
Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213
Telp/Fax : 0274 586712, 562811 / 0274 586712
Email : bapeda@bapeda.jogjaprov.go.id

dan



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**
Jalan Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta
Telp/Fax : 0274 4342234 / 0274 4342230
Email : bps3400@bps.go.id

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan tiga komponen yakni angka harapan hidup yang merepresentasikan derajat kesehatan; angka rata-rata harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Dari hasil penyusunan Indeks Pembangunan Manusia per Kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (tahun 2018) dapat disimpulkan bahwa secara umum pembangunan manusia di daerah ini pada tahun 2018 relatif lebih baik daripada tahun sebelumnya (tahun 2013 atau periode penyusunan sebelumnya). Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angka indeks pada periode tahun 2013-2018. Pada publikasi kali ini penyajian analisis IPM sampai level kecamatan. Hasilnya diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan konstruktif dan bahan evaluasi serta perencanaan pembangunan pada masa yang akan datang.

Penyusunan publikasi ini merupakan hasil kerjasama antara Balai Penelitian dan Pengembangan Statistik Daerah Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan penyusunan analisis IPM per kecamatan ini.

Yogyakarta, September 2019
Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,


Johannes De Britto Priyono, M.Sc
NIP. 19590916 198501 1 001

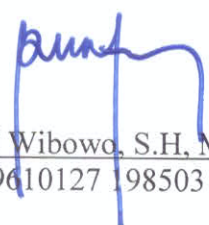
KATA SAMBUTAN

Sebagai bagian yang terintegrasi dengan pembangunan nasional, pembangunan daerah perlu terus dipantau gerak perkembangannya serta menelaah implikasi yang terkandung di dalamnya. Pemenuhan ketersediaan data statistik mengenai pembangunan manusia tentunya memiliki dimensi yang sangat luas, lengkap, dan terpercaya, yang dapat menggambarkan kondisi daerah dengan berbagai variasi tentu sangat diperlukan. Pemerintah daerah dapat terus mengetahui keadaannya dalam seluruh upaya melaksanakan visi dan misinya melalui program yang dijalankan.

Kami menyambut baik penyusunan **Analisis Indeks Pembangunan Manusia per Kecamatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta**. Indeks tersebut merupakan refleksi dari keberhasilan pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan serta dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting artinya sebagai alat ukur atas hasil pembangunan terutama yang berdampak langsung pada pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai bahan dasar pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.

Semoga semua yang baik ini dapat terus dibina, dikembangkan, serta ditingkatkan di masa mendatang. Mudah-mudahan dapat bermanfaat baik bagi pemerintah, terutama bagi masyarakat luas.

Yogyakarta, September 2019
Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,



Budi Wibowo, S.H., M.M
NIP. 19610127 198503 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Katalog	ii
Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Singkatan	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup Penyajian	3
BAB II. METODOLOGI	4
2.1. Pembangunan Manusia Sebagai Tujuan	4
2.2. Ruang Lingkup Pembangunan Manusia	9
2.3. Pengukuran Capaian Pembangunan Manusia	11
2.4. Manfaat dan Keterbatasan Indeks Pembangunan Manusia	12
2.5. Pengukuran Komponen Indeks Pembangunan Manusia	13
2.5.1. Dimensi Kesehatan	17
2.5.2. Dimensi Pengetahuan	19
2.5.3. Dimensi Kehidupan Layak	23
2.5.4. Penghitungan Indeks Komposit IPM	25
2.5.5. Mengukur Kecepatan IPM	25
2.5.6. Survei Tambahan Penyusunan IPM per Kecamatan	26
BAB III. GAMBARAN UMUM DIY	28
3.1. Kondisi Geografis	28
3.2. Kondisi Demografi	30
3.3. Karakteristik Pendidikan	37
3.4. Karakteristik Kesehatan	42
3.5. Karakteristik Standar Hidup	46
BAB IV. CAPAIAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DIY	50
4.1. Capaian IPM DIY 2013-2018	51
4.1.1. Perkembangan indikator penyusun IPM DIY	52
4.1.2. Perbandingan IPM DIY dengan Provinsi Lainnya di Indonesia	57
4.2. Capaian IPM per Kabupaten/kota di DIY 2013-2018	61
4.3. Capaian IPM per Kecamatan di DIY 2013-2018	64

4.4. Perkembangan Komponen Penyusun IPM per Kecamatan	73
4.4.1. Kesehatan	73
4.4.2. Pendidikan	74
4.4.3. Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan	79
 BAB V. ANALISIS IPM PER KECAMATAN	 83
5.1. Perkembangan dan Variasi IPM	83
5.1.1. Kabupaten Kulonprogo	87
5.1.2. Kabupaten Bantul	89
5.1.3. Kabupaten Gunungkidul	91
5.1.4. Kabupaten Sleman	94
5.1.5. Kota Yogyakarta	96
5.2. Faktor yang mempengaruhi Variasi IPM per Kecamatan	98
5.2.1. Fasilitas Kesehatan	98
5.2.2 Fasilitas Pendidikan	101
5.2.3. Fasilitas Perekonomian	103
5.3. Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan IPM	105
 BAB VI. PENUTUP	 111
6.1. Kesimpulan	111
6.2. Saran	112
 Daftar Pustaka	 123
Lampiran	125

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Perbandingan Metode Penghitungan IPM Lama dan Baru yang digunakan oleh BPS dan UNDP	15
Tabel 2.2. Nilai Minimum dan Maksimum untuk Penghitungan Indeks Indikator	16
Tabel 2.3. Pedoman Konversi Tahun Lama Bersekolah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelas Tertinggi yang Ditamatkan	21
Tabel 3.1. Komposisi Penduduk menurut Kabupaten kota	30
Tabel 3.2. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2018	33
Tabel 3.3. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota di DIY, Agustus 2018	35
Tabel 3.4. Rasio Murid-Guru menurut Kabupaten/kota di DIY, 2018	38
Tabel 3.5. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Kabupaten/kota, 2018	44
Tabel 3.6. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2017-2018	44
Tabel 3.7. Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Kabupaten/kota	46
Tabel 3.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah	48
Tabel 4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY menurut Komponen, 2013-2018	53
Tabel 4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2017-2018	60
Tabel 4.3. Perkembangan Komponen Penyusunan IPM Kabupaten/Kota di DIY, 2017-2018	62
Tabel 4.4. IPM Kecamatan dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di DIY, Tahun 2013-2018	66
Tabel 4.5. Rata-rata Pertumbuhan IPM Kecamatan per Tahun dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di DIY, Tahun 2013-2018.....	69
Tabel 4.6. Angka Harapan Hidup dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di DIY, Tahun 2013-2018	73
Tabel 4.7. Angka Harapan Lama Sekolah dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di DIY, Tahun 2013-2018	76
Tabel 4.8. Rata-rata Lama Sekolah dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di DIY, Tahun 2013-2018	77
Tabel 4.9. Indeks Pendidikan dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di DIY, Tahun 2013-2018	79
Tabel 4.10. Purchasing Power Parity (PPP) dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di DIY, Tahun 2013-2018 (dalam ribuan rupiah)	81
Tabel 5.1. Statistik Indeks Pembangunan Manusia per Kecamatan di DIY	83
Tabel 5.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di DIY	84
Tabel 5.3. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kulonprogo.....	85
Tabel 5.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bantul	85

Tabel 5.5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gunungkidul..	86
Tabel 5.6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sleman	86
Tabel 5.7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta	87
Tabel 5.8. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018	88
Tabel 5.9. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013	88
Tabel 5.10. Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kulonprogo	89
Tabel 5.11. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2018	90
Tabel 5.12. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2013	90
Tabel 5.13. Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bantul	91
Tabel 5.14. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018	92
Tabel 5.15. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013	93
Tabel 5.16. Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gunungkidul ...	93
Tabel 5.17. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2018	94
Tabel 5.18. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2013	95
Tabel 5.19. Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sleman	95
Tabel 5.20. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2018	96
Tabel 5.21. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2013	97
Tabel 5.22. Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta	98
Tabel 5.23. Nilai IDM dan IPM per Kecamatan di DIY Tahun 2018.....	108

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	5
Gambar 2.2. Tahapan Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia	15
Gambar 3.1. Peta Wilayah DIY.....	28
Gambar 3.2. Persentase Jumlah Penduduk DIY menurut Kabupaten/kota.....	31
Gambar 3.3. Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/kota	32
Gambar 3.4. Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Lapangan Usaha, Agustus 2018	34
Gambar 3.5. Jumlah Sarana Fasilitas Pendidikan menurut Jenjang, 2018	37
Gambar 3.6. Angka Partisipasi Sekolah, 2013-2018	39
Gambar 3.7. Angka Partisipasi Murni, 2013-2018	40
Gambar 3.8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Ijazah Tertinggi ...	41
Gambar 3.9. Presentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan, 2016-2018 ..	43
Gambar 3.10. Persentase rumah tangga menurut akses sanitasi layak dan air layak, 2014-2018	47
Gambar 3.11. Angka Kemiskinan menurut Kabupaten/kota, 2017-2018.....	48
Gambar 3.12. PDRB perkapita ADHB (000) DIY, 2014-2018	49
Gambar 4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2013-2018	52
Gambar 4.2. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) DIY, 2013-2018	54
Gambar 4.3. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah DIY, 2013-2018	55
Gambar 4.4. Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun di DIY, 2013-2018 (Rp 000)	57
Gambar 4.5. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY, 2013-2018	61
Gambar 4.6. Variasi IPM menurut Kecamatan se-DIY Tahun 2013-2018	65
Gambar 4.7. Kwadran Capaian IPM 2018 dan Angka Pertumbuhan IPM per Tahun	71
Gambar 4.8. Kaitan Capaian dan Rata-rata Pertumbuhan IPM per Kecamatan di DIY ..	72
Gambar 5.1. Kuadran Hubungan IPM dan Fasilitas Kesehatan	100

DAFTAR SINGKATAN

ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	Atas Dasar Harga Konstan
AHH	Angka Harapan Hidup
AKABA	Angka Kematian Balita
AKB	Angka Kematian Bayi
AKI	Angka Kematian Ibu
ALH	anak lahir hidup
AMH	Angka Melek Huruf
AMH	Anak Masih Hidup
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
BOS	Bantuan Operasional Siswa
BPS	Badan Pusat Statistik
CV	<i>coefficient of variation</i>
DAU	Dana Alokasi Umum
DIY	Daerah istimewa Yogyakarta
EYS	<i>Expected Mean Years of Schooling</i>
FK	Faktor koreksi
GER	<i>Gross Enrollment Ratio</i>
HLS	Harapan Lama Sekolah
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IDM	Indeks Desa Membangun
IHK	Indeks Harga Konsumen
IKE	Indeks Ketahanan Ekonomi
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKM	Indeks Kemiskinan Manusia
IPG	Indeks Pembangunan Gender
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
MDGs	<i>Millenium Development Goals</i>
MYS	<i>Mean Years of Schooling</i> atau rata-rata lama sekolah
PDB	Produk Domestik Bruto
PNB	Produk Nasional Bruto
PPP	<i>Purchasing Power Parity</i>
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
S2/S3	Pasca sarjana
SD	Sekolah Dasar
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SIAP	<i>Statistical Institute for Asia and the Pacific</i>
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agenda pembangunan dunia memasuki babak baru dengan konsep *Sustainable Development Goals* (SDG's) sejak tahun 2015. SDG's merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan (Sekretariat Sdg2030indonesia, 2017). Konsep SDG's ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca MDGs-2015. Hal ini terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000-an misalnya mengenai isu berkurangnya (*depletion*) sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin (Bappenas, 2014). Terdapat hal penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan tersebut, seperti ketersediaan data yang dapat digunakan untuk mendukung, memantau, dan mengimplementasikan proses pembangunan berkelanjutan.

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi indikator dalam pembentukan konsep pengembangan SDG's, yaitu: 1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*) yaitu pendidikan dan kesehatan, 2) indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*) yaitu ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi, 3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik (BPS, 2018).

Terkait dengan indikator yang melekat pada pembangunan manusia, ketersediaan data mengenai kondisi sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Selain dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, data tersebut juga akan bermanfaat dalam memberikan informasi sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Perencanaan pembangunan yang baik perlu didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, perencanaan yang sistematis dan komprehensif hanya dapat diwujudkan apabila setiap tahapan perencanaan dilengkapi dengan data yang akurat dan mendetail. Untuk itu dibutuhkan ketersediaan data mengenai pembangunan manusia yang representatif dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya

terkait dengan masalah pembangunan manusia pada cakupan wilayah yang lebih kecil, misalnya tingkat kecamatan. Oleh karena itu penyusunan Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per kecamatan dipandang perlu sebagai sumber informasi penyusunan perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia. Selain itu, dengan adanya penyusunan Analisis IPM tersebut diharapkan pemerintah maupun masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah bagi pembangunan di masa yang akan datang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud penyusunan analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per kecamatan di DIY adalah menyediakan informasi mengenai IPM pada tingkat kecamatan di DIY yang dilengkapi dengan indikator-indikator penyusun IPM.

Tujuan penyusunan analisis IPM per kecamatan di DIY adalah mendapatkan informasi nilai IPM dan indikator penyusunnya yaitu indikator kesehatan, pendidikan, dan daya beli pada tingkat kecamatan di DIY.

Secara rinci penyusunan analisis IPM per kecamatan di DIY meliputi:

1. Melaksanakan penghitungan indeks penyusun IPM di seluruh kecamatan DIY tahun 2018, yang meliputi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, rata-rata harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.
2. Melaksanakan penghitungan IPM pada tingkat kecamatan di seluruh kecamatan DIY tahun 2018.
3. Menyusun analisis capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat kecamatan beserta indikator penyusun yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan daya beli di DIY.
4. Mengkaji disparitas dan perkembangan IPM kecamatan di DIY. Perkembangan IPM dibandingkan pada kondisi tahun 2013. Pada saat itu dilaksanakan perhitungan IPM per kecamatan di DIY dengan metode penghitungan IPM lama. Metode penghitungan IPM baru, diperkenalkan oleh UNDP tahun 2013.

1.3. Ruang Lingkup Penyajian

Ruang lingkup pembahasan dibatasi hanya wilayah administrasi DIY sampai level kecamatan. Sementara, periode waktu dalam pembahasan indikator disesuaikan dengan ketersediaan data pada tahun 2013 dan 2018. Untuk memperkaya analisis juga dilakukan perbandingan capaian IPM maupun komponen penyusunnya antar provinsi atau antar kabupaten/kota di Indonesia. Sumber data utama yang digunakan berasal dari data hasil penghitungan IPM yang dilakukan oleh BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil sensus atau survei dalam beberapa tahun terakhir, termasuk survei yang khusus dilaksanakan terkait penghitungan IPM per kecamatan ini. Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan berupa analisis deskriptif kuantitatif terutama menggunakan grafik dan tabel.

Sistematika penyajian terdiri dari Bab 1 merupakan bab Pendahuluan yang memuat latar belakang serta maksud dan tujuan disusunnya tulisan ini. Bab 2 merupakan bab Metodologi memuat konsep-konsep yang dianggap penting dan metode penyusunannya. Diharapkan pembaca dapat memahami apa yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia dan komponen-komponen yang mendukung penyusunan Indeks Pembangunan Manusia. Bab 3 merupakan Gambaran Umum keadaan wilayah dan penduduk DIY, diharapkan pembaca dapat memiliki gambaran obyektif tentang situasi dan kondisi wilayah dan penduduk DIY. Bab 4 berupa gambaran capaian Indeks Pembangunan Manusia DIY, berisi ulasan perkembangan IPM DIY. Bab 5 berisi Analisis Indeks Pembangunan Manusia per kecamatan di DIY, berisi ulasan variasi dan perkembangan IPM antar kecamatan. Bab 6 berisi Penutup.

BAB II. METODOLOGI

2.1. Pembangunan Manusia Sebagai Tujuan

2.1.1. Pembangunan Manusia dalam Agenda Pembangunan Dunia

Sejak tahun 2015, agenda pembangunan dunia memasuki babak baru dengan konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep ini diperkenalkan berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 terutama mengenai isu berkurangnya (*depletion*) sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Dengan demikian konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs (Bappenas, 2014).

Terdapat hal penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan, seperti ketersediaan data yang dapat digunakan untuk mendukung, memantau dan mengimplementasikan proses pembangunan berkelanjutan. Pada pelaksanaan MDGs, ketersediaan data telah ditingkatkan, namun masih tetap dibutuhkan data yang lebih baik melalui revolusi data. Inti dari revolusi data meliputi dua hal yakni integrasi statistik baik di sektor publik maupun swasta dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas.

Indikator dalam konsep pengembangan SDGs terdiri dari tiga pilar utama, yaitu: 1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*human development*) terdiri dari pendidikan dan kesehatan, 2) indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (*social economic development*) berupa ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi, 3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*environmental development*) yaitu ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Ketiga pilar tersebut dijabarkan menjadi 17 tujuan yang harus dicapai. Meskipun secara eksplisit pembangunan manusia tidak langsung menjadi tujuan, terdapat beberapa target yang menyinggung tentang pembangunan manusia yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan.

Gambar 2.1. *Sustainable Development Goals (SDGs)*



Sumber: Sekretariat SDGs Indonesia, 2017

Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Target 3A bertujuan mengakhiri kematian anak, kematian ibu, dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun. Jika dikaitkan dengan salah satu indikator pembentuk IPM, angka harapan hidup saat lahir secara tidak langsung akan menjadi salah satu indikator dari SDGs. Secara tidak langsung pula, angka harapan hidup saat lahir akan meningkat jika salah satu indikator SDGs yaitu angka kematian neonatal ditekan guna mencapai target tersebut.

Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada target 4b, terdapat komitmen untuk memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah berkualitas yang berfokus pada hasil belajar dan mengurangi angka putus sekolah menjadi nol. Pada target ini, terdapat beberapa indikator antara lain:

- Angka kelulusan pendidikan dasar untuk anak perempuan dan anak laki-laki.
- Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang menguasai berbagai keterampilan dasar, termasuk kemampuan dalam membaca dan keterampilan matematika dasar pada akhir siklus sekolah dasar (berdasarkan tolok ukur nasional yang dibentuk secara kredibel).
- Angka kelulusan sekolah menengah untuk anak perempuan dan anak laki-laki.
- Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang mencapai kecakapan di berbagai hasil belajar, termasuk dalam matematika pada akhir siklus sekolah menengah pertama.

Ketika target 4b dapat dicapai maka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat. Hal ini karena angka kelulusan pendidikan dasar dan menengah secara langsung akan berdampak terhadap harapan lama sekolah. Dalam jangka panjang, rata-rata lama sekolah juga akan meningkat karena peningkatan kapasitas pendidikan dasar dan menengah.

Tujuan kedelapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam tujuan kedelapan, terdapat target 8a yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) minimal 7 persen per tahun di negara-negara berkembang. Salah satu indikator dari target ini adalah meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Dengan meningkatnya PNB per kapita, secara tidak langsung akan menaikkan pengeluaran per kapita. Pada target 8b, setiap negara mendorong terciptanya pekerjaan yang layak dengan tingkat pendapatan yang lebih baik bagi semua. Dengan meningkatnya tingkat pendapatan, secara tidak langsung akan berdampak terhadap peningkatan pengeluaran per kapita.

Melalui SDGs, tujuan dan target pembangunan manusia terus diupayakan peningkatannya. Pada akhirnya, dapat disimpulkan pembangunan manusia dapat tercapai melalui pencapaian target SDGs.

2.1.2. Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan Daerah

Sesuai dengan visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, maka pembangunan DIY akan diarahkan untuk mencapai tujuan dengan misi yang terdiri: 1) meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, 2) mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis.

Salah satu tujuan pembangunan dari misi yang pertama berupa meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggalika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. Sasaran pokok pembangunan yang ingin diwujudkan adalah 1) Meningkatnya derajat kualitas SDM dengan indikator berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), 2) Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat dengan indikator Indeks Gini dan persentase penduduk miskin, 3) Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan dengan indikator persentase peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi, 4) Meningkatnya aktivitas

perekonomian yang berkelanjutan dengan indikator pertumbuhan ekonomi, IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), kesesuaian pemanfaatan ruang, capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan, dan 5) menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah dengan indikator indeks Williamson (Pemda DIY, 2018).

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1, 2, dan 3. Melalui misi pertama, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan, dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan.
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (indeks Gini), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (indeks Williamson).
- d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

Dalam bidang kesehatan masih diperlukan akselerasi pemenuhan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan pengendalian penyakit, meningkatkan gizi masyarakat dan mengedepankan upaya promotif dan preventif. Penyediaan air minum sebagai kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi di DIY masih perlu percepatan dalam penyediaan air minum agar seluruh warga di DIY mendapatkan air minum. Pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum masih menjadi agenda prioritas. Kondisi lingkungan yang terkait dengan kesehatan masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian, seperti pencemaran sungai dan kualitas air tanah yang tidak memenuhi baku mutu karena tercemar bakteri. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Dalam hal pembangunan pendidikan, keberhasilan pembangunan pendidikan ditunjukkan dengan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas mutu pendidikan yang memadai, terwujudnya kesetaraan dalam pendidikan, dan jaminan kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan diantaranya: Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Sementara itu, keberhasilan pembangunan kesehatan dinilai dari capaian indikator yang meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Status Gizi Bayi/Balita. Di bidang pelayanan pendidikan meskipun capaian DIY di atas rata-rata nasional, tetapi perlu upaya mengurangi kesenjangan antar daerah.

Sementara itu filosofi yang mendasari pemerintah DIY dalam melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia terangkum dalam “Hamemayu Hayuning Bawana”. Filosofi itu merupakan basis untuk mewujudkan cita-cita luhur tentang tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berbasiskan nilai budaya. Salah satu hal utama yang perlu di prioritaskan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu melalui pendidikan. Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini maka pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada tercapainya peradaban baru unggul yang menghasilkan ‘manusia yang utama’ (*jalmâ kang utâmâ*), yang berasaskan ‘rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan’. Basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat *renaissance* di DIY.

Sektor industri pengolahan sebagai sektor yang dominan di DIY dan didukung oleh potensi sumber daya manusia yang memadai dan kekayaan warisan budaya yang istimewa diharapkan dapat membuka peluang industri pengolahan berbasis budaya seperti kerajinan, batik, serta cinderamata khas DIY. Dukungan komunitas intelektual di DIY diharapkan akan membuka peluang inovasi produk dan variasi industri pengolahan yang lebih besar dengan memaksimalkan sektor industri kreatif. Keberadaan sektor industri kreatif dipandang mampu memberi solusi penciptaan sisi pembeda yang membuat DIY memiliki nilai tawar lebih dibanding daerah lain untuk menutupi permasalahan keterbatasan lahan dan modal finansial yang dialami DIY.

Secara lebih luas, potensi ekonomi kreatif di DIY tidak hanya didukung oleh sektor industri pengolahan namun juga mencakup sektor lain seperti kuliner, musik, arsitektur, seni pertunjukan, seni rupa dan lainnya. Strategi umum pengembangan ekonomi kreatif DIY

mencakup empat aspek. Pertama, perluasan pasar (ekspor dan domestik) yang diarahkan untuk mendorong ekspansi ekonomi kreatif ke pasar global. Kedua, fasilitasi ruang kreasi dan jejaring untuk mendorong perkembangan usaha. Ketiga, fasilitasi nilai ekonomi kreatif untuk mendorong perkembangan usaha yang sudah relatif tinggi. Keempat, fasilitasi *start up* usaha kreatif pemula.

2.2. Ruang Lingkup Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia bukanlah pembangunan yang berdimensi tunggal, karena pada hakikatnya manusia adalah entitas yang kompleks. *United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan konsep pembangunan manusia (*human development*) sebagai perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" atau sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Konsep pembangunan manusia ini mengkaji manusia dari dua sisi yang berbeda seperti halnya dua sisi mata uang, tetapi keduanya harus berjalan secara berimbang. Sisi yang pertama adalah meningkatkan kapabilitas fisik atau pembentukan kemampuan manusia melalui jalur perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan/ pendidikan, dan keterampilan. Sementara, sisi yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya produktif.

Konsep pembangunan manusia memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada aspek pertumbuhan (*economic growth*), kebutuhan dasar (*basic needs*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*). UNDP (1995) mengajukan beberapa premis penting terkait dengan pembangunan manusia. Pertama, pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai fokus atau titik pusat perhatian. Dalam pengertian ini, unsur manusia ditempatkan sebagai subyek sekaligus obyek utama dalam proses pembangunan. Sebagai subyek manusia adalah pelaku utama yang menentukan arah dan keberlangsungan proses pembangunan. Sementara, sebagai obyek manusia adalah pihak yang paling banyak merasakan dan menikmati hasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai konsep pembangunan yang berpusat pada penduduk atau *people centered development*.

Kedua, pembangunan bertujuan untuk memperbesar dan memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dan tidak sekedar untuk meningkatkan level pendapatannya. Hal ini menuntut sebuah konsep pembangunan manusia yang terpusat pada aspek penduduk secara keseluruhan, bukan hanya pada aspek ekonomi saja. Ketiga, pembangunan manusia tidak

hanya fokus pada upaya peningkatan kemampuan atau kapabilitas manusia, tetapi juga fokus pada upaya-upaya untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki manusia secara optimal. Keempat, pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Kelima, pembangunan manusia harus didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Pilar produktivitas mengandung makna bahwa setiap penduduk harus diberi kesempatan atau akses yang seluas-luasnya untuk meningkatkan produktivitas maupun berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan. Pilar pemerataan mengandung makna bahwa semua penduduk memiliki kesempatan atau peluang yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini membawa konsekuensi semua hambatan untuk memperoleh akses harus dihapuskan dan diminimalisir. Pilar kesinambungan bermakna semua aktivitas terhadap sumber daya ekonomi dan sosial tidak hanya untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan generasi pada masa yang akan datang. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Sementara, pilar pemberdayaan memiliki makna semua penduduk harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan maupun dalam proses yang menentukan bentuk dan arah kehidupan mereka serta berpartisipasi penuh dalam mengambil manfaat yang dihasilkan oleh proses pembangunan.

Upaya ke arah "perluasan pilihan" sebagai cikal bakal konsep pembangunan manusia yang diadopsi oleh UNDP pada hakikatnya merupakan pengembangan dari pemikiran yang diajukan oleh dua ekonom terkemuka, Mahbub ul Haq dan Amartya Sen (dalam Stanton, 2007). Menurut pandangan mereka, perluasan pilihan hanya mungkin direalisasikan jika penduduk minimal memiliki tiga aspek: berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif yang mampu meningkatkan daya belinya.

Pendekatan ini menyempurnakan pendekatan yang telah ada sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita sebagai indikator tunggal untuk mengukur kemajuan pembangunan. Mahbub ul Haq (dalam UNDP, 1990) menyatakan bahwa PDB perkapita yang tinggi belum tentu menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Fenomena kesenjangan/ketimpangan pendapatan, kemiskinan, serta ketidakadilan yang berjalan berdampingan dan beriringan dengan pendapatan perkapita yang tinggi, membuat pola pertumbuhan dan prioritas pembangunan pemerintah yang selama ini

berlangsung menjadi patut untuk dipertanyakan. Indikator PDB perkapita yang berdiri sendiri tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat tanpa disertai dengan analisis yang mendalam mengenai distribusi/tingkat sebaran pendapatan maupun sumber-sumber utama yang menentukan tingkat PDB perkapita tersebut.

Jika dikaji lebih lanjut konsep dan lingkup pembangunan manusia yang telah diuraikan di atas memiliki persinggungan yang cukup besar dengan tujuan pembangunan milenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dideklarasikan pada akhir tahun 2000 dan dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Keduanya menempatkan manusia sebagai titik pusat dalam keseluruhan proses pembangunan. Hampir semua dimensi pembangunan manusia yang tercakup baik dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi kehidupan yang layak tertuang ke dalam butir-butir kesepakatan tujuan pembangunan yang ditandatangani dalam deklarasi MDGs maupun SDGs.

2.3. Pengukuran Capaian Pembangunan Manusia

Seperti halnya dengan konsep pembangunan ekonomi, pendekatan konsep pembangunan manusia juga menjadi sebuah konsep yang terukur. Uraian tentang konsep pembangunan manusia pada bagian sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan manusia tidak semata dilihat dari perspektif ekonomi, namun mencakup dimensi yang lebih luas. Sampai saat ini IPM menjadi indikator komposit yang cukup representatif untuk menggambarkan capaian kualitas pembangunan manusia antar wilayah. Dalam perkembangannya IPM telah beberapa kali mengalami penyempurnaan terkait dengan metode penghitungan maupun indikator penyusunnya.

Secara umum, IPM disusun dari empat indikator yang menggambarkan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Dimensi peluang hidup panjang diukur dengan indikator angka harapan hidup penduduk pada saat lahir (*life expentancy at age 0* atau e^0). Dimensi pengetahuan diukur dengan dua indikator, yakni angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja (*mean years of schooling*). Standar kehidupan yang layak diukur dengan indikator pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) di wilayah yang bersangkutan.

2.4. Manfaat dan Keterbatasan Indeks Pembangunan Manusia

IPM digunakan sebagai alat untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial dan ekonomi secara sistematis telah mendapat pengakuan secara luas. *Statistical Institute for Asia and the Pacific* (SIAP) merekomendasikan semua negara yang menjadi anggotanya untuk menghitung IPM yang sesuai untuk perbandingan antar wilayah dalam negara yang bersangkutan. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah Republik Indonesia dengan menghitung nilai IPM secara berkala. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbedaan dalam penghitungan komponen penyusun IPM sebagai akibat dari perbedaan konsep dan definisi statistik antar negara maupun kualitas dan ketersediaan data yang dimilikinya.

Salah satu manfaat terbesar dari IPM adalah kemampuan indeks ini dalam mengungkapkan bahwa sebuah negara/wilayah mampu untuk berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah. Indeks ini juga mampu mengungkap bahwa kenaikan pendapatan yang besar atau pertumbuhan yang tinggi bisa memiliki peran yang lebih kecil dalam kerangka pembangunan manusia (Todaro dan Smith, 2006). Hal ini menjadi pemicu bagi negara-negara yang berpendapatan rendah agar tidak hanya memfokuskan prioritas pembangunan pada aspek mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memberi perhatian lebih pada aspek pendidikan dan kesehatan.

Secara spesifik, BPS menyampaikan beberapa tujuan penghitungan IPM di Indonesia. Pertama, mengetahui perkembangan hasil pembangunan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, mengetahui capaian program-program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, mendapatkan masukan atas ketidak-berhasilan atau kurang-berhasilan pembangunan. Keempat, sebagai alokator dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU). Kelima, mengukur keterkaitan proses pembangunan di bidang ekonomi, sosial, politik dan lainnya (BPS, 2018).

IPM memiliki beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Pertama, mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang memiliki dimensi begitu luas dengan sebuah indeks komposit adalah suatu kemustahilan. Artinya, masih banyak dimensi pembangunan manusia yang belum terangkum dan terukur oleh indeks tersebut. Kedua, IPM masih mempunyai kelemahan dari segi data dan interpretasi. Kelemahan yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual. Jelasnya, IPM suatu negara, provinsi, kabupaten/kota atau kecamatan tidak bermakna tanpa dibandingkan dengan IPM negara, provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan lainnya. Ketiga, sebagai sebuah angka rata-rata, IPM maupun indikator penyusunnya kehilangan informasi

mengenai distribusi atau dengan kata lain IPM belum mempertimbangkan unsur kesetaraan gender, perbedaan etnis maupun kawasan. Indeks ini hanya mampu mengidentifikasi apakah suatu wilayah telah melaksanakan proses pembangunan atau belum, tetapi tidak mampu menjelaskan kelompok mana saja atau bagian penduduk yang mana yang berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Untuk mengurai persoalan ini, UNDP menyusun dua indeks turunan dari IPM yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk mengadopsi persoalan gender. Sementara, untuk mempertimbangkan dan meng-cover persoalan kemiskinan, disusunlah Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) atau Indeks Kemiskinan Multidimensi.

2.5. Pengukuran Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini mempengaruhi gaya hidup yang semakin dinamis dan membawa banyak perubahan terhadap perilaku kehidupan. Hal ini mengakibatkan beberapa indikator yang digunakan untuk melihat dimensi kesehatan, pengetahuan dan ekonomi menjadi berubah. Pada waktu sekarang angka melek huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan, disamping itu di sebagian besar daerah AMH sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Demikian juga Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Menyikapi hal ini, pada tahun 2010 UNDP memperkenalkan metode baru penghitungan IPM untuk diacu dengan beberapa perubahan sebagai berikut :

- Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS/EMS).
- Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
- Metode penghitungan agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik sehingga capaian yang rendah di suatu dimensi tidak secara langsung dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain.

Jika dibandingkan dengan metode lama, penghitungan IPM dengan metode baru memiliki keunggulan sebagai berikut :

- Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama

Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

- Produk Nasional Bruto (PNB) lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB).
- Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Komponen pembangunan manusia tetap 3 yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi kehidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diukur menggunakan indikator angka harapan hidup penduduk pada saat lahir (AHH) dalam satuan tahun. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan dua indikator pendidikan yakni angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata rata lama sekolah (RLS). HLS dihitung menggunakan data partisipasi sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas dalam satuan tahun, sementara RLS dihitung menggunakan referensi penduduk berusia kerja (25 tahun ke atas) dalam satuan tahun. Indikator RLS dalam metode baru menggunakan referensi penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pertimbangan telah menyelesaikan masa belajar. Referensi penduduk 25 tahun ke atas ini lebih mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya dibandingkan dengan kelompok usia 15 tahun ke atas. Dimensi kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan daya beli (PPP) dalam satuan rupiah.

Ada beberapa perbedaan antara indikator yang digunakan oleh UNDP dan yang diimplementasikan dalam penghitungan IPM di Indonesia oleh BPS. Letak perbedaan tersebut terdapat pada indikator pengetahuan dan indikator kehidupan yang layak. UNDP menggunakan angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah kasar (*Gross Enrollment Ratio-GER*) sebagai indikator pendidikan, sementara BPS menggunakan angka harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Kehidupan yang layak oleh UNDP diproksi menggunakan indikator PDRB riil perkapita yang disesuaikan dengan daya beli wilayah setempat (*Purchasing Power Parity-PPP*), sementara BPS menggunakan pendekatan indikator pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan. Secara ringkas, perbedaan metode penghitungan IPM yang digunakan di Indonesia dan UNDP beserta penyempurnaannya disajikan dalam Tabel 2.1.

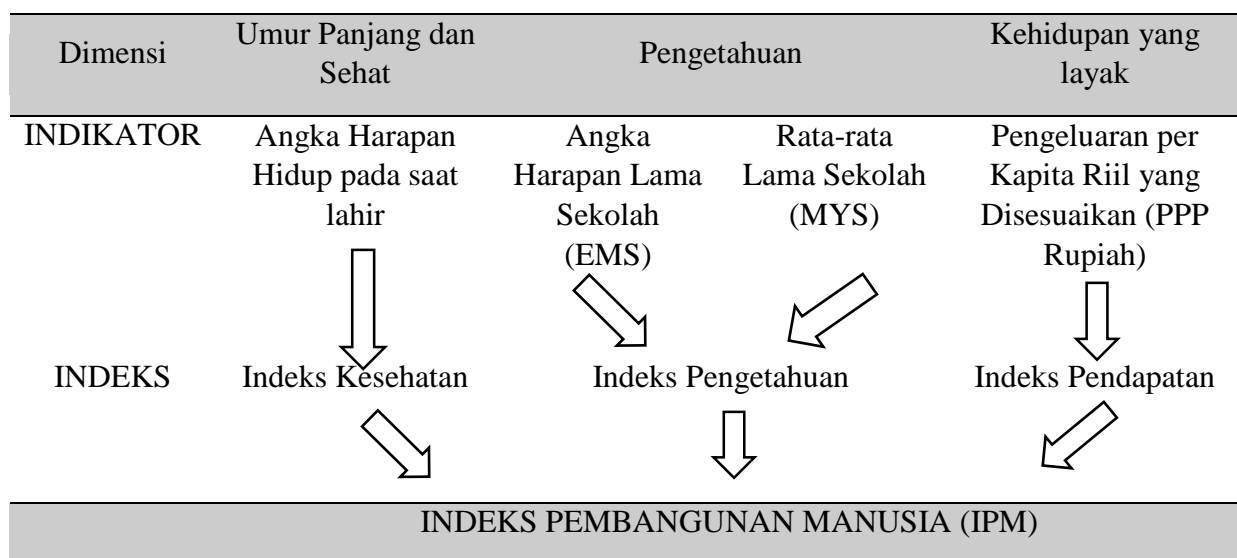
Tabel 2.1. Perbandingan Metode Penghitungan IPM Lama dan Baru yang digunakan oleh BPS dan UNDP

DIMENSI	METODE LAMA		METODA BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Penge- tahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (EMS)	Harapan Lama Sekolah (EMS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	Rata-rata Lama Sekolah (MYS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita	Pengeluaran per kapita	PNB per kapita	Pengeluaran per kapita
Agregasi	$IPM = \frac{1}{3} (I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{pendapatan})$		$IPM = \sqrt[3]{(I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{pendapatan})}$	

Sumber : Sosialisasi IPM Metode Baru, BPS

Tahapan menghitung IPM metode baru ada 3 tahap yaitu menentukan indikator dari masing-masing dimensi pembangunan, menghitung nilai indeks setiap dimensi, dan menghitung nilai IPM berdasarkan nilai indeks ketiga dimensi menggunakan metode rata-rata ukur (geometrik). Tahapan penghitungan IPM secara ringkas terangkum dalam diagram 2.2.

Gambar 2.2. Tahapan Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia



Sumber : BPS, 2018

Tahap pertama dalam penghitungan IPM adalah menentukan indikator dari masing-masing dimensi pembangunan manusia, dan tahap kedua adalah menentukan nilai indeks indikator. Formula penghitungan indeks setiap indikator dilakukan menggunakan rumus umum indeks tunggal berikut :

$$\text{Indeks } X_{i,j} = \frac{(X_{i,j} - X_{i \min})}{X_{i \max} - X_{i \min}} \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

$X_{i,j}$ = Komponen IPM ke-i dari daerah ke-j

$X_{i \min}$ = Nilai minimum dari Komponen IPM ke-i

$X_{i \max}$ = Nilai maksimum Komponen IPM ke-i

Tabel 2.2. Nilai Minimum dan Maksimum untuk Penghitungan Indeks Indikator

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (EMS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352** (Rp)

Sumber : Sosialisasi IPM Metode Baru, BPS

Batasan nilai minimum dan maksimum mengacu kepada standar yang digunakan oleh UNDP, kecuali indikator daya beli. Angka harapan hidup penduduk pada saat lahir berkisar antara 20-85 tahun; angka harapan lama sekolah berkisar antara 0-18 tahun; rata-rata lama sekolah berkisar antara 0-15 tahun. Sementara, nilai pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebagai indikator daya beli berkisar antara Rp 1.007.436,- sampai Rp 26.572.352. Nilai minimum dan maksimum secara ringkas disajikan dalam Tabel 2.2.

2.5.1. Dimensi Kesehatan

Kesehatan menjadi unsur penting dari modal manusia di samping pendidikan. Dimensi kesehatan yang direpresentasikan oleh umur yang panjang dan sehat menjadi fokus utama dalam pembangunan manusia, karena umur yang panjang dan sehat sangat menentukan tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau negara. Artinya, dimensi kesehatan juga memiliki peranan sentral dalam mewujudkan kesejahteraan manusia. Dari sekian banyak indikator di bidang kesehatan, angka harapan hidup penduduk pada saat lahir dinilai mampu menggambarkan kualitas kesehatan penduduk secara umum sehingga dipilih menjadi indikator kesehatan. Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah menggambarkan derajat kesehatan penduduk yang semakin meningkat. Derajat kesehatan yang semakin meningkat akan mendorong peningkatan produktivitas kerja, sehingga tingkat pendapatan yang diterima juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan menjadi salah satu prasyarat bagi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Angka harapan hidup penduduk pada saat lahir biasa dilambangkan dengan e^0 . Angka ini menyatakan perkiraan rata-rata usia atau tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada waktu tertentu (kohor yang sama) hingga akhir masa hidupnya, dengan asumsi pola mortalitasnya bersifat tetap. Penghitungan e^0 dilakukan menggunakan pendekatan *life table*. Namun metode ini belum dapat diimplementasikan secara langsung di Indonesia karena sistem registrasi penduduk belum terkelola dengan baik dan berkelanjutan, sehingga data pokok untuk penghitungan indikator yang berupa data kematian penduduk menurut kelompok umur juga belum tersedia. Cara alternatif yang digunakan untuk mengestimasi angka harapan hidup dilakukan dengan metode tidak langsung dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Mortpak for Windows. Variabel yang digunakan adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup (*live birth*) dan rata-rata jumlah anak yang masih hidup (*still living*) dari wanita pernah kawin berusia 15-49 tahun yang dikelompokkan menurut kelompok umur lima tahunan. Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan berasal dari hasil Sensus Penduduk 2010. Angka e^0 yang dihasilkan dari metode penghitungan ini merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei. Dengan demikian perlu diproyeksikan pada tahun yang dikehendaki berdasarkan informasi rata-rata anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH) menurut kelompok umur ibu dari survei terakhir.

Indeks Kesehatan

Berdasarkan angka harapan hidup yang dihasilkan, besarnya nilai indeks kesehatan dari wilayah yang bersangkutan dapat dihitung dengan formula (BPS, 2014):

$$I_{kesehatan} = \frac{(AHH - AHH_{min})}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \dots\dots\dots (2)$$

dimana :

AHH = Angka harapan hidup

AHH_{min} = Nilai minimum dari AHH, UNDP menetapkan sebesar 20 tahun

AHH_{maks} = Nilai maksimum dari AHH, UNDP menetapkan sebesar 85 tahun

Nilai indeks kesehatan berada diantara angka nol (0) dan satu (1). Semakin mendekati nol menunjukkan keadaan yang semakin memburuk dan semakin mendekati satu menunjukkan keadaan yang semakin membaik. Untuk mempermudah penafsiran, nilai indeks tersebut dapat dinyatakan dalam satuan ratusan atau dikalikan 100. Nilai indeks tidak memiliki makna khusus ketika berdiri sendiri, tetapi ketika dibandingkan dengan angka yang sama dari daerah lainnya maka dapat dilihat gambaran perbandingan pencapaian pembangunan di bidang kesehatan antar wilayah.

Angka Harapan Hidup Tingkat Kecamatan

Pada penyusunan IPM per kecamatan di DIY metode penghitungan angka harapan hidup juga berdasarkan data hasil SP2010 yang dihitung dengan bantuan aplikasi Mortpak Lite versi 4.3. Untuk mendapatkan data angka harapan hidup pada tahun yang bersangkutan maka perlu diproyeksikan dengan fungsi eksponensial berdasarkan acuan *survival ratio* dari data ALH dan AMH dari survei tambahan yang dilaksanakan pada waktu penyusunan IPM per kecamatan ini. Selain itu untuk mendukung perolehan hasil yang lebih bisa dipertanggungjawabkan juga digunakan beberapa informasi lain yang berkaitan langsung dengan tingkat kesehatan. Indikator yang digunakan sebagai pendukung misalnya angka kesakitan penduduk, angka kunjungan ke puskesmas, dan jumlah sarana fasilitas kesehatan. Data tersebut dikumpulkan oleh BPS terintegrasi dengan survei BPS lain atau survei/pendataan yang dilakukan khusus untuk kepentingan penyusunan IPM kecamatan ini.

2.5.2. Dimensi Pengetahuan

Pengetahuan menjadi salah satu unsur penting dari modal manusia yang sangat menentukan tingkat produktivitas dan daya saing suatu bangsa dalam kehidupan global. Tenaga kerja yang terdidik dan terampil sebagai output dari proses pendidikan formal dan non formal adalah komponen yang mempengaruhi kelangsungan proses produksi barang dan jasa, serta secara tidak langsung hal ini akan memberi pengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk secara umum. Banyak fakta yang menunjukkan semakin baik kualitas pengetahuan penduduk di suatu wilayah maka akan diikuti oleh perbaikan kesejahteraan, sehingga pendidikan seringkali dianggap sebagai variabel antara bagi penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Dari sekian banyak indikator pendidikan yang tersedia, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dianggap cukup representatif untuk menggambarkan capaian pembangunan pendidikan oleh penduduk di suatu wilayah. Artinya, kedua indikator tersebut mampu menggambarkan stok pencapaian pengetahuan yang menjadi unsur modal manusia di suatu wilayah.

Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)

Konsep lama tahun bersekolah atau *years of schooling* didefinisikan sebagai lamanya seseorang mengikuti pendidikan formal yang dimulai dari masuk sekolah dasar (SD) sampai dengan kelas terakhir yang diselesaikan pada tingkat atau jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan yang dicapai oleh setiap individu penduduk, sehingga ukuran ini sekaligus menggambarkan stok pencapaian pendidikan manusia. Indikator yang dapat dihitung berdasarkan lama bersekolah setiap individu penduduk adalah rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*). Sebagai indikator tunggal, MYS mampu menjadi ukuran akumulasi modal manusia suatu wilayah. Ukuran ini belum mempertimbangkan kasus-kasus siswa tidak naik kelas, siswa putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan siswa yang masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya terlambat masuk sekolah. Akibatnya, nilai dari jumlah tahun bersekolah bisa menjadi terlalu tinggi (*overestimate*) atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Pada awalnya, UNDP menggunakan rata-rata lama sekolah yang dikombinasikan dengan angka melek huruf sebagai indikator pendidikan dalam IPM. Referensi populasi yang digunakan UNDP dalam penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Batasan itu diperlukan agar angka yang dihasilkan lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karena sebagian dari penduduk yang berusia kurang

dari 25 tahun masih dalam proses sekolah atau belum menuntaskan sekolahnya. Akibat keterbatasan data, dalam penghitungan IPM sejak tahun 1995 indikator rata-rata lama sekolah penduduk digantikan dengan GER (*Gross Enrolment Ratio*). Pada penghitungan IPM tahun 2010, indikator GER kembali digantikan dengan indikator MYS. Di Indonesia, data Susenas sudah tersedia dalam series tahunan dan cukup valid untuk menghitung rata-rata lama sekolah penduduk, sehingga dalam penghitungan IPM di Indonesia indikator MYS tetap digunakan. Referensi penduduk yang digunakan berasal dari penyempurnaan dari penduduk berusia 15 tahun ke atas menjadi 25 tahun ke atas. Konsekuensinya adalah angka yang dihasilkan akan cenderung lebih rendah, karena penduduk pada kelompok umur 15-25 tahun cenderung memiliki lama bersekolah yang lebih tinggi.

Metode penghitungan lama bersekolah individu dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Sumber data yang digunakan adalah data Susenas, terutama pada pertanyaan mengenai jenjang atau jenis pendidikan tertinggi yang pernah atau sedang diduduki oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Secara rinci, pedoman konversi tahun lama bersekolah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang sedang/pernah diduduki mengacu pada metode yang digunakan oleh Barro dan Lee (1993). Populasi penduduk dibagi menjadi tujuh kelompok berdasarkan jenjang pendidikan yang terdiri dari tidak/belum pernah bersekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma, DIV/S1 dan Pasca sarjana (S2/S3).

Proses konversi akan menghasilkan variabel kuantitatif lama tahun bersekolah yang bersifat diskret dengan nilai antara 0 sampai 18 tahun (Tabel 2.3). Sebagai ilustrasi, seorang penduduk yang telah menempuh pendidikan tertinggi pada jenjang SLTP kelas 2 maka ia memiliki jumlah tahun bersekolah sama dengan 7 tahun dengan rincian 6 tahun bersekolah di jenjang SD ditambah dengan 1 tahun di jenjang SMP.

Tabel 2.3. Pedoman Konversi Tahun Lama Bersekolah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelas Tertinggi yang Ditamatkan

Jenjang	Kelas/ Tahun	Jumlah tahun bersekolah (kumulatif)	Jenjang	Kelas/ Tahun	Jumlah tahun bersekolah (kumulatif)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0	0	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat	1	10
Sekolah Dasar (SD) sederajat	1	1		2	11
	2	2		3	12
	3	3	Diploma	I	13
	4	4		II	14
	5	5		III	15
	6	6	D4/S1	I	13
Sekolah Lanjutan	1	7		II	14
Tingkat Pertama	2	8		III	15
(SLTP) sederajat	3	9		IV	16
			S2/S3		17 - 18

Berdasarkan data lama sekolah individu, maka rata-rata lama sekolah dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\overline{MYS} = \frac{\sum x_i}{n} \dots\dots\dots (3)$$

di mana :

- \overline{MYS} : rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas
- x_i : lamanya sekolah individu usia 25 tahun ke atas
- N : jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas.

Harapan Lama Sekolah (EMS)

Indikator EMS mulai direkomendasikan oleh UNDP dalam penghitungan IPM tahun 2010 untuk menggantikan indikator Angka Melek Huruf (AMH) yang dianggap sudah tidak mampu lagi menjelaskan perbedaan capaian kualitas pendidikan antar wilayah, karena beberapa daerah sudah memiliki level mendekati 100 persen. EMS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam satuan tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. EMS dihitung pada penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah terkait usia awal dalam program wajib belajar. Sumber data yang digunakan dalam penghitungan berasal dari Susenas. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, EMS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren dengan sumber data dari Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI atau dari survei lapangan.

Penghitungan EMS dilakukan menggunakan formula:

$$EMS_a^t = FK_x \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t} \dots\dots\dots (4)$$

di mana:

EMS_a^t : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t(7 tahun ke atas)

E_i^t : jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t.

P_i^t : jumlah penduduk usia i pada tahun t.

i : Usia (a, a+1, a+2, ..., n)

FK : Faktor koreksi pesantren.

Faktor koreksi pesantren dihitung dari rasio antara jumlah santri sekolah dan santri mukim dengan jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas ditambah satu.

Indeks Pengetahuan

Penghitungan indeks tunggal baik MYS maupun EMS dilakukan menggunakan rumus umum indeks tunggal dalam persamaan (1). Sementara, nilai indeks pengetahuan merupakan indeks gabungan dihitung dengan memberikan bobot yang sama besar untuk kedua indikator. Secara umum, rumus penghitungan indeks pengetahuan diilustrasikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pengetahuan} = \frac{I_{MYS} + I_{EMS}}{2} \dots\dots\dots (5)$$

I_{RLS} menyatakan indeks rata-rata lama sekolah dan I_{HLS} menyatakan indeks harapan lama sekolah. Rumus untuk penghitungan indeks rata-rata lama sekolah dan indeks harapan lama sekolah masing-masing dinyatakan sebagai berikut:

$$I_{MYS} = \frac{(MYS - MYS_{\min})}{(MYS_{\max} - MYS_{\min})} \dots\dots\dots (6)$$

$$I_{EMS} = \frac{(EMS - EMS_{\min})}{(EMS_{\max} - EMS_{\min})} \dots\dots\dots (7)$$

dimana :

I_{MYS} : Indeks rata-rata lama sekolah

MYS_{\min} : Nilai minimum dari RLS, UNDP menetapkan sebesar 0 tahun

MYS_{\max} : Nilai maksimum dari RLS, UNDP menetapkan sebesar 15 tahun.

I_{EMS} : Indeks harapan lama sekolah

EMS_{\min} : Nilai minimum dari HLS, UNDP menetapkan sebesar 0 tahun

EMS_{\max} : Nilai maksimum dari HLS, UNDP menetapkan sebesar 18 tahun.

Nilai indeks berada di antara angka nol (0) dan satu (1), semakin mendekati nol menunjukkan keadaan yang semakin memburuk dan semakin mendekati satu menunjukkan keadaan yang semakin membaik. Untuk mempermudah penafsiran, nilai indeks tersebut dinyatakan dalam satuan ratusan atau dikalikan 100. Semua nilai indeks tidak memiliki makna khusus ketika berdiri sendiri, tetapi ketika dibandingkan dengan angka yang sama dari daerah lain atau daerah yang sama pada waktu yang berbeda dapat dilihat gambaran perbandingan pencapaian pembangunan di bidang kesehatan antar wilayah maupun antar waktu.

2.5.3. Dimensi Standar Kehidupan Layak

Dimensi ketiga dari ukuran IPM merepresentasikan aspek ekonomi yakni standar kehidupan yang layak. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan pendekatan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan dengan daya beli wilayah setempat dan disempurnakan menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita setahun. Sementara, BPS menggunakan pendekatan rata-rata pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan dengan daya beli dan menggunakan tahun dasar 2012=100. Basis data yang digunakan BPS bersumber dari data pengeluaran per kapita penduduk hasil Susenas, sementara penyesuaian daya beli dan nilai riilnya dilakukan menggunakan metode Rao (2001). Jumlah komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli sebanyak 96 komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga terdiri dari 66 komoditas makanan dan 30 non makanan. Jumlah komoditas ini bertambah cukup signifikan dibandingkan dengan metode sebelumnya (27 komoditas). Penambahan jumlah komoditas ini meningkatkan andil terhadap konsumsi rumah tangga hingga mencapai 76,7 persen.

Terdapat beberapa tahapan dalam penghitungan rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan. Tahap pertama, menghitung nilai rata-rata pengeluaran per kapita nominal per tahun berdasarkan data Susenas modul konsumsi jika datanya tersedia. Jika data modul konsumsi tidak tersedia maka menggunakan data konsumsi dari Susenas Kor. Langkah-langkahnya adalah menghitung pengeluaran per kapita (per anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga; kemudian menghitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota; dan menghitung rata-rata pengeluaran per kapita setahun ($Y't$) dengan cara mengalikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dengan 12 dan dibagi 1000 untuk menyajikan dalam satuan ribuan.

Tahap kedua, menghitung nilai rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota atas dasar harga konstan atau secara riil (Y_t^*) dengan cara membagi rata-rata pengeluaran per kapita (Y_t) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan tahun dasar 2012=100. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan nilai pengeluaran per kapita provinsi/kabupaten/kota secara riil yang dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tahap ketiga adalah melakukan standarisasi pendapatan riil per kapita dengan memasukkan unsur paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Tujuan tahap ini adalah untuk menghilangkan pengaruh perbedaan harga antar provinsi/kabupaten/ kota yang cukup beragam, sehingga pendapatan riil per kapita dapat dibandingkan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan ini adalah:

- 1) Menghitung harga rata-rata komoditas terpilih menggunakan formula:

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i} \dots\dots\dots(8)$$

P_i menyatakan rata-rata harga komoditas i per satuan; V_i menyatakan total nilai/biaya yang dikeluarkan untuk komoditas i di suatu wilayah; dan Q_i menyatakan total jumlah komoditas i yang dikonsumsi di suatu wilayah. Harga komoditas yang tidak terdapat dalam Susenas Modul Konsumsi dapat diperoleh dari IHK.

- 2) Menghitung paritas daya beli menggunakan formula:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}} \dots\dots\dots(9)$$

PPP_j menyatakan paritas daya beli penduduk di daerah j ; P_{ij} menyatakan harga komoditas i di wilayah referensi (Kota Jakarta Selatan); P_{ik} menyatakan harga komoditas i di provinsi/ kabupaten/kota ke- j ; dan m menyatakan jumlah komoditas.

- 3) Menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan di daerah ke j menggunakan formula:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{PPP_j} \dots\dots\dots(10)$$

Y_t^{**} menyatakan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan; Y_t^* menyatakan rata-rata pengeluaran per kapita pertahun atas dasar harga konstan tahun 2012; dan PPP_j menyatakan paritas daya beli di daerah j .

Indeks Pendapatan

Berdasarkan nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan hasil penghitungan, indeks pendapatan dapat dihitung menggunakan formula berikut:

$$\text{Indeks Pendapatan} = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})}{\ln(\text{pendapatan}_{\max}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})} \dots\dots\dots(11)$$

Daya beli (pendapatan) minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris), yakni Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Sementara daya beli maksimum merupakan nilai pengeluaran per kapita tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga tahun 2025 (akhir RPJPN), yakni perkiraan pengeluaran per kapita Kota Jakarta Selatan Tahun 2025.

2.5.4. Penghitungan Indeks Komposit IPM

Seperti yang disampaikan dalam subbab sebelumnya, IPM menjadi indeks komposit atau gabungan yang merepresentasikan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar yaitu dimensi kesehatan, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Berdasarkan nilai indeks yang mewakili ketiga dimensi tersebut maka nilai IPM pada level provinsi/kabupaten/kota dapat dihitung menggunakan formula rata-rata geometrik sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{pengetahuan}} \times I_{\text{pengetahuan}} \times I_{\text{pendapatan}}} \dots\dots\dots(12)$$

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai 100. Semakin besar nilai IPM menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik. Nilai IPM dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni :

- IPM kelompok “rendah” dengan kriteria nilai $IPM < 60$
- IPM kelompok “sedang” dengan kriteria $60 \leq \text{Nilai IPM} < 70$
- IPM kelompok “tinggi” dengan kriteria $70 \leq \text{Nilai IPM} < 80$
- IPM kelompok “sangat tinggi” dengan kriteria $\text{Nilai IPM} \geq 80$.

2.5.5. Mengukur Kecepatan IPM

Tingkat kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu dapat diketahui menggunakan pendekatan pertumbuhan IPM. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, maka semakin cepat IPM suatu wilayah mencapai nilai maksimalnya dan semakin rendah pertumbuhan maka semakin lambat mencapai nilai maksimal. Secara umum, pertumbuhan

IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh pada periode t dengan capaian pada periode sebelumnya (t-1).

Formula penghitungannya adalah :

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100 \dots\dots\dots(13)$$

2.5.6. Survei Tambahan Penyusunan IPM per Kecamatan

Seperti telah digambarkan sebelumnya bahwa hasil survei BPS yang telah dilaksanakan memiliki keterbatasan tingkat estimasi sampai dengan level kabupaten/kota, provinsi, atau nasional. Keterbatasan estimasi survei-survei BPS misalnya Susenas dikarenakan terkendala dalam jumlah sampel dan anggaran pembiayaan yang terbatas. Untuk estimasi data pada level di bawahnya (misal kecamatan) memerlukan survei tambahan untuk mendapatkan tingkat kesalahan minimal tertentu.

Dengan harapan agar semua karakteristik populasi dapat terwakili maka pada kegiatan ini dilakukan survei tambahan pendukung untuk penyusunan IPM ini. Diambil sebanyak 656 blok sensus atau sekitar 5 persen blok sensus dari jumlah blok sensus yang terdapat di DIY, kemudian diproporsikan pada semua kecamatan (78 kecamatan) yang ada. Di samping itu juga dikumpulkan informasi kunjungan ke Puskesmas, informasi jumlah santri Pondok Pesantren, dan informasi harga di masing-masing kecamatan sebagai data pendukung penyusunan IPM di tingkat kecamatan. Dengan demikian lokasi penelitian untuk mendapatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dilakukan terhadap seluruh kecamatan yang berada di DIY. Sumber data lain yang juga digunakan berasal dari hasil Sensus Penduduk 2010, Podes 2018, dan Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2017-2018.

Metode penarikan sampel rumah tangga yang menjadi responden survei adalah *multi stage random sampling* sehingga secara statistik dapat diyakini mewakili populasi. Kerangka sampel untuk pengumpulan data rumah tangga yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu: kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga dalam blok sensus terpilih. Rancangan sampel pada penelitian ini adalah rancangan sampel bertahap dua.

- Tahap pertama, dari master sampling frame blok sensus, dipilih sebanyak blok sensus secara sistematis proporsional sesuai jumlah muatan rumah tangganya pada tiap kecamatan. Setelah itu dilakukan updating muatan blok sensus berdasarkan hasil

pendaftaran rumah tangga atau listing hasil Sensus Penduduk 2010 atau survei terakhir pada setiap blok sensus terpilih.

- Tahap kedua, memilih rumah tangga sebanyak alokasi yang telah ditentukan pada setiap blok sensus. Jumlah rumah tangga yang terpilih pada penelitian ini sebanyak 6.560 rumah tangga atau 10 rumah tangga pada setiap blok sensus.

Untuk sampel obyek fasilitas kesehatan, pondok pesantren, dan harga pasar dilakukan dengan cara terlebih dahulu mendaftar nama dan alamat dari puskesmas/puskesmas pembantu, pondok pesantren, dan pasar tradisional pada masing-masing kecamatan. Langkah berikutnya mengunjungi puskesmas/puskesmas pembantu, pondok pesantren, dan pasar tradisional terpilih untuk mendapatkan informasi pengunjung, santri, dan harga beberapa komoditi yang telah ditentukan.

Pengumpulan data ke rumah tangga, puskesmas/puskesmas pembantu, pondok pesantren, dan pasar terpilih dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung antara pencacah dengan responden. Pertanyaan-pertanyaan individu dalam kuesioner diusahakan bersumber dari individu yang bersangkutan, sedangkan keterangan tentang rumah tangga dapat dilakukan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

Setelah data dikumpulkan melalui wawancara dan dilakukan pemeriksaan secara manual terhadap kelengkapan, konsistensi isian, kualitas dan mutu data, kemudian dilakukan pengolahan atau entri data dengan menggunakan fasilitas komputer. Program pengolahan entri data yang digunakan adalah program aplikasi yang dibuat dengan software berbasis Web (Php). Data-data yang telah dientri, kemudian dilakukan validasi data (*raw-validation*). Hal ini berguna untuk mengurangi kesalahan entri, kesalahan data (*data error*), konsistensi isian dan cakupan data, sehingga data-data yang dihasilkan sangat kredibel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menghitung angka harapan hidup, menggunakan program/aplikasi software Mortpak Lite 4.3. Untuk indikator yang digunakan dalam penghitungan Angka Rata-Rata Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Paritas Daya Beli dan data pendukung lainnya menggunakan program/aplikasi software SPSS versi 20 atau Microsoft Excell.

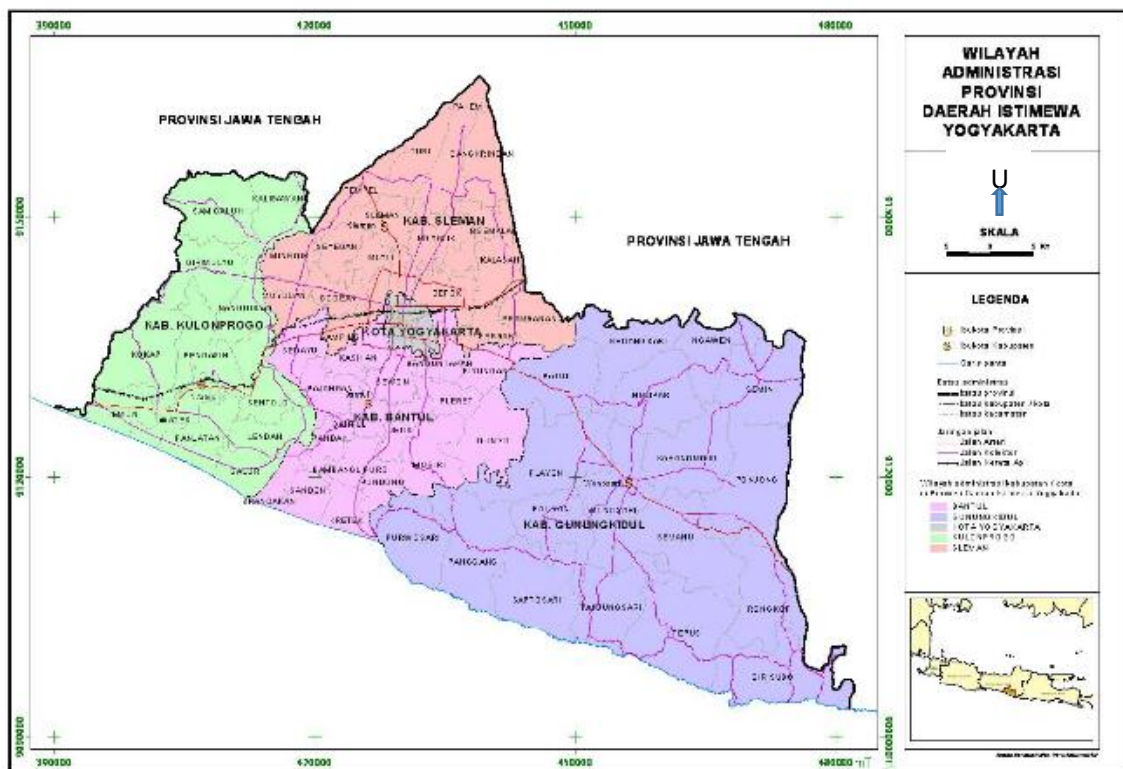
BAB III. KARAKTERISTIK WILAYAH

3.1. Kondisi Geografis

DIY merupakan satu dari 34 provinsi di wilayah Indonesia. Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km², terletak di Pulau Jawa secara geografis terbentang dari 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Bentuk wilayah DIY menyerupai bangun segitiga, bagian timur laut, tenggara, barat dan barat laut berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah sementara di bagian selatan berbatasan dengan sepanjang pantai Samudera Indonesia. Berikut wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan DIY :

1. Sebelah timur laut berbatsan dengan Kabupaten Klaten.
2. Sebelah tenggara berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.
4. Sebelah barat laut dengan Kabupaten Magelang.

Gambar 3.1.
Peta Wilayah DIY



Dengan proporsi luas wilayah 0,17 persen dari luas Indonesia, secara administratif DIY terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa. Secara lebih rinci, wilayah DIY meliputi:

1. Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km² (18,40 persen), terdiri dari 12 kecamatan, 1 kelurahan dan 87 desa;
2. Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km² (15,91 persen), terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa;
3. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah 1.485,36 km² (46,63 persen), terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa;
4. Kabupaten Sleman dengan luas wilayah 574,82 km² (18,04 persen), terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 desa;
5. Kota Yogyakarta dengan luas 32,50 km² (1,02 persen), terdiri menjadi 14 kecamatan dan 45 kelurahan.

Menurut letak topografinya sebanyak 331 desa/kelurahan atau 75,57 persen terletak di dataran. Selebihnya, 105 desa/kelurahan berada di lereng/punggung dan 2 desa/kelurahan pada topografi lembah/daerah aliran sungai. Sementara kondisi fisiografi DIY terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu fisiografi Gunung Api Merapi dengan luas 582,81 km² dengan ketinggian 80-2.911 meter meliputi Sleman, kota Yogyakarta dan sebagian Bantul. Kedua, satuan fisiografi Pegunungan Kars Gunungsewu Gunungkidul yang memiliki luas kurang lebih 1.656,25 km² dan ketinggian 150-700 meter. Ketiga adalah satuan fisiografi Pegunungan Menoreh di Kulonprogo bagian utara yang luasnya kurang lebih 706,25 km² dengan ketinggian 0-572 m. Terakhir adalah satuan fisiografi Dataran rendah dengan luas 215,62 km² dan ketinggian 0-80 meter membentang dari Kulonprogo sampai Bantul berbatasan dengan pegunungan Kars Gunungsewu. Kondisi fisiografi ini akan membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan sarana prasarana hingga struktur ekonomi.

Selain fisiografi, kondisi iklim dan curah hujan di wilayah DIY akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi penduduk setempat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa suhu rata-rata di DIY tahun 2018 mencapai angka 25,8-26,5⁰C. Suhu terendah adalah di Kabupaten Gunungkidul yakni 14,5⁰C dan tertinggi juga di Kabupaten Gunungkidul yaitu 35,1⁰C. Selanjutnya untuk curah hujan, terbesar di bulan Januari mencapai 464,1 mm dan paling rendah pada bulan Juli yaitu 0 mm.

3.2. Kondisi Demografi

Gambaran umum keadaan suatu wilayah selain dilihat dari kondisi geografi, juga penting untuk mengamati penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Bagaimana komposisi, persebaran penduduk hingga pertumbuhan penduduk akan dapat menunjukkan seberapa besar target pembangunan telah tercapai. Sebagai obyek pembangunan, kebijakan pembangunan pada hakekatnya adalah untuk mencapai kesejahteraan penduduk seutuhnya baik sejahtera secara ekonomi maupun terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Sementara, sebagai subjek pembangunan, maka dalam upaya untuk mencapai target pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan optimal dalam upaya mencapai target pembangunan.

Tabel 3.1.
Komposisi Penduduk menurut Kabupaten kota

Kabupaten/kota	Jumlah			Laju pertumbuhan	
	2000	2010	2018	2000-2010	2010-2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	370.944	388.869	425.758	0,48	1,12
Bantul	781.013	911.503	1.006.692	1,56	1,23
Gunungkidul	670.433	675.382	736.210	0,07	1,07
Sleman	901.377	1.093.110	1.206.714	1,94	1,22
Yogyakarta	396.711	388.627	427.498	-0,21	1,18
DIY	3.120.478	3.457.491	3.802.872	1,03	1,18

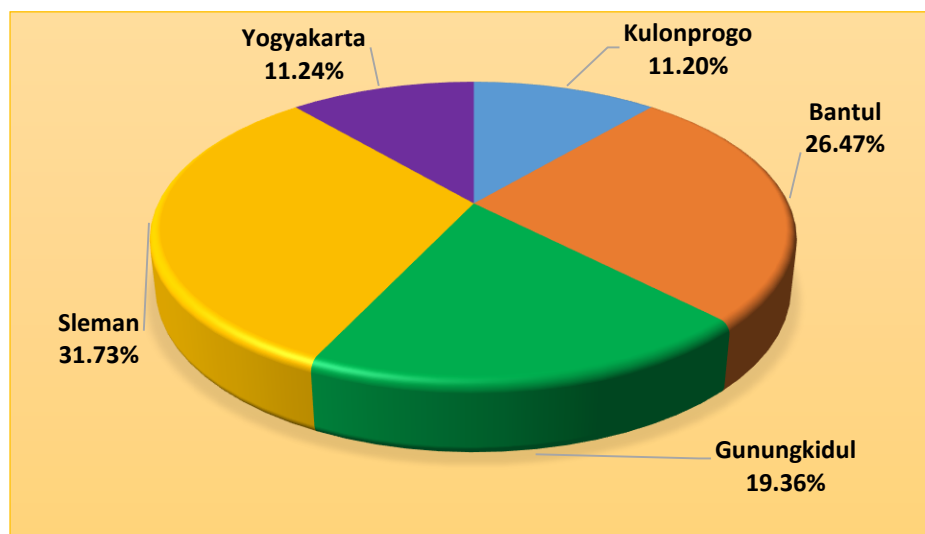
Sumber: DIY Dalam Angka 2019

Sementara komposisi jumlah penduduk DIY menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin kurang dari 100, tepatnya 97,92 persen. Artinya setiap 100 perempuan terdapat 98 laki-laki. Menurut kabupaten kota, hanya Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan, masing-masing sebesar 608.968 orang dan 597.746 orang.

Ukuran dasar gambaran kependudukan antara lain adalah jumlah penduduk, laju pertumbuhan dan sebaran penduduk. Tabel 3.1. Memberikan gambaran bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun DIY periode 2010-2018 yang mencapai 1,18 persen pertahun. Angka ini lebih tinggi 0,15 poin daripada laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2010. Tercatat jumlah penduduk DIY tahun 2018 sebesar 3.802.872 orang, sedangkan

hasil sensus penduduk 2010 sebesar 3.457.491 orang. Bila dilihat menurut kabupaten/kota, rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta meningkat sementara dua kabupaten lainnya menurun. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk akan berimplikasi terhadap kerawanan kecukupan pangan, penyediaan lapangan pekerjaan, meningkatnya kebutuhan fasilitas perumahan, fasilitas layanan umum seperti pendidikan hingga kesehatan.

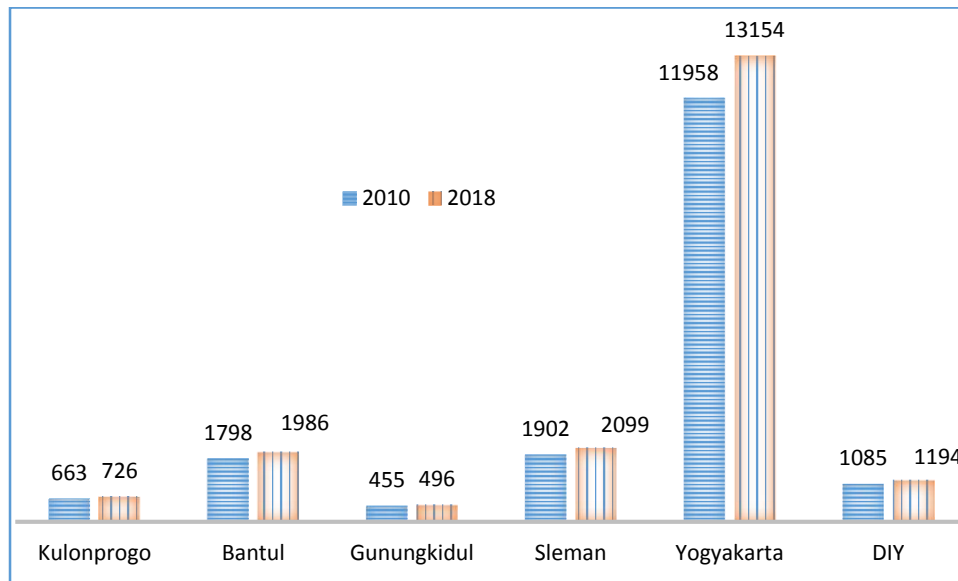
Gambar 3.2.
Persentase Jumlah Penduduk DIY menurut Kabupaten/kota.



Sumber: DIY Dalam Angka 2019

Ditinjau dari sebaran penduduk, gambar 3.2 memperlihatkan bahwa faktor geografi, pusat ekonomi, pemerintahan serta kemudahan fasilitas yang tersedia menurut kabupaten/kota punya andil yang cukup berarti. Lebih dari sepertiga penduduk DIY mendiami wilayah Kabupaten Sleman yakni sebanyak 31,73 persen, sementara sekitar seperempat diantaranya atau 26,47 persen tinggal di Kabupaten Bantul. Sisanya tersebar di tiga kabuten/kota lainnya. Menariknya, dari gambar tersebut tampak bahwa meski Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah 46,63 persen dari seluruh luas wilayah DIY hanya dihuni oleh 19,36 persen penduduk DIY, sedangkan Kota Yogyakarta dengan luas wilayah hanya 1,02 persen justru dihuni oleh sekitar 11,24 persen penduduk DIY lebih banyak dari pada penduduk Kabupaten Kulonprogo.

Gambar 3.3.
Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/kota



Sumber: DIY Dalam Angka 2019

Keadaan ini menyebabkan Kota Yogyakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi hingga tahun 2018 telah mencapai 13.154 orang/km². Sementara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo, tingkat kepadatannya baru sebesar 496 orang/km² dan 726 orang/km². Kota Yogyakarta sebagai ibukota DIY, kota pendidikan, pariwisata sekaligus pusat roda perekonomian menjadikan tempat tujuan strategis untuk bertempat tinggal. Urbanisasi tak dapat dihindarkan bagi penduduk di luar Kota Yogyakarta untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih bagus, mencari nafkah hingga hanya sekedar mencari lokasi rumah yang dekat dengan lokasi kerja ataupun dekat dengan fasilitas sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pusat pemerintahan. Sebaliknya Kabupaten Gunungkidul dengan letak geografis di daerah pegunungan, tampaknya masih belum mempunyai daya tarik sebagai tempat tinggal. Ini terlihat dari kepadatan penduduk yang hanya meningkat tipis selama 8 tahun terakhir dari 455 orang/km² pada tahun 2010 menjadi 496 orang/km² pada tahun 2018. Jauh lebih rendah daripada peningkatan kepadatan penduduk DIY. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Kulonprogo. Pesona wilayah kabupaten ujung barat DIY dengan mulai merebaknya daerah wisata dan melejitnya laju pertumbuhan ekonomi, rupanya kepadatan penduduk hanya meningkat sebanyak 63 poin dari 663 orang/km² pada tahun 2010 menjadi 726 orang/km² pada tahun 2018.

Persebaran penduduk, laju pertumbuhan penduduk yang mendiami wilayah dengan topografi yang berbeda antar kabupaten memberikan keragaman lapangan pekerjaan penduduk. Data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional(Sakernas) menunjukkan bahwa keadaan penduduk usia kerja di DIY tahun 2018 didominasi oleh angkatan kerja sebesar 73,37 persen yang terdiri dari penduduk bekerja sebesar 70,91 persen dan 2,46 persen penduduk menganggur, sisanya sebesar 26,63 persen penduduk DIY termasuk bukan angkatan kerja (Tabel 3.2). Dengan demikian, dari total penduduk usia kerja di DIY, terdapat sekitar 73 persen yang menawarkan tenaga kerjanya dan terdapat sekitar 2 persennya tidak terserap oleh permintaan tenaga kerja.

Tabel 3.2.
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2018

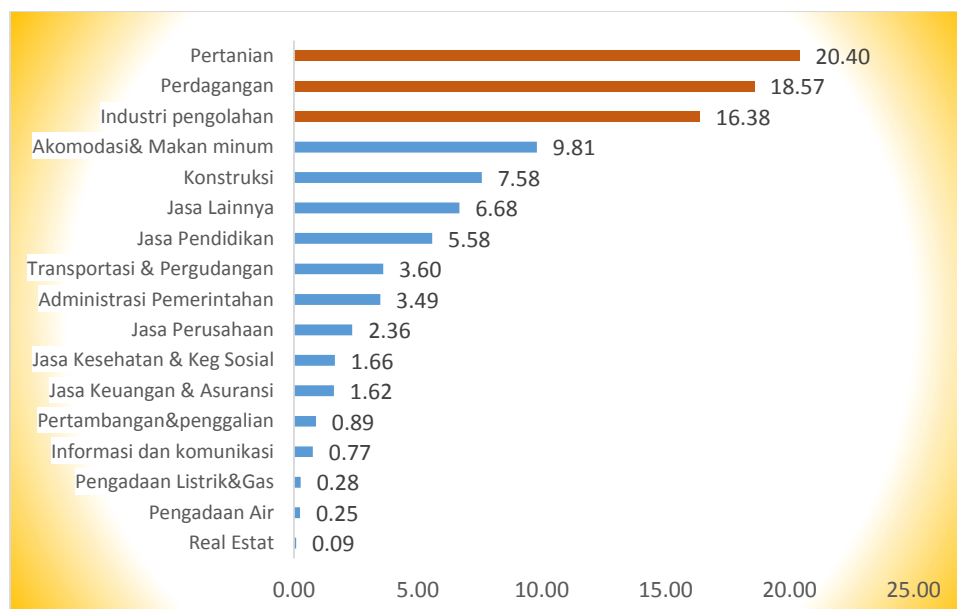
Kabupaten/ kota	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	76.50	75.36	1.14	23.50
Bantul	73.87	71.86	2.01	26.13
Gunungkidul	76.81	75.22	1.59	23.19
Sleman	71.22	68.09	3.13	28.78
Yogyakarta	69.33	65.02	4.31	30.67
DIY	73.37	70.91	2.46	26.63

Sumber: DIY Dalam Angka 2019

Ditinjau menurut Kabupaten/kota persentase penduduk usia kerja yang telah berkontribusi pada lapangan usaha di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul lebih sedikit dibandingkan 3 kabupaten lainnya. Hanya di kisaran angka 1 persen saja yang masih menganggur di tahun 2018. Sementara di Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta sekitar 2 hingga 4 persen penduduk usia kerja belum terserap di lapangan usaha. Kota Yogyakarta terdapat 4,31 persen penduduk usia kerja belum bekerja. Hal ini disinyalir mereka yang berpendidikan tinggi lebih selektif dalam memilih pekerjaan. Sementara penduduk usia kerja di Kabupaten Gunungkidul ataupun Kabupaten Kulonprogo masih menerima pekerjaan dengan kualifikasi jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan.

Berdasarkan status lapangan usaha, distribusi tenaga kerja menurut lapangan usaha periode Agustus 2017 dan Agustus 2018 tidak jauh berbeda. Mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja pada lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Tercatat lebih dari 20 persen penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja pada sektor pertanian, 18,57 persen di perdagangan dan 16,38 persen pada industri pengolahan. Sementara 44,65 persen lainnya penduduk DIY pada periode Agustus 2018 bekerja pada lapangan usaha akomodasi dan makan minum, jasa kemasyarakatan dan lainnya. DIY yang beriklim tropis ditopang oleh predikat sebagai daerah wisata, memungkinkan lapangan usaha ini lebih menjanjikan daripada lapangan usaha lainnya.

Gambar 3.4.
Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Lapangan Usaha,
Agustus 2018



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Provinsi DIY, Agustus 2018

Bila dilihat menurut keruangan/spasial, lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan juga mendominasi penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota. Akan tetapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Wilayah dengan geografi dominan pegunungan dan perdesaan yakni Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo, paling banyak bekerja di sektor pertanian yakni sebanyak 42,27 persen dan 29,74 persen. Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Bantul mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 21,70 persen. Sementara 2 kabupaten/kota lainnya terbanyak pada sektor perdagangan. Keberagaman lapangan usaha ini disinyalir lebih disebabkan oleh

keberagaman faktor geografis dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Selain itu dari sisi modal pun jelas berbeda antara lapangan usaha pertanian atau perdagangan dan industri pengolahan.

Dari sisi status pekerjaan utama, mayoritas penduduk yang bekerja di DIY periode tahun 2018 adalah sebagai buruh yang mencapai 875,836 (41,34 %). Status pekerjaan sebagai buruh menjadi pilihan lebih dari sepertiga penduduk usia 15 tahun yang bekerja disamping karena tidak harus menanggung resiko atas kerugian dalam usaha yang dimiliki, juga tidak dimungkinkan karena keterbatasan modal untuk mendirikan usaha. Posisi yang kedua adalah status berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebesar 383,883 (18,12%) dan berusaha sendiri 339,948 (16,04%). Meski berstatus berusaha, namun kedua jenis status pekerjaan ini memiliki resiko yang lebih ringan. Biasanya mereka hanya menggunakan biaya modal yang tidak terlalu besar dengan skala usaha kecil.

Tabel 3.3.
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu
menurut Status Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota
di DIY, Agustus 2018

Status Pekerjaan Utama	Kabupaten/Kota					
	Kulon progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogyakarta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Berusaha sendiri	30,898	92,145	77,544	101,707	37,654	339,948
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	69,930	95,841	106,777	87,551	23,784	383,883
3. Berusaha dibantu buruh tetap	8,533	20,779	16,778	26,687	17,094	89,871
4. Buruh/karyawan/pegawai	74,975	253,676	114,815	313,109	119,261	875,836
5. Pekerja bebas di pertanian	6,493	6,277	8,532	7,872	-	29,174
6. Pekerja bebas non pertanian	17,207	34,521	27,804	43,466	5,244	128,242
7. Pekerja Keluarga	41,150	58,492	84,988	65,204	21,604	271,438
Jumlah	249,186	561,731	437,238	645,596	224,641	2,118,392

Sumber: DIY Dalam Angka 2019

Di lain pihak, status pekerjaan yang terendah adalah pekerja bebas sektor pertanian. Sebanyak 29.174 penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja dengan status pekerja bebas di sektor pertanian. Meski tidak menanggung resiko dan tidak memerlukan modal yang kompleks untuk dapat bekerja pada status ini, namun dari sisi ekonomi kurang menjanjikan. Jenis pekerjaan ini lebih mengandalkan tawaran pekerjaan dari beberapa usaha pertanian. Bila tidak ada pekerjaan, nyaris mereka tidak akan mendapatkan upah. Berbeda dengan buruh, bila sedang cuti atau sakit masih mendapatkan gaji.

Menurut Kabupaten/kota, secara umum gambaran status pekerjaan penduduk yang bekerja tidak jauh berbeda di antara kabupaten/kota. Tabel 3.4 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2018, sekitar 119,261 (53,09%) penduduk di Kota Yogyakarta yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan. Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai masing-masing sebesar 313.109 (48,50%) dan 253.676 (45,16%). Di sisi lain, penduduk yang bekerja di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar cukup tinggi, mendekati hampir sama dengan mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Tercatat sebanyak 69,930 (28,06%) dan 106,777 (24,42%). Sebagian besar penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian atau perdagangan. Ini berkaitan erat dengan ketrampilan yang mereka miliki dengan keterbatasan modal yang dimiliki.

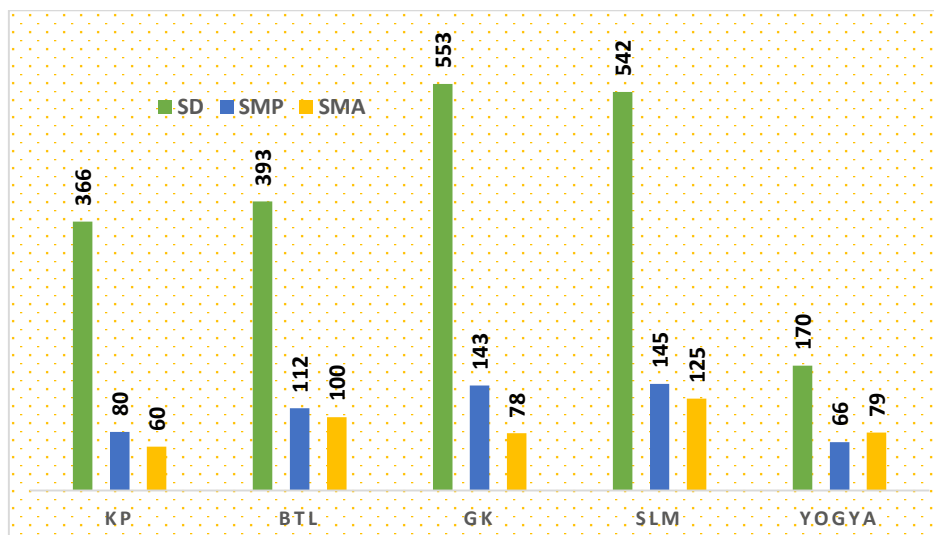
Dari tabel 3.3 juga tampak bahwa terdapat perbedaan posisi ketiga jumlah penduduk yang bekerja menurut status antara Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul dibandingkan 3 kabupaten lainnya. Untuk Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta, penduduk dengan status berusaha sendiri lebih dari 15 hingga 17 persen. Mereka yang berusaha sendiri sebagian besar adalah berprofesi sebagai penjual dengan tempat yang tetap atau pedagang keliling, petani atau penggarap lahan pertanian dengan luas lahan sempit dan atau skala usaha yang relatif kecil, transportasi sederhana seperti becak, serta mereka yang berusaha pada usaha industri rumah tangga. Umumnya mereka memiliki keterbatasan ketrampilan serta keterbatasan kemampuan secara ekonomi. Sehingga bekerja secara sendiri bagi mereka merupakan alternatif untuk dijalani karena kesulitan bersaing dengan pekerja lainnya serta keterbatasan sektor formal untuk menampung pekerja dengan kemampuan yang terbatas.

Di lain pihak di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo, justru penduduk dengan status sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga mencapai 16 hingga 19 persen. Keterbatasan pendidikan sehingga pilihan membantu usaha keluarga tanpa dibayar tak dapat dihindarkan. Selain itu, ketidakmampuan usaha keluarga untuk memberi upah buruh sehingga lebih menganjurkan anggota rumah tangga membantu usaha.

3.3. Karakteristik Pendidikan

Beberapa tahun ini, target pembangunan telah bergeser dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan manusia. Pembangunan manusia meliputi 4 hal diantaranya produktifitas, ekuitas, kesinambungan dan pemberdayaan. Pembangunan sektor pendidikan adalah bentuk pembangunan manusia dari aspek intelektual. Dengan harapan bahwa melalui pembangunan aspek intelektual tersebut akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas sebagai asset kekayaan bangsa maupun sebagai modal dasar pembangunan.

Gambar 3.5.
Jumlah Sarana Fasilitas Pendidikan menurut Jenjang, 2018



Sumber: DIY Dalam Angka 2019

Bertitik tolak dari semakin pentingnya peran pendidikan tersebut, pembangunan pendidikan memerlukan peran serta aktif tidak hanya dari pemerintah, namun tidak lepas dari

peran masyarakat. Berbagai program pendidikan berupa bantuan dana pendidikan telah banyak dikucurkan hingga berbagai lapisan masyarakat. Bantuan dana pendidikan tersebut antara lain BOS (Bantuan Operasional Siswa) untuk sekolah formal dari jenjang SD sampai dengan SMP. Program ini adalah salah satu wujud komitmen pemerintah untuk meringankan biaya beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan program wajib belajar 9 tahun.

Dalam pembangunan manusia bidang pendidikan, pemerintah DIY telah menyediakan fasilitas penunjang pendidikan meliputi perbaikan akses, sarana, dan infrastruktur pendidikan yang layak, memadai, dan merata hingga ke seluruh pelosok serta peserta didik (murid) yang berkualitas. Sarana pendidikan dasar dan menengah telah tersebar hingga wilayah kabupaten/kota. Dengan pertimbangan jumlah siswa yang berbeda antar jenjang pendidikan sehingga jumlah sekolah menurut jenjang pun tidak sama antar jenjang pendidikan dan kabupaten/kota. Secara umum jumlah sekolah dasar paling banyak, diikuti oleh jumlah sekolah tingkat SMP dan paling sedikit sekolah SMA. Sekolah tingkat SD paling banyak di Kabupaten Gunungkidul, sedangkan untuk jumlah sekolah jenjang SMP dan SMA terbanyak adalah di Kabupaten Sleman.

Tabel 3.4.
Rasio Murid-Guru menurut Kabupaten/kota
di DIY, 2018

Kabupaten/kota	SD	SMP	SMU	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	12	12	11	11
Bantul	17	14	12	12
Gunungkidul	12	13	11	15
Sleman	16	15	11	13
Yogyakarta	17	15	13	13
DIY	15	14	12	13

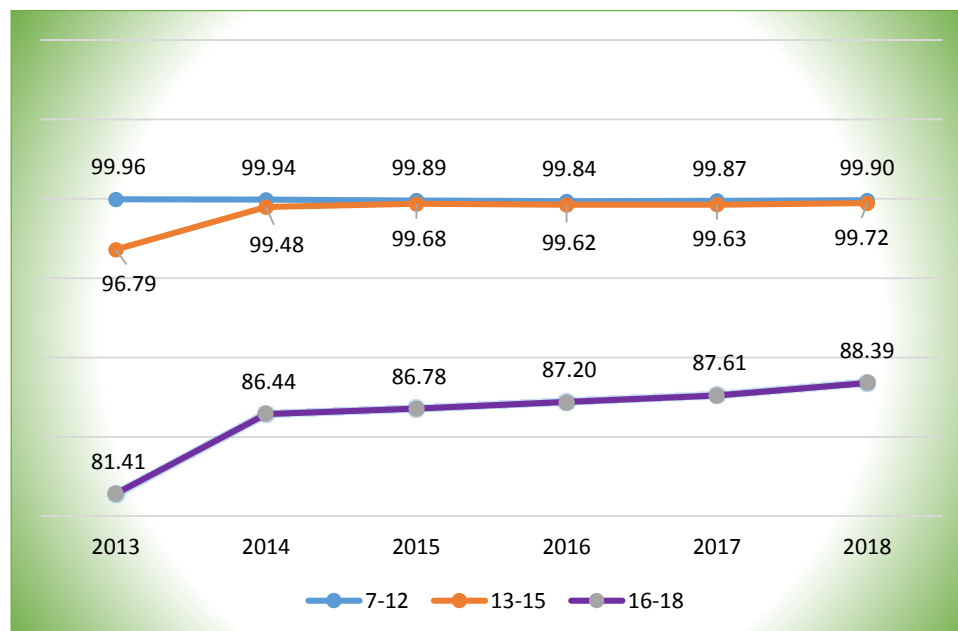
Sumber: DIY Dalam Angka 2019

Namun demikian, keberadaan fasilitas pendidikan yang memadai harus diimbangi dengan jumlah guru yang merata, memadai dan berkualitas. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar jumlah guru. Rata-rata jumlah guru yang dapat melayani siswa di suatu wilayah ditunjukkan oleh besarnya rasio murid-guru. Semakin tinggi rasio murid guru berarti semakin banyak jumlah murid yang harus dilayani oleh seorang guru. Banyaknya

murid yang diajarkan akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas proses pembelajaran.

Berdasarkan tabel 3.4, terlihat bahwa kecukupan guru untuk seluruh jenjang pendidikan sudah memadai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, semua jenjang pendidikan mempunyai rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk masing-masing jenjang adalah SD atau yang sederajat 20:1; SMP atau yang sederajat 20:1; SMA atau yang sederajat 20:1; dan SMK atau yang sederajat 15:1. Dengan demikian, semua jenjang pendidikan, secara rata-rata telah di bawah batas minimal. Melihat fenomena tersebut, sudah seharusnya kualitas siswa dapat ditingkatkan, mengingat secara rata-rata seorang guru SD hanya melayani 12-17 murid, bahkan pada jenjang SMU hanya melayani 11-13 siswa. Meski sudah melampaui batas minimum, namun dari nilai rasio murid guru dapat menjadi koreksi bagi pemerintah dalam distribusi guru yang merata dan tidak menumpuk di suatu wilayah kabupaten/kota tertentu. Distribusi guru seharusnya memperhatikan kebutuhan dan jumlah siswa.

Gambar 3.6.
Angka Partisipasi Sekolah, 2013-2018

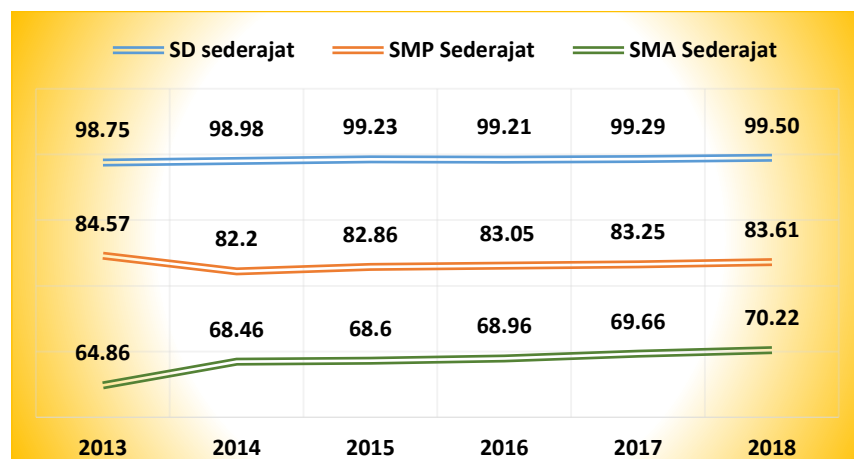


Sumber: DIY Dalam Angka 2019

Karakteristik pendidikan berikutnya adalah angka partisipasi sekolah (APS) yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan terhadap akses pendidikan. APS

menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Nilai APS semakin besar sejalan dengan meningkatnya kelompok umur sekolah. Sementara, perkembangan APS selama periode tahun 2013 hingga 2018 menunjukkan pola tren meningkat setiap tahun untuk APS usia 13-15 dan APS usia 16-18, sementara APS 7-12 tahun berfluktuatif. Pada tahun 2018 APS usia 7-12 tahun (setara SD) di DIY mencapai 99,90 persen. Artinya tingkat pemerataan akses pendidikan SD di DIY sudah cukup baik, walaupun jika dibandingkan periode tahun 2013 sedikit mengalami penurunan (99,96 persen). Kemudian APS usia 13-15 tahun di DIY pada tahun 2018 telah mencapai 99,72.

Gambar 3.7.
Angka Partisipasi Murni, 2013-2018



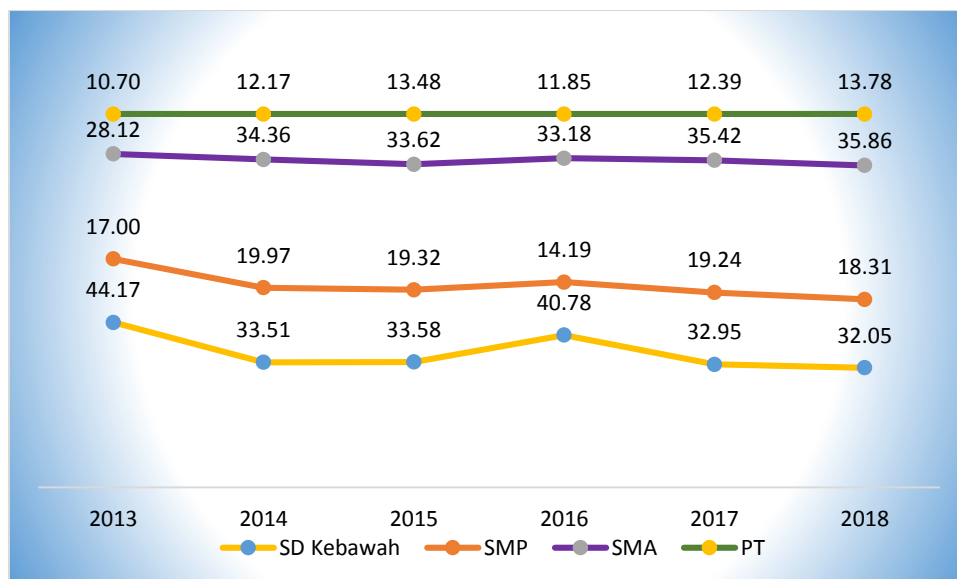
Sumber: DIY Dalam Angka 2019

Angka APS hanya menggambarkan partisipasi sekolah menurut usia sekolah belum memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diduduki. Agar lebih tepat, untuk mengetahui peran serta penduduk menurut kelompok sekolah dan jenjang pendidikan sekolah yang sesuai dapat digambarkan oleh besaran angka partisipasi murni (APM). Sejalan dengan APS, angka APM juga meningkat sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan sekolah. APM DIY selama periode tahun 2013-2018 mempunyai pola fluktuatif namun cenderung meningkat setiap tahun. APM DIY menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Capaian APM SD/Sederajat telah mencapai 99,50 persen. Sementara itu, APM SMP/Sederajat baru mencapai 83,61 persen yang memberikan gambaran bahwa lebih dari 16 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP. Demikian pula, APM SMA/Sederajat tercatat masih belum optimal, sebesar 70,22 persen pada tahun 2019.

Perkembangan APM SD/Sederajat dari tahun 2013 hingga 2018 terus menunjukkan tren yang meningkat. Hingga tahun 2019, lebih dari 99 persen penduduk usia 7-12 tahun telah mengenyam pendidikan SD/Sederajat seperti yang ditunjukkan oleh capaian APM SD/Sederajat sebesar 99,50 persen. Upaya pemerintah untuk menghimbau agar penduduk mengenyam pendidikan sesuai umurnya harus terus ditingkatnya, mengingat sekolah sebagai awal pembentukan karakter anak.

Output atau bukti sah untuk mengetahui tingkat pendidikan tertinggi yang pernah ditamatkan ditunjukkan dengan keberadaan ijazah. Ijazah merupakan salah satu syarat formal untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan atau memilih jenis-jenis pekerjaan yang lebih baik. Ini akan berimplikasi pada perbaikan dan peningkatan penghasilan sehingga berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan derajat kesejahteraan.

Gambar 3.8.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Ijazah Tertinggi



Sumber: DIY Dalam Angka 2019

Predikat kota pendidikan masih melekat bagi DIY. Beragamnya sarana pendidikan yang ada, memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Dalam periode enam tahun terakhir semakin banyak penduduk yang telah mengenyam pendidikan tingkat menengah ke atas. Pada tahun 2018 sebanyak 67,95 persen penduduk telah berijazah pendidikan menengah ke atas. Angka ini lebih tinggi 12,12 persen dibandingkan dengan periode tahun 2013. Peningkatan tertinggi pada jenjang ijazah SMA

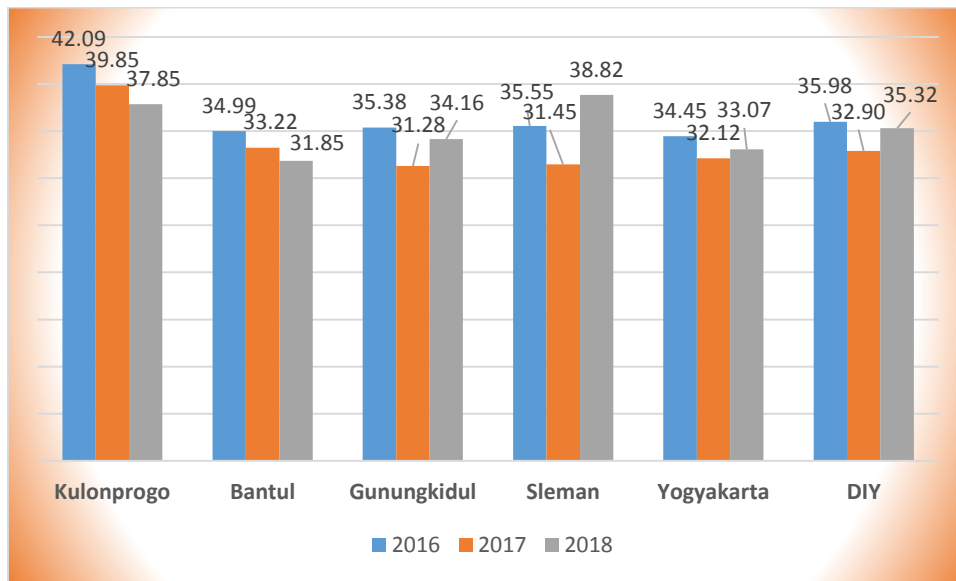
dari 28, 12 persen pada tahun 2013 menjadi 35,86 persen diikuti oleh jenjang pendidikan perguruan tinggi dari naik 3,08 persen. Namun demikian, program pengentasan wajib belajar 9 tahun masih menyisakan 32,05 persen penduduk DIY pada tahun 2018 yang masih memiliki ijazah SD ke bawah.

Belum optimalnya capaian program wajib belajar 9 tahun ini akan lebih tampak bila dilihat menurut kabupaten/kota. Hingga tahun 2018, ketimpangan partisipasi sekolah penduduk begitu kentara. Kabupaten Gunungkidul masih yang tertinggal dalam pendidikan. Sebanyak 45,94 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di wilayah terluas di DIY ini mempunyai ijazah SD ke bawah. Bahkan 25,04 persen tidak punya ijazah. Artinya penduduk yang berijazah jenjang pendidikan menengah ke atas baru mencapai 54,06 persen. Kontras dengan yang penduduk yang tinggal di Kota Yogyakarta. Lebih dari 75 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di kota ini telah menamatkan pendidikan menengah ke atas. Dan hanya 8,55 persen yang tidak punya ijazah. Inilah pekerjaan rumah pemerintah DIY untuk semakin memotivasi penduduk akan pentingnya pengetahuan sebagai modal jangka panjang agar hidup sejahtera. Pemeratan sarana pendidikan seperti kualitas pendidik, operasional sekolah yang sama hingga di wilayah pinggiran menjadi peran yang sangat penting.

3.4. Karakteristik Kesehatan

Paradigma pembangunan manusia diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat. Selain pendidikan, peningkatan derajat kesehatan merupakan tujuan akhir pemberdayaan fisik. Pemerintah begitu serius mewujudkan masyarakat yang sehat. Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sejauh mana pembangunan kesehatan penduduk akan digambarkan oleh indikator kesehatan seperti angka keluhan kesehatan, keberadaan sarana kesehatan, keaktifan masyarakat untuk memeriksa kondisi kesehatan, di samping indikator sosial lainnya.

Gambar 3.9.
Presentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan, 2016-2018



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2016-2018

Berdasarkan data Susenas, keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk akibat kecelakaan ataupun hal lain. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui gambaran umum tentang kondisi kesehatan penduduk, akibat terkena suatu penyakit tertentu. Gambaran perkembangan angka keluhan kesehatan DIY selama lima tahun terakhir seperti tampak pada gambar 3.9. Angka keluhan kesehatan tahun 2018 mencapai 35,32 persen. Dibandingkan dengan tahun 2017, angka keluhan kesehatan tahun 2018 mengalami peningkatan 2,42 persen poin. Akan tetapi secara umum, angka keluhan kesehatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 berfluktuatif. Keluhan kesehatan ini meliputi semua keluhan kesehatan yang dirasakan penduduk terhadap semua penyakit ringan seperti panas, batuk, sakit kepala hingga penyakit kronis. Selanjutnya tren penurunan persentase jumlah penduduk yang memiliki keluhan kesehatan di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul. Ini menunjukkan bahwa penduduk di dua kabupaten tersebut, saat ini semakin memperhatikan kondisi kesehatannya. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dapat mengurangi beban pemerintah dalam melakukan tindakan kuratif. Sehingga alokasi anggaran untuk upaya kuratif ini dapat dialihkan pada program pembangunan bidang kesehatan lainnya.

Tabel 3.5.
Presentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Kabupaten/kota, 2018

Kabupaten/kota	RS	Dokter	Puskesmas	Nakes	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	26,22	29,93	8,76	39,97	2,81
Bantul	23,15	26,99	15,07	33,73	7,71
Gunungkidul	14,90	38,74	17,16	32,88	3,96
Sleman	30,79	30,90	14,26	29,76	1,38
Yogyakarta	37,18	9,71	12,32	43,23	3,47
DIY	25,42	29,20	14,19	34,18	4,05

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2018

Salah satu upaya mengobati keluhan kesehatan adalah dengan berobat jalan. Berobat jalan dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan modern maupun tradisional. Data Susenas 2018 menunjukkan bahwa 34,18 persen penduduk DIY berobat jalan ke tenaga kesehatan dan sebanyak 29,20 persen memilih ke praktek dokter. Kemudian lainnya ke rumah sakit, puskesmas dan sarana kesehatan lainnya. Ini mengindikasikan bahwa mengunjungi tenaga kesehatan lebih mudah dijangkau daripada fasilitas kesehatan yang lain. Kemungkinan karena letaknya yang lebih dekat atau dari sisi biaya lebih murah.

Tabel 3.6.
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2017-2018

Kabupaten/ kota	Dokter ¹		Bidan		Tenaga Kesehatan Lain		Dukun	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kulonprogo	29,49	40,15	68,41	54,09	2,10	5,76	0,00	0,00
Bantul	51,27	56,90	48,01	39,80	0,73	3,30	0,00	0,00
Gunungkidul	37,93	46,08	61,47	53,92	0,00	0,00	0,60	0,00
Sleman	54,06	57,42	45,94	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Yogyakarta	69,78	54,53	30,22	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00
DIY	49,18	53,31	50,23	45,23	0,48	1,46	0,10	0,00

Sumber: DIY Dalam Angka 2019

Pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan berbeda antar kabupaten/kota. Akan tetapi mayoritas penduduk di kabupaten/kota lebih banyak yang memilih ke tenaga kesehatan kecuali penduduk Kabupaten Gunungkidul dimana 38,74 persen memanfaatkan

praktek dokter. Sementara dari tabel 3.5, juga terungkap bahwa berobat jalan di puskesmas relatif lebih sedikit. Di Kabupaten Kulonprogo tercatat hanya 8,76 persen saja, sementara kabupaten/kota lainnya berkisar pada angka 12-17 persen penduduk yang berobat jalan di Puskesmas. Keterbatasan jam layanan puskesmas yang terfokus dengan fasilitas lengkap di pagi hingga siang hari kemungkinan menjadi salah satu alasan penduduk yang mengalami keluhan kesehatan lebih memilih fasilitas kesehatan lainnya.

Karakteristik kesehatan DIY berikutnya digambarkan dengan penolong persalinan terakhir. Penolong persalinan sangat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi dalam proses persalinan. Keahlian tenaga persalinan yang disertai dengan pengetahuan, pengalaman akan membantu kelancaran dalam proses persalinan. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter, bidan dan tenaga medis lainnya dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun bayi atau yang lainnya. Pengukuran penolong proses kelahiran terakhir pada bayi didekati dengan persentase penolong proses kelahiran bayi pada wanita pernah kawin yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir.

Terjadi peningkatan presentase penolong persalinan tenaga medis oleh dokter pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penolong persalinan oleh Dokter pada tahun 2018 tercatat sebesar 53,31 persen atau naik 4,13 persen dibandingkan pada tahun 2017. Peningkatan penolong persalinan oleh dokter tersebut mengindikasikan bahwa penduduk lebih menyukai tenaga persalinan oleh dokter. Pemilihan dokter kemungkinan disebabkan tenaga dokter sudah dibekali keahlian, pengalaman dan pengetahuan khusus yang lebih dalam membantu persalinan dibandingkan tenaga medis lainnya.

Di sisi lain persentase penduduk yang memilih penolong persalinan dari tenaga bidan, justru sedikit mengalami penurunan. Ini semakin menguatkan bahwa telah terjadi pergeseran pemilihan tenaga persalinan dari bidan atau tenaga medis lainnya ke dokter. Indikasi ini terjadi di semua kabupaten/kota. Kabupaten Gunungkidul justru yang paling banyak untuk peningkatan persentase penduduk dimana penolong persalinan terakhir oleh dokter diikuti oleh Kabupaten Bantul. Meski demikian pemerintah tetap terus memberikan sosialisasi dan himbauan ke masyarakat terkait penolong persalinan yang sesuai dengan standar kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas proses persalinan dan menurunkan kematian bayi serta ibu pasca melahirkan.

Tabel 3.7.
Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Kabupaten/kota

Kabupaten/kota	RS Umum	RS Khusus	RS Bersalin	Puskesmas	Posyandu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	8	0	0	21	960
Bantul	11	6	3	27	1141
Gunungkidul	5	0	0	30	1468
Sleman	20	7	3	25	1530
Yogyakarta	11	10	6	18	621
DIY	55	23	12	121	5720

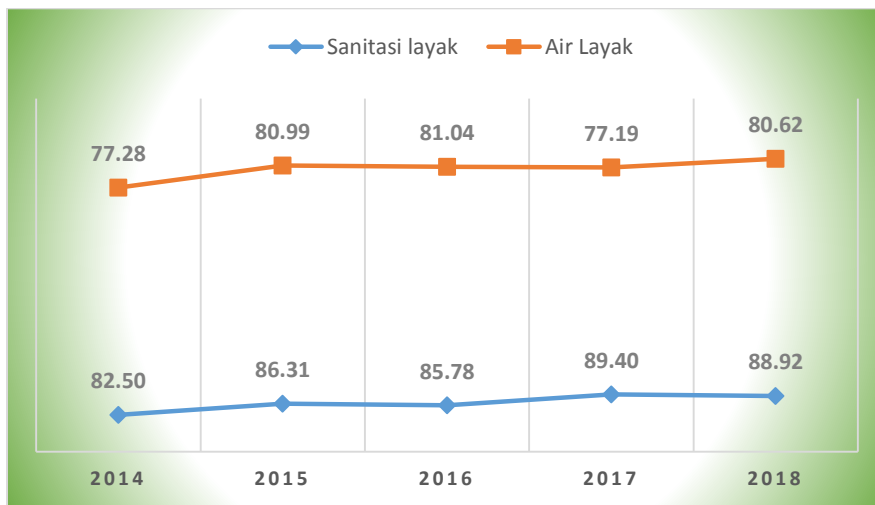
Sumber: DIY Dalam Angka 2019

Selanjutnya peningkatan derajat kesehatan di DIY telah ditopang dengan keberadaan sarana kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota. Semua kabupaten/kota telah memiliki fasilitas kesehatan dari rumah sakit, puskesmas hingga posyandu. Tabel 3.7 memperlihatkan sebaran fasilitas kesehatan menurut kabupaten/kota. Bila dilihat menurut jumlah penduduk kabupaten/kota, kebutuhan fasilitas kesehatan juga memperlihatkan ketimpangan. Di Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah penduduk 736.210 orang, hanya ada 5 rumah sakit. Ini berarti secara rata-rata 1 rumah sakit melayani 147.242 orang. Di lain pihak, terdapat 30 rumah sakit di Kabupaten Sleman dan 20 rumah sakit di Kabupaten Bantul. Meski jumlah penduduk lebih banyak, namun kedua wilayah ini mempunyai luas wilayah yang jauh lebih sempit daripada Kabupaten Gunungkidul. Artinya dari sisi keterjangkauan fasilitas kesehatan rumah sakit di Kabupaten Gunungkidul lebih sulit karena jarak selain beban pasien yang harus ditangani. Di sini pemerataan fasilitas kesehatan menjadi urgen untuk mengatasi pelayanan kesehatan hingga wilayah terpencil.

3.5. Karakteristik Standar Hidup

Selain kualitas Sumber daya manusia, modal fisik menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga. Menurut Amarta Sen, ketika ada sebagian masyarakat tidak bisa akses terhadap pelayanan pendidikan dasar atau kesehatan dasar akibat ketidakmampuan dalam ekonomi maka itu bisa dikatakan miskin. Indikator perumahan seperti sumber air minum layak dan sanitasi layak sebagai salah satu kualitas dari standar kehidupan yang layak.

Gambar 3.10.
Persentase rumah tangga menurut akses sanitasi layak dan air layak,
2014-2018



Sumber: Statistik Perumahan DIY, 2018

Berdasarkan gambar 3.10 persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak menunjukkan tren yang meningkat selama periode lima tahun terakhir. Akan tetapi persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak pada tahun 2018 menurun dari 89,40 persen pada tahun 2017 menjadi 88,92 persen. Penurunan ini terjadi terutama karena menurunnya presentasi penduduk dengan akses sanitasi layak di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan Sleman.

Di lain pihak, berdasarkan data Susenas tahun 2017-2018, standar hidup layak dari sisi penggunaan air minum layak pada tahun 2018 lebih baik dari pada tahun 2017. Semua kabupaten secara presentase rumah tangga dengan air minum layak meningkat kecuali di Kota Yogyakarta. Secara presentase, penggunaan air minum layak pada tahun 2018 paling banyak dijumpai di Kabupaten Gunungkidul yakni 90,37 persen. Program air bersih melalui PAM baik yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun swadaya dengan memanfaatkan air bawah tanah telah berkembang pesat di Kabupaten Gunungkidul. Keberadaan air layak tidak lagi sulit seperti periode sebelumnya Meskipun penggunaan air hujan atau membeli air tangki masih tetap dikonsumsi penduduk setempat.

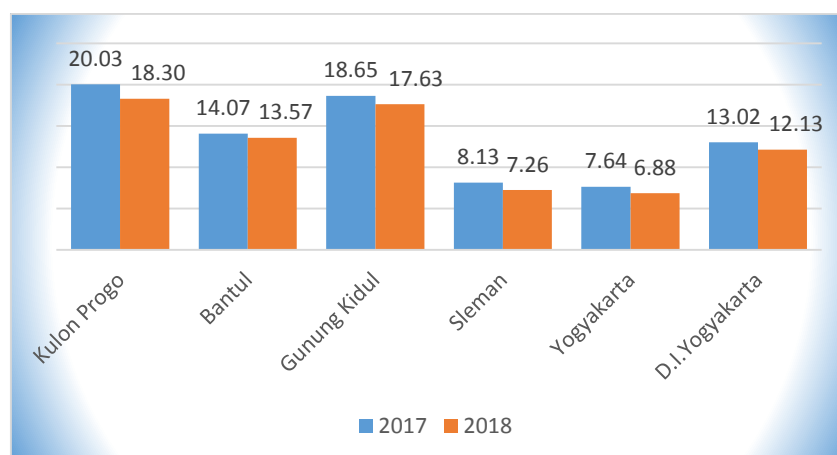
Tabel 3.8.
Presentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah.

Kabupaten/kota	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulon Progo	90,40	0,82	8,78
Bantul	78,83	10,41	10,76
Gunungkidul	94,71	0,70	4,59
Sleman	73,98	19,59	6,42
Yogyakarta	39,93	35,84	24,23
D.I.Yogyakarta	76,54	13,71	9,74

Sumber: Statistik Perumahan DIY, 2018

Standar hidup layak dari sisi kepemilikan rumah, memperlihatkan bahwa, sebanyak 76,54 persen rumah tangga telah menempati rumah milik sendiri, 13,71 persen tinggal di rumah dengan sistem sewa/kontrak dan sisanya menghuni rumah lainnya. Ditinjau menurut kabupaten/kota, lebih dari 90 persen rumah tangga di Kabupten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul tinggal di rumah milik sendiri. Keterjangkauan harga tanah dan tanah yang masih luas di kedua wilayah tersebut memungkinkan rumah tangga membangun rumah sendiri. Sementara rumah tangga di Kota Yogyakarta yang menempati rumah milik sendiri sebanyak 39,93 persen, 35,84 persen rumah tangga bertempat tinggal di rumah kontrak/sewa. Lokasi rumah yang dekat dengan tempat kerja atau kemudahan fasilitas umum seperti sekolah dan harga tanah yang sudah mahal, menjadi pilihan penduduk yang tinggal di kota Yogyakarta lebih memilih rumah dengan sisten sewa/kontrak.

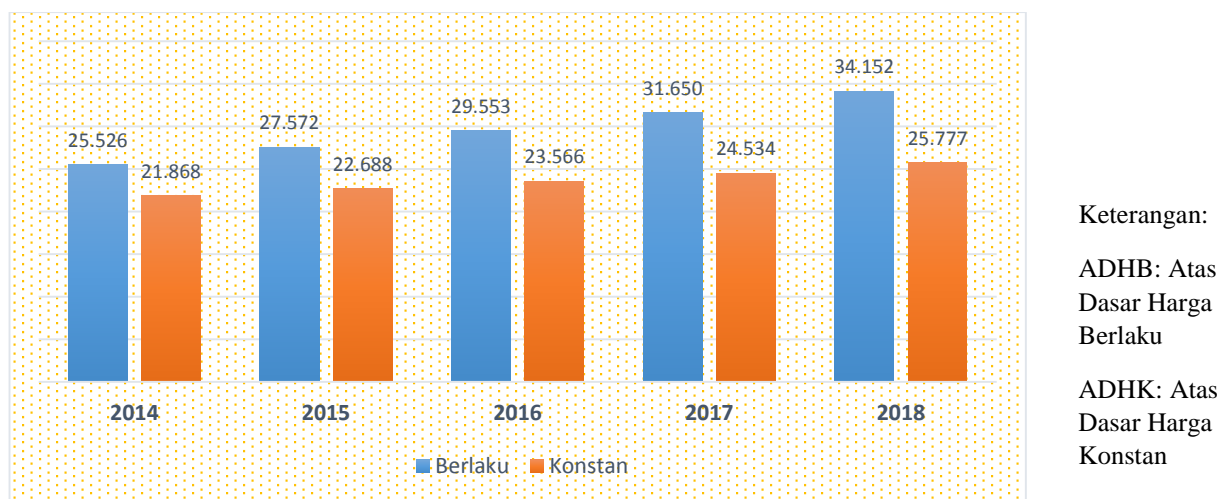
Gambar 3.11.
Angka Kemiskinan menurut Kabupaten/kota, 2017-2018



Sumber: DIY Dalam Angka, 2019

Selain dari sisi kualitas fasilitas perumahan, kemiskinan merupakan tantangan untuk menciptakan standar hidup layak di DIY. Perkembangan angka kemiskinan masih stagnan di level 2 digit. Terakhir, periode Maret 2018, angka kemiskinan DIY sebesar 12,13 persen turun 0,91 poin dibandingkan pada tahun 2017. Sementara angka kemiskinan tertinggi menurut kabupaten/kota periode 2017-2018 adalah Kabupaten Kulonprogo. Namun demikian, dilihat dari percepatan penurunan kemiskinan, tertinggi juga terjadi di Kabupaten Kulonprogo yakni dari 20,03 pada tahun 2017 menjadi 18,30 pada tahun 2018. Ini berarti upaya penurunan kemiskinan di kabupaten tersebut telah menunjukkan keberhasilan walaupun masih yang tertinggi.

Gambar 3.12.
PDRB perkapita ADHB dan ADHK (000) DIY, 2014-2018



Sumber: DIY Dalam Angka, 2019

Karakteristik standar hidup layak berikutnya adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dari rasio antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara kasar. Perkembangan nilai PDRB per kapita DIY selama periode 2014-2018 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku tahun 2014 tercatat mencapai Rp 25,526 juta dan secara nominal terus meningkat menjadi Rp 34,152 juta pada tahun 2018. Namun, peningkatan tersebut masih dipengaruhi oleh perubahan harga. Secara riil atau atas dasar harga konstan, PDRB perkapita DIY tahun 2018 tercatat sebesar 25,777 juta sementara pada tahun 2014 baru mencapai 21,868 juta.

BAB IV. CAPAIAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DIY

Pembangunan manusia pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas, mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki manusia. Pembangunan manusia dimaknai sebagai proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Ide dasar pembangunan manusia merupakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusianya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*Human Development Report*, 1990).

Dalam sudut pandang konvensional, pembangunan memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pendekatan pembangunan manusia lebih menfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Model pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tolok ukur pembangunan, dengan peningkatan kapabilitas manusia melalui pendidikan, pelatihan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, perumahan layak huni, dan perbaikan gizi. Peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan salah satu indikator komposit untuk mengukur capaian atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas kehidupan manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Namun indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah. IPM menjadi data yang sangat strategis karena selain banyak dibutuhkan sebagai

rujukan dari berbagai kalangan untuk penentuan kebijakan, juga merupakan semacam “*raport*” bagi kinerja pembangunan masing-masing daerah dalam pembangunan manusia di suatu wilayah.

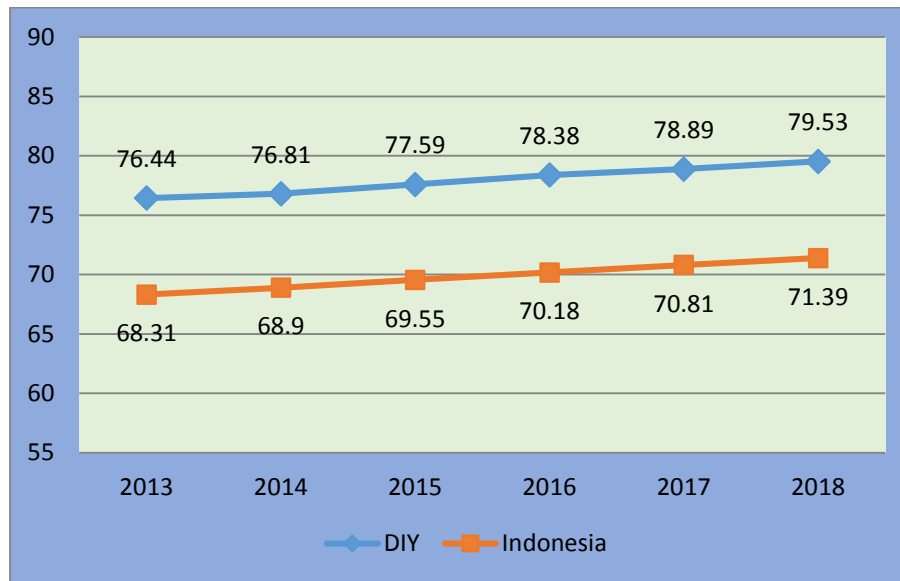
4.1 Capaian Indeks Pembangunan Manusia DIY 2013-2018

IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian. Capaian pembangunan manusia DIY sampai dengan tahun 2018 berada pada level 79,53. Secara umum, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY selama periode 2013-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang tersaji dalam Gambar 4.1. Indeks Pembangunan Manusia DIY pada tahun 2013 sebesar 76,44 mengalami peningkatan menjadi 79,53 pada tahun 2018 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,67 persen setiap tahun. Perkembangan ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik.

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia. Berubahnya status pembangunan manusia dapat dijadikan indikator dalam melihat perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi empat kelompok yaitu sangat tinggi dengan nilai IPM lebih besar atau sama dengan 80, tinggi dengan nilai IPM sebesar $70 \leq \text{IPM} < 80$, sedang dengan nilai IPM $60 \leq \text{IPM} < 70$, dan rendah dengan nilai IPM kurang dari 60. Membaiknya pembangunan manusia secara umum ditandai dengan peningkatan level IPM. Level IPM DIY selama periode 2013-2018 sudah berada dalam kategori IPM tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Hal ini menunjukkan bahwa DIY sudah berstatus tinggi dalam pembangunan manusianya.

Jika dibandingkan dengan level IPM nasional seperti Gambar 4.1, capaian IPM DIY periode 2013-2018 tercatat selalu lebih tinggi dan selalu menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Hal ini diduga karena adanya kesadaran masyarakat DIY akan pentingnya kesehatan yang tercermin pada meningkatnya angka harapan hidup, kesadaran akan pentingnya pendidikan yang tercermin pada meningkatnya angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta daya beli masyarakat yang semakin tinggi. Semakin meningkatnya keempat indikator penyusun IPM inilah mampu menggambarkan adanya perbaikan pembangunan manusia di DIY.

Gambar 4.1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2013-2018



Sumber BPS DIY, 2019

4.1.1. Perkembangan Indikator Penyusun IPM DIY

Gambar 4.1 juga mengilustrasikan perbandingan perkembangan IPM DIY selama tahun 2013-2018 yang memiliki pola searah dengan IPM pada level Nasional. Secara level nilai IPM DIY jauh berada di atas rata-rata IPM nasional. Hal ini mengisyaratkan pencapaian posisi kualitas pembangunan manusia di DIY sampai tahun 2018 yang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pencapaian pembangunan manusia secara nasional. Perbedaan level ini terjadi karena titik awal proses pembangunan di DIY khususnya dan Pulau Jawa pada umumnya terjadi lebih dahulu dibandingkan dengan wilayah lain di luar Pulau Jawa, terutama di Indonesia Bagian Timur.

Capaian IPM DIY sangat ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator yang mencirikan ketiga dimensi, yakni angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, yang terlihat semakin membaik dari tahun ke tahun seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY menurut Komponen, 2013-2018

Komponen	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,75	74,50	74,68	74,71	74,74	74,82
Harapan Lama Sekolah (EMS)	Tahun	14,67	14,85	15,03	15,23	15,42	15,56
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	Tahun	8,72	8,84	9,00	9,12	9,19	9,32
Pengeluaran per Kapita	Rp.000	12 261	12 294	12 684	13 229	13 521	13 946
IPM		76,44	76,81	77,59	78,38	78,89	79,53
Pertumbuhan IPM	%	0,37	0,48	1,02	1,01	0,65	0,81

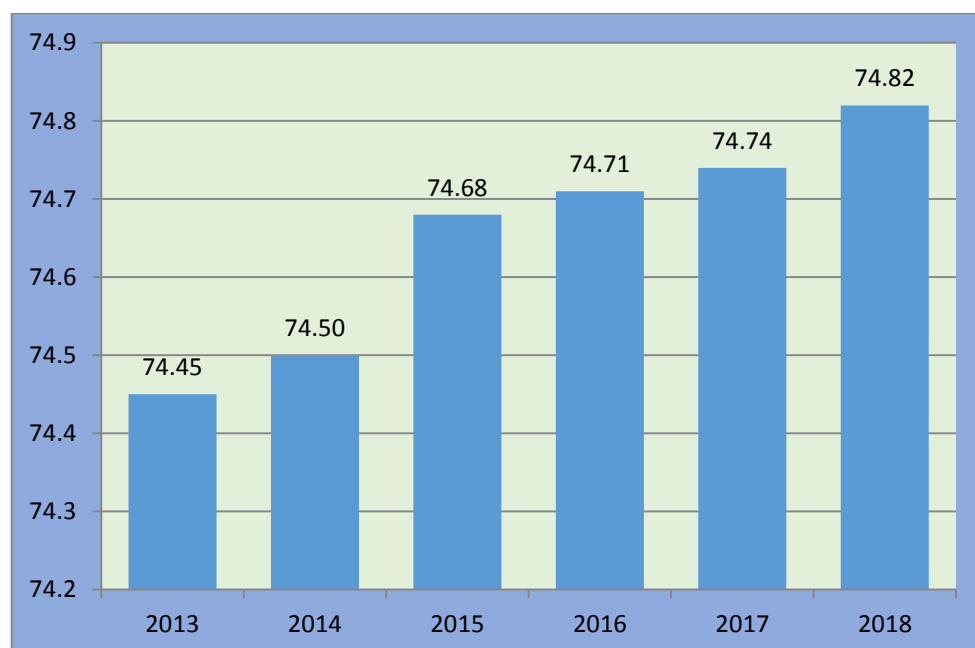
Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang dari lahir selama hidupnya secara rata-rata. Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup penduduk pada saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Indikator ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2013-2018, AHH penduduk DIY telah meningkat dari 74,45 tahun menjadi 74,82 tahun seperti tersaji pada Gambar 4.2. Artinya, terjadi peningkatan angka harapan hidup pada saat lahir sebesar 0,37 tahun selama lima tahun terakhir. atau tumbuh sebesar 0,11 persen per tahun. Naiknya angka harapan hidup tidak lepas dari upaya dan kerja keras dinas terkait terutama yang membidangi kesehatan untuk meningkatkan kualitas derajat hidup masyarakat. AHH sebesar 74,82 tahun pada tahun 2018 ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2018 hingga akhir hayatnya dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Dibandingkan dengan rata-rata secara nasional, level AHH penduduk DIY tercatat lebih tinggi dan menempati peringkat tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Tingginya level capaian AHH DIY maupun peningkatannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama

kebijakan penyediaan infrastruktur dan layanan kesehatan dasar yang murah, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk; peningkatan usia perkawinan pertama bagi wanita; peningkatan pendidikan wanita usia subur; peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tata cara perawatan selama kehamilan; penanganan proses persalinan, dan pasca kelahiran. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap berkurangnya kasus kejadian kematian bayi dan balita di seluruh wilayah DIY dalam beberapa dekade terakhir dan berimbas pada kenaikan angka harapan hidup.

Gambar 4.2.
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) DIY, 2013-2018



Sumber BPS DIY, 2019

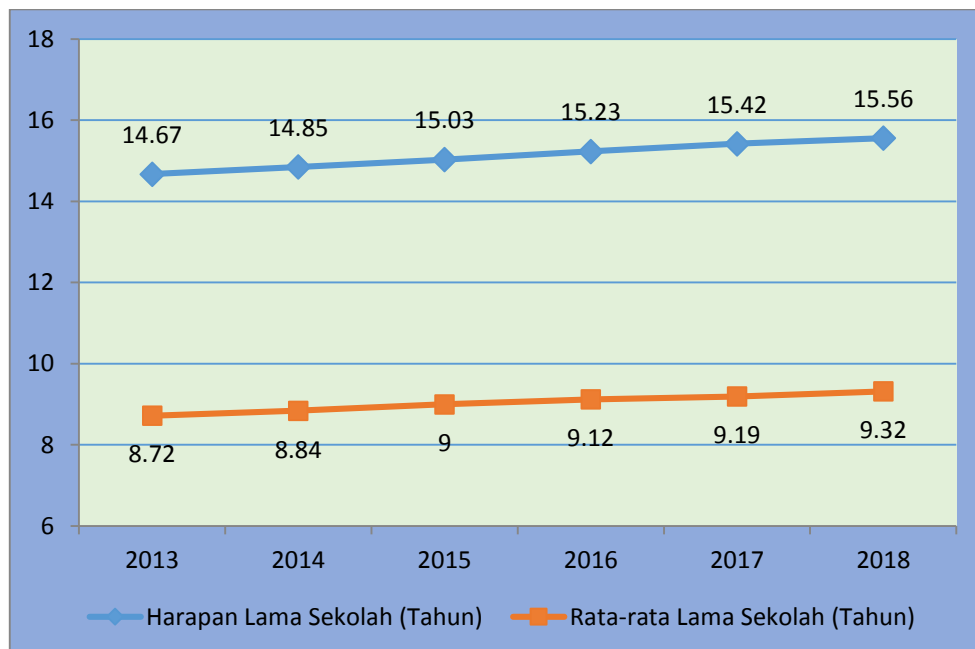
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan dalam IPM dibentuk oleh dua indikator pendidikan, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator tercatat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menggambarkan kualitas pendidikan penduduk DIY yang semakin membaik. Harapan Lama Sekolah (EMS) penduduk DIY meningkat secara nyata dari 14,67 tahun di tahun 2013 menjadi 15,56 tahun di tahun 2018. Artinya, terjadi kenaikan lama sekolah sebesar 0,89 tahun selama lima tahun terakhir (2013-2018). Harapan lama sekolah sebesar 15,56 tahun pada tahun 2018 ini menggambarkan

perkiraan lamanya tahun sekolah yang akan dijalani oleh anak-anak usia 7 tahun yang sudah setara dengan jenjang pendidikan D3 atau D4/S1.

Secara level, harapan lama sekolah penduduk DIY tercatat paling tinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Tingginya capaian dan peningkatan harapan lama sekolah penduduk didorong oleh meningkatnya angka partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan tingkat menengah dan tinggi yang cukup representatif, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk serta level kesejahteraan penduduk yang semakin meningkat.

Gambar 4.3.
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah DIY, 2013-2018



Sumber BPS DIY, 2019

Selain harapan lama sekolah, indikator penyusun dimensi pengetahuan lainnya yaitu rata-rata lama sekolah (MYS). Indikator tersebut merepresentasikan variabel stok atau akumulasi pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk berusia kerja (25 tahun ke atas). Capaian indikator rata-rata lama sekolah penduduk DIY pada tahun 2018 mencapai 9,32 tahun seperti tersaji pada Gambar 4.3. Angka ini menggambarkan rata-rata lama tahun bersekolah yang dijalani oleh penduduk DIY berusia 25 tahun ke atas yang sudah setara dengan lulus pada jenjang SMP. Rata-rata lama sekolah penduduk ini meningkat cukup nyata jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 yang mencapai 8,72 tahun. Artinya, ada

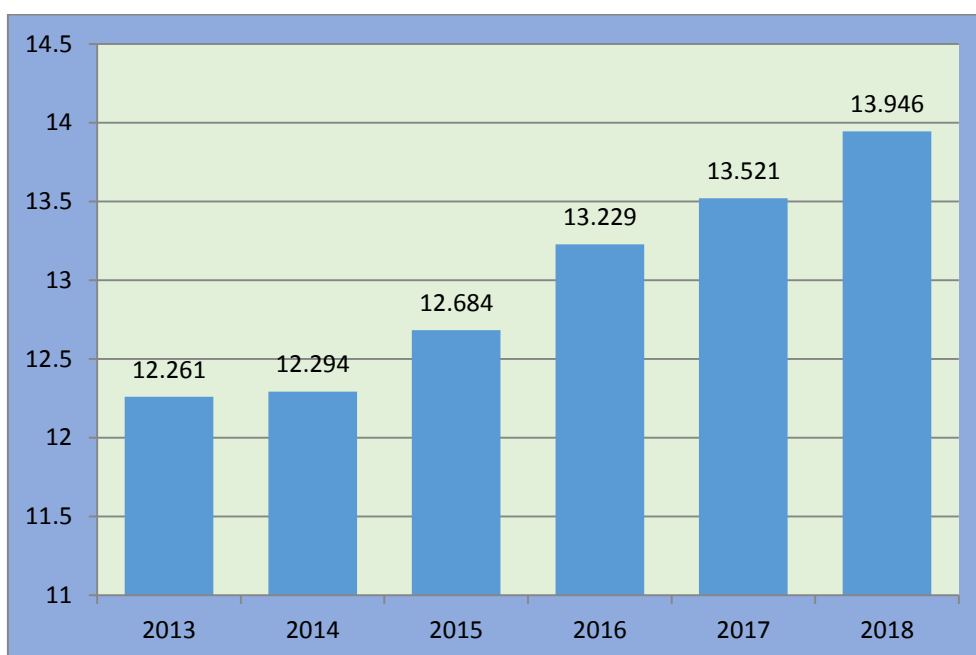
peningkatan level sebesar 0,6 tahun selama periode 2013- 2018. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia DIY yang lebih baik.

Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang terangkum dalam ukuran IPM adalah standar kehidupan yang layak. Standar hidup layak direpresentasikan oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan daya beli penduduk (harga konstan 2012). Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lainnya akan berbeda. Oleh karena itu diperlukan standarisasi agar kemampuan daya beli antar wilayah dapat diperbandingkan. Standarisasi tersebut misal satu rupiah di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah suatu di wilayah yang dijadikan patokan, dalam hal ini adalah Jakarta Selatan. Dengan adanya standarisasi maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Secara umum kemampuan daya beli masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tercermin dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan, Pengeluaran per kapita riil penduduk DIY yang disesuaikan mencapai level Rp13,95 juta selama tahun 2018. Angka ini semakin meningkat selama periode 2013-2018 seperti tersaji pada Gambar 4.4. Peningkatan ini menggambarkan standar kehidupan penduduk yang semakin membaik, artinya kualitas kesejahteraannya semakin meningkat. Selain itu juga mencerminkan kondisi perekonomian yang terus membaik dari tahun ke tahun. Secara level, pengeluaran riil perkapita penduduk DIY tercatat berada di peringkat ketiga tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Tingginya level pengeluaran riil per kapita ini dipengaruhi oleh pola konsumsi penduduk DIY yang lebih bervariasi serta tingkat harga komoditas barang dan jasa yang secara relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat harga komoditas yang sama di provinsi lain. Dengan kata lain, daya beli penduduk DIY lebih tinggi dari provinsi lainnya.

Gambar 4.4.
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun di DIY, 2013-2018 (Rp000)



Sumber BPS DIY, 2019

4.1.2. Perbandingan IPM DIY dengan Provinsi Lainnya di Indonesia

Capaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan secara komprehensif tergambar dari angka IPM masing-masing provinsi. Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya. Arah pembangunan manusia di tingkat provinsi sejalan dengan perkembangan pembangunan manusia di tingkat nasional. Secara umum, pembangunan manusia di level provinsi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2018, pencapaian pembangunan manusia di tingkat provinsi cukup bervariasi seperti tersaji pada Tabel 4.2. IPM tertinggi pada tingkat provinsi masih diraih oleh Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 80,47 sedangkan capaian terendah ditempati oleh Provinsi Papua dengan IPM sebesar 60,06. Capaian IPM DIY periode 2013-2018 tercatat selalu lebih tinggi dan selalu menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia setelah DKI Jakarta.

Lima provinsi yang memiliki level capaian IPM tertinggi pada tahun 2018 adalah DKI Jakarta (80,47), DIY (79,53), Kalimantan Timur (75,93), Kepulauan Riau (74,84), dan Bali (74,77). Sebagian besar provinsi dengan level IPM tertinggi terdapat di Kawasan Indonesia Barat. Sementara, Provinsi Papua (60,06), Papua Barat (63,74), NTT (64,39), Sulawesi Barat

(65,10), dan Kalimantan Barat (66,98) merupakan lima provinsi yang memiliki level IPM terendah di Indonesia. Kelima provinsi dengan level IPM terendah ini sebagian besar terdapat di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia. Secara umum, fenomena ini menggambarkan IPM di Kawasan Indonesia Barat cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Indonesia Timur. Artinya, masih ada kesenjangan atau gap kualitas pembangunan manusia yang cukup lebar antara kawasan Indonesia Barat dan Timur.

Selisih antara level IPM provinsi tertinggi dan terendah pada tahun 2018 tercatat sebesar 20,41 poin. Peningkatan IPM di tingkat nasional juga tercermin pada level provinsi. Selama periode 2017 hingga 2018, IPM di seluruh provinsi mengalami peningkatan. Pada periode ini, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Provinsi Papua (1,64 persen), Provinsi Sulawesi Barat (1,24 persen), dan Provinsi Papua Barat (1,19 persen). Sedangkan DIY dengan pertumbuhan IPM sebesar 0,81 persen.

Secara umum, terdapat satu provinsi di Indonesia yang memiliki level IPM pada tahun 2018 lebih besar dari 80 atau termasuk dalam kategori IPM “sangat tinggi” yaitu DKI Jakarta. Provinsi tersebut merepresentasikan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian Indonesia. Sebagian besar level IPM provinsi lainnya berada pada kategori “tinggi” ($70 \leq \text{Nilai IPM} < 80$) dengan jumlah 21 provinsi. Artinya, terjadi perubahan status tujuh provinsi dari IPM sedang menjadi IPM tinggi. Sebanyak 12 provinsi termasuk dalam kategori IPM “sedang” ($60 \leq \text{Nilai IPM} < 70$) dan tidak ada provinsi yang termasuk dalam kategori IPM rendah ($\text{IPM} < 60$).

Nilai IPM suatu daerah sangat ditentukan oleh keempat indikator penyusunnya yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan daya beli. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur harapan hidup saat lahir di Indonesia berkisar antara 64,58 tahun (Sulawesi Barat) hingga 74,82 tahun (DIY). DIY tercatat menjadi provinsi dengan umur harapan hidup tertinggi secara nasional. Perbedaan level umur harapan hidup merepresentasikan perbedaan kualitas kesehatan penduduk terutama pada kelompok balita, ketersediaan infrastruktur kesehatan dan tenaga penolong kesehatan yang representatif, kemudahan dalam mengakses sarana kesehatan yang tersedia, maupun pendidikan wanita berusia subur.

Sementara itu, pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah pada tahun 2018 berkisar antara 10,83 tahun (Papua) hingga 15,56 tahun (DI Yogyakarta), serta Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas berkisar antara 6,52 tahun (Papua) hingga 11,05 tahun (DKI Jakarta). Indikator rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke

atas tersebut merepresentasikan stok modal manusia. Rata-rata lama sekolah DIY pada tahun 2018 sebesar 9,32 dan menempati urutan ke enam di Indonesia.

Indikator yang keempat yaitu indikator pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan sebagai proksi dimensi daya beli penduduk antar provinsi yang menunjukkan pola cukup bervariasi. Level pengeluaran per kapita riil disesuaikan yang tertinggi pada tahun 2018 tercatat di Provinsi DKI Jakarta dengan level 18,13 juta rupiah per tahun dan terendah di Provinsi Papua sebesar 7,2 juta rupiah per tahun. DIY menempati urutan ketiga tertinggi setelah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau.

Tabel 4.2.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2017-2018

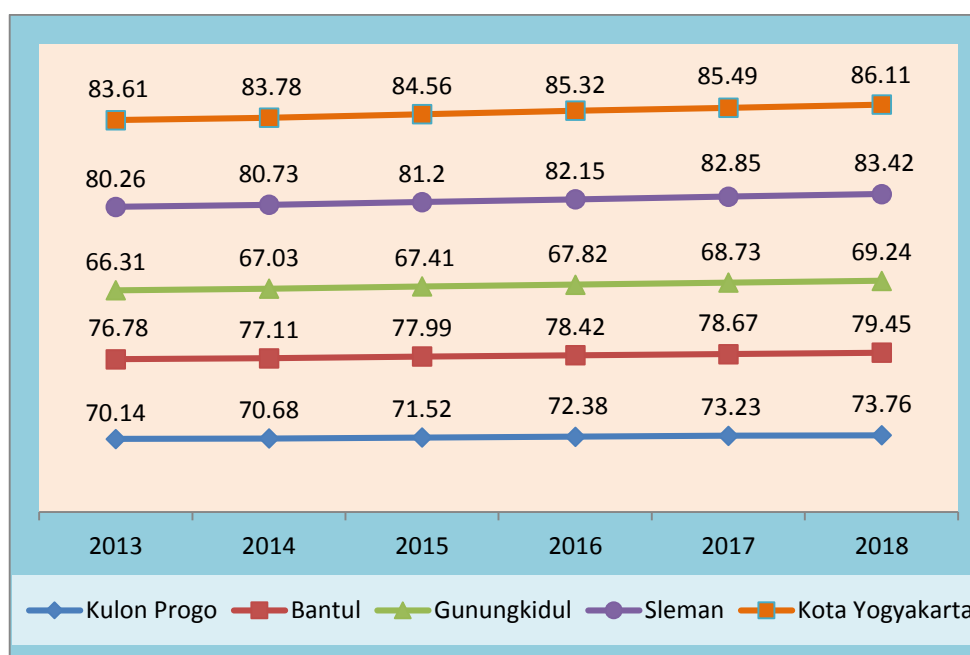
Provinsi	AHH (Tahun)		EMS (Tahun)		MYS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM		
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	Capaian	Pertumbuh- an (%)	2017-2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	69,52	69,64	14,13	14,27	8,98	9,09	8 957	9 186	70,60	71,19	0,84
Sumatera Utara	68,37	68,61	13,10	13,14	9,25	9,34	10 036	10 391	70,57	71,18	0,86
Sumatera Barat	68,78	69,01	13,94	13,95	8,72	8,76	10 306	10 638	71,24	71,73	0,69
Riau	70,99	71,19	13,03	13,11	8,76	8,92	10 677	10 968	71,79	72,44	0,91
Jambi	70,76	70,89	12,87	12,90	8,15	8,23	9 880	10 357	69,99	70,65	0,94
Sumatera Selatan	69,18	69,41	12,35	12,36	7,99	8,00	10 220	10 652	68,86	69,39	0,77
Bengkulu	68,59	68,84	13,57	13,58	8,47	8,61	9 778	10 162	69,95	70,64	0,99
Lampung	69,95	70,18	12,46	12,61	7,79	7,82	9 413	9 858	68,25	69,02	1,13
Kep. Bangka Belitung	69,95	70,18	11,83	11,87	7,78	7,84	12 066	12 666	69,99	70,67	0,97
Kepulauan Riau	69,48	69,64	12,81	12,82	9,79	9,81	13 566	13 976	74,45	74,84	0,52
DKI Jakarta	72,55	72,67	12,86	12,95	11,02	11,05	17 707	18 128	80,06	80,47	0,51
Jawa Barat	72,47	72,66	12,42	12,45	8,14	8,15	10 285	10 790	70,69	71,30	0,86
Jawa Tengah	74,08	74,18	12,57	12,63	7,27	7,35	10 377	10 777	70,52	71,12	0,85
DIY	74,74	74,82	15,42	15,56	9,19	9,32	13 521	13 946	78,89	79,53	0,81
Jawa Timur	70,80	70,97	13,09	13,10	7,34	7,39	10 973	11 380	70,27	70,77	0,71
Banten	69,49	69,64	12,78	12,85	8,53	8,62	11 659	11 994	71,42	71,95	0,74
Bali	71,46	71,68	13,21	13,23	8,55	8,65	13 573	13 886	74,30	74,77	0,63
NTB	65,55	65,87	13,46	13,47	6,90	7,03	9 877	10 284	66,58	67,30	1,08
NTT	66,07	66,38	13,07	13,10	7,15	7,30	7 350	7 566	63,73	64,39	1,04
Kalimantan Barat	69,92	70,18	12,50	12,55	7,05	7,12	8 472	8 860	66,26	66,98	1,09
Kalimantan Tengah	69,59	69,64	12,45	12,55	8,29	8,37	10 492	10 931	69,79	70,42	0,90
Kalimantan Selatan	68,02	68,23	12,46	12,50	7,99	8,00	11 600	12 062	69,65	70,17	0,75
Kalimantan Timur	73,70	73,96	13,49	13,67	9,36	9,48	11 612	11 917	75,12	75,83	0,95
Kalimantan Utara	72,47	72,50	12,79	12,82	8,62	8,87	8 643	8 943	69,84	70,56	1,03
Sulawesi Utara	71,04	71,26	12,66	12,68	9,14	9,24	10 422	10 731	71,66	72,20	0,75
Sulawesi Tengah	67,32	67,78	13,04	13,13	8,29	8,52	9 311	9 488	68,11	68,88	1,13
Sulawesi Selatan	69,84	70,08	13,28	13,34	7,95	8,02	10 489	10 814	70,34	70,90	0,80
Sulawesi Tenggara	70,47	70,72	13,36	13,53	8,46	8,69	9 094	9 262	69,86	70,61	1,07
Gorontalo	67,14	67,45	13,01	13,03	7,28	7,46	9 532	9 839	67,01	67,71	1,04
Sulawesi Barat	64,34	64,58	12,48	12,59	7,31	7,50	8 736	9 051	64,30	65,10	1,24
Maluku	65,40	65,59	13,91	13,92	9,38	9,58	8 433	8 721	68,19	68,87	1,00
Maluku Utara	67,54	67,80	13,56	13,62	8,61	8,72	7 792	7 980	67,20	67,76	0,83
Papua Barat	65,32	65,55	12,47	12,53	7,15	7,27	7 493	7 816	62,99	63,74	1,19
Papua	65,14	65,36	10,54	10,83	6,27	6,52	6 996	7 159	59,09	60,06	1,64
INDONESIA	71,06	71,20	12,85	12,91	8,10	8,17	10 664	11 059	70,81	71,39	0,82

4.2. Capaian IPM per Kabupaten/kota di DIY 2013-2018

Gambaran kualitas pembangunan manusia di DIY menurut kabupaten/kota selama periode 2013-2018 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini terlihat bahwa capaian nilai IPM semua kabupaten/kota semakin meningkat. Pada tahun 2018, capaian pembangunan manusia tertinggi tercatat di Kota Yogyakarta dengan nilai IPM sebesar 86,11, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 83,42. Kedua wilayah tersebut memiliki nilai IPM di atas nilai IPM DIY sebesar 79,53. Sedangkan ketiga kabupaten lainnya berada di bawah nilai IPM DIY secara berturut-turut adalah Kabupaten Bantul (79,45), Kabupaten Kulonprogo (73,76), dan posisi terendah tercatat di Kabupaten Gunungkidul (69,24).

Berdasarkan level IPM, ada dua wilayah di DIY yang memiliki nilai IPM lebih besar dari 80 atau termasuk dalam kategori IPM “sangat tinggi” yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dua kabupaten dengan level IPM berada pada kategori “tinggi” ($70 \leq \text{Nilai IPM} < 80$) yaitu Kabupaten Bantul dan Kulonprogo. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul berada pada kategori “sedang” ($60 \leq \text{Nilai IPM} < 70$).

Gambar 4.5. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY, 2013-2018



Sumber BPS DIY, 2019

Perkembangan capaian IPM kabupaten/kota di DIY selama periode 2013-2018 tersaji pada Gambar 4.5. IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2013 tercatat sebesar 83,61 dan meningkat secara bertahap menjadi 86,11 pada tahun 2018. Selama periode yang sama, level

IPM Kabupaten Sleman juga meningkat dari 80,26 menjadi 83,42. Kedua daerah tersebut termasuk dalam lima kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM tertinggi secara nasional, bahkan level IPM Kota Yogyakarta menempati peringkat tertinggi secara nasional di atas Kota Jakarta Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, pencapaian angka IPM tersebut menggambarkan kualitas pembangunan manusia di Kota Yogyakarta yang relatif lebih baik dibandingkan dengan semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tercatat ada sebanyak 29 kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori sangat tinggi pada tahun 2018.

Capaian IPM Kabupaten Bantul dan Kulonprogo pada tahun 2018 masing-masing sebesar 79,45 dan 73,76 yang berada dalam kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Secara nasional, tercatat sebanyak 163 daerah kabupaten/kota yang memiliki IPM dalam kategori tinggi. Sementara itu, capaian IPM Kabupaten Gunungkidul sebesar 69,24 dan masih termasuk dalam kategori IPM sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang termasuk dalam klasifikasi IPM sedang tercatat sebanyak 296 daerah. Apabila dibandingkan dengan level IPM nasional, semua kabupaten/kota di DIY memiliki capaian IPM di atas level nasional, kecuali IPM Kabupaten Gunungkidul yang masih berada di bawah IPM nasional.

Tabel 4.3. Perkembangan Komponen Penyusunan IPM Kabupaten/Kota di DIY, 2017-2018

Kabupaten/Kota	AHH (Tahun)		EMS (Tahun)		MYS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kulonprogo	75,06	75,12	14,23	14,24	8,64	8,65	9 277	9 698	73,23	73,76
Bantul	73,56	73,66	14,74	15,03	9,20	9,35	14 995	15 386	78,67	79,45
Gunungkidul	73,82	73,92	12,94	12,95	6,99	7,00	8 788	9 163	68,73	69,24
Sleman	74,63	74,69	16,48	16,71	10,65	10,66	15 365	15 844	82,85	83,42
Kota Yogyakarta	74,35	74,45	16,82	17,05	11,43	11,44	18 005	18 629	85,49	86,11
DIY	74,74	74,82	15,42	15,56	9,19	9,32	13 521	13 946	78,89	79,53

Apabila ditinjau dari komponen penyusunnya, indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota juga terlihat bervariasi. Masing-masing indikator mengalami kenaikan untuk seluruh kabupaten/kota di DIY. Pada dimensi umur panjang dan sehat, indikator angka harapan hidup saat lahir berkisar antara 73,66 tahun (Kabupaten Bantul) hingga 75,12 tahun

(Kabupaten Kulonprogo) pada tahun 2018. Secara nasional, angka harapan hidup Kabupaten Kulon Progo tercatat tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah di D.I Yogyakarta berkisar antara 12,95 tahun (Kabupaten Gunungkidul) hingga 17,05 tahun (Kota Yogyakarta). Tingginya indikator harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman didorong oleh adanya potensi dan ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat menengah dan tinggi yang cukup representatif. Kedua daerah ini menjadi daerah rujukan utama dari berbagai daerah di Indonesia yang ingin melanjutkan studinya baik di tingkat menengah maupun pendidikan tinggi. Sementara itu, indikator rata-rata lama sekolah berkisar antara 7,00 tahun (Kabupaten Gunungkidul) hingga 11,44 tahun (Kota Yogyakarta). Secara nasional, capaian rata-rata lama sekolah Kota Yogyakarta berada pada posisi sembilan tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Rendahnya capaian indikator pendidikan di Gunungkidul berkaitan dengan akses pendidikan yang jauh lebih sulit dibandingkan keempat kabupaten/kota lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan dan persebaran fasilitas pendidikan serta faktor geografis berupa wilayah pegunungan.

Pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran per kapita riil di DIY pada tahun 2018 berkisar antara Rp9,16 juta per tahun (Kabupaten Gunungkidul) hingga Rp18,63 juta per tahun (Kota Yogyakarta). Secara nasional, capaian pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan di Kota Yogyakarta berada dalam kelompok empat daerah tertinggi di antara kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat Kota Yogyakarta yang lebih bervariasi.

4.3. Capaian IPM per Kecamatan di DIY 2013-2018

Ketika terjadi pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan yang berorientasi ekonomi (pertumbuhan ekonomi, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia) kepada pembangunan yang berorientasi manusia maka terjadi pergeseran pusat perhatian pembangunan dari yang bersifat fisik ke non fisik pada manusia. Ketika manusia menjadi titik sentral pembangunan maka secara otomatis manusia tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga menjadi subjek pembangunan dalam setiap tahap pembangunan.

Pembangunan sesungguhnya adalah tentang penduduk (berupa pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial), untuk penduduk (berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan pertumbuhan ekonomi) dan oleh penduduk (berupa upaya pemberdayaan penduduk dalam partisipasi politik dan pembangunan). Keberhasilan pembangunan manusia pada akhirnya akan menentukan keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

Untuk mengukur pencapaian keberhasilan pembangunan manusia dimanifestasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan pengukuran perbandingan nilai pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu wilayah dikategorikan maju, berkembang, atau terbelakang, dan digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan pembangunan terhadap kualitas hidup.

Untuk lebih melengkapi informasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY tahun 2018 ini maka disajikan angka IPM per kecamatan. Angka IPM yang disajikan adalah keadaan tahun 2013 dan tahun 2018 untuk dapat memberi gambaran disparitas pembangunan manusia di DIY. Penyusunan nilai IPM menggunakan metodologi baru yang didasarkan pada indikator angka harapan hidup, rata-rata harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan rata-rata paritas daya beli.

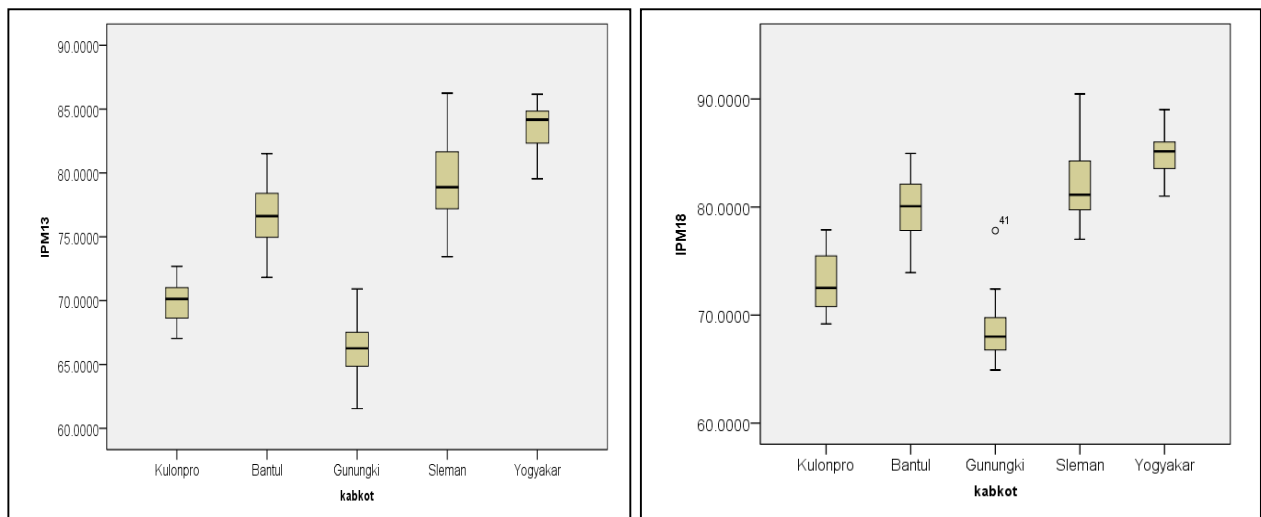
4.3.1. Hasil Indeks Pembangunan Manusia per Kecamatan

Indeks Pembangunan Manusia pada dasarnya mengukur capaian secara umum dari proses pembangunan manusia dengan indikator yang dilihat berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi/standar hidup layak. Masing-masing dari dimensi tersebut memiliki ukurannya masing-masing. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, nilai IPM DIY pada tahun 2018 sebesar 79,53. Nilai ini meningkat jika dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 76,44. Hal ini bisa diartikan bahwa pembangunan manusia di DIY mengalami peningkatan.

Meskipun demikian nilai IPM tidaklah homogen kalau ditinjau per kecamatan dan tampak bervariasi antar kecamatan di seluruh Provinsi DIY.

Gambaran variasi IPM per kecamatan di DIY dapat dilihat pada gambar 4.6. Sebaran IPM di hampir semua kabupaten/kota relatif homogen, kecuali di Kabupaten Sleman yang tampak sebaran IPM-nya relatif beragam dengan ditunjukkan oleh gambar diagram boxplot dengan ekor yang cukup panjang. Bila ekor pada diagram boxplot tidak panjang hal ini mengindikasikan bahwa IPM di daerah tersebut tidak beragam yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia di wilayah tersebut relatif merata. Hanya saja masalahnya perlu perhatian homogen di angka IPM yang rendah atau nilai yang tinggi. Bila homogen di angka IPM yang rendah maka perlu diperhatikan dalam pengembangan pembangunan manusia di masa selanjutnya. Sementara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sleman mengindikasikan kualitas pembangunan manusianya relatif bervariasi. Pada tahun 2018 IPM di Depok mencapai 90,47 sementara di Prambanan sekitar 77,01 poin, walaupun secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Sleman relatif baik bila dibandingkan kecamatan pada kabupaten/kota lain di DIY.

Gambar 4.6.
Variasi IPM menurut Kecamatan se DIY
Tahun 2013-2018



Capaian IPM tertinggi terdapat di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, yang pada tahun 2018 dengan poin mencapai 90,47 yang relatif konsisten pada posisi teratas dengan kondisi pada tahun 2013. Posisi berikutnya adalah Kecamatan Gondokusuman dengan nilai IPM pada 2018 sebesar 89,01. Sementara itu yang mengejutkan adalah capaian pembangunan

manusia di posisi ketiga yaitu Kecamatan Pakualaman (dengan indeks sebesar 88,50) mengungguli Kecamatan Mergangsan dan Ngampilan yang memiliki capaian IPM masing-masing secara berturut-turut sebesar 86,25 dan 86,01 poin di Kota Yogyakarta, atau Kecamatan Mlati (86,70) serta Kecamatan Ngaglik dengan angka IPM sebesar 86,01 di Kabupaten Sleman.

Tabel 4.4. IPM Kecamatan dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di DIY, Tahun 2013-2018

10 Terbesar IPM 2018

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	IPM 2013	IPM 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sleman	Depok	86,25	90,47
2	Yogyakarta	Gondokusuman	86,17	89,01
3	Yogyakarta	Pakualaman	86,04	88,50
4	Sleman	Mlati	84,05	86,70
5	Yogyakarta	Mergangsan	84,91	86,25
6	Sleman	Ngaglik	83,49	86,06
7	Yogyakarta	Ngampilan	84,84	86,01
8	Yogyakarta	Kraton	84,69	85,60
9	Yogyakarta	Wirobrajan	84,54	85,28
10	Yogyakarta	Mantriweron	84,17	85,21

10 Terkecil IPM 2018

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	IPM 2013	IPM 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gunungkidul	Tanjungsari	65,00	68,14
2	Gunungkidul	Rongkop	66,93	67,89
3	Gunungkidul	Semanu	64,94	67,59
4	Gunungkidul	Paliyan	65,24	67,57
5	Gunungkidul	Nglipar	66,03	67,23
6	Gunungkidul	Purwosari	64,86	66,77
7	Gunungkidul	Panggang	64,58	66,66
8	Gunungkidul	Tepus	64,20	65,55
9	Gunungkidul	Gedangsari	62,23	65,16
10	Gunungkidul	Saptosari	61,54	64,92

Sementara itu tiga kecamatan terendah capaian pembangunan manusianya dibandingkan kecamatan lain pada tahun 2018 adalah Kecamatan Saptosari (64,92), Gedangsari (65,16) dan Tepus (65,55). Sementara kecamatan yang masuk 10 terkecil berdasarkan nilai IPM lainnya seluruhnya ada di Kabupaten Gunungkidul yaitu Panggang,

Purwosari, Nglipar, Paliyan, Semanu, Rongkop, dan Tanjungsari.

Disparitas capaian IPM antar kecamatan yang memiliki capaian IPM tertinggi (Kecamatan Depok) dan yang terendah (Kecamatan Saptosari) relatif cukup besar yakni 25,55 poin. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan manusia antar wilayah kecamatan. Jika kita membagi wilayah kecamatan DIY menjadi tiga bagian yakni menurut disparitas rentang nilai IPM, maka disparitas di Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta relatif kecil yaitu masing-masing secara berurutan sebesar 8,70 dan 8,01 poin. Di Kabupaten Kulonprogo kecamatan dengan angka IPM tertinggi adalah Kecamatan Wates (77,89) dan terendah Kecamatan Kokap (69,18). Sementara di Kota Yogyakarta IPM tertinggi di Kecamatan Gondokusuman (89,01) dan terendah di Kecamatan Gedongtengen (81,01). Rentang menengah IPM kecamatan di DIY memiliki disparitas sekitar 11,03 dan 12,90 poin terjadi di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Wonosari dengan angka IPM tertinggi di kedua kabupaten ini sedangkan skor terendah di Kecamatan Dlingo dan Saptosari. Wilayah di DIY yang memiliki disparitas pembangunan manusia terbesar yaitu sebesar 13,46 poin terdapat di Kabupaten Sleman dengan Kecamatan Depok tertinggi dan Kecamatan Prambanan yang terendah.

Kecamatan Depok yang merupakan kecamatan dengan indeks pembangunan manusia peringkat pertama di DIY memiliki keunggulan pada ketiga indeks penyusunnya yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. Indikator pendidikan yaitu rata-rata harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di daerah tersebut cukup menonjol dan sangat mendukung berada di peringkat pertama. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kecamatan Depok sudah mencapai 12 tahun atau lulus SLTA.

Selain melihat peringkat atau ranking, capaian IPM di kecamatan dapat juga dilihat dari besaran angka pertumbuhan nilai IPM-nya. Besaran angka pertumbuhan per tahun menggambarkan seberapa besar rata-rata akselerasi capaian pembangunan manusia dalam lima tahun (tahun 2013 berbanding 2018). Akselerasi tertinggi pembangunan manusia secara umum berada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, diikuti Kecamatan Temon, Wates, dan Panjatan di Kabupaten Kulonprogo, serta Kecamatan Jetis dan Pajangan di Kabupaten Bantul. Sehingga sangat wajar dengan akselerasi pembangunan manusia yang relatif tinggi Kecamatan Panjatan mampu menggeser peringkat Kecamatan Galur atau Nanggulan di Kabupaten Kulonprogo, dengan kata lain Kecamatan Panjatan mampu naik tiga peringkat dibandingkan lima tahun sebelumnya. Besaran angka pertumbuhan dari Kecamatan Panjatan dalam periode 2013-2018 rata-rata mencapai 1,42 persen per tahun. Kecamatan Jetis

dan Pajangan di Kabupaten Bantul juga memiliki angka pertumbuhan sangat tinggi, yaitu berturut-turut 1,29 dan 1,26 persen per tahun. Hal ini cukup wajar oleh karena bangkitnya wilayah tersebut kemungkinan disebabkan adanya perumahan baru atau rencana pembangunan bandara dan mega proyek lain di Kabupaten Kulonprogo sehingga masyarakat lebih termotivasi dalam pemberdayaan kualitas manusia.

Kecamatan Rongkop dan Nglipar merupakan kecamatan yang memiliki capaian IPM masuk dalam 10 terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sayangnya rata-rata angka pertumbuhan IPM juga tidak menunjukkan indikasi menggembirakan bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan capaian rata-rata angka pertumbuhan IPM kecamatan lain, masing-masing hanya 0,29 dan 0,36 persen per tahun. Sementara Kecamatan Danurejan di Kota Yogyakarta memiliki rata-rata angka pertumbuhan IPM paling rendah, yaitu hanya 0,15 persen per tahun pada periode 2013-2018.

Berdasarkan skala internasional, capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Kelompok pertama yaitu kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kedua wilayah masuk kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), ketiga wilayah masuk kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$) dan terakhir keempat kategori rendah ($IPM < 60$).

Tabel 4.5. Rata-rata Pertumbuhan IPM Kecamatan per Tahun dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di DIY, Tahun 2013-2018

10 Terbesar 2018

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	Rata-rata pertumbuhan per tahun 2013-2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gunungkidul	Wonosari	1,95
2	Kulonprogo	Temon	1,62
3	Kulonprogo	Wates	1,43
4	Kulonprogo	Panjatan	1,42
5	Bantul	Jetis	1,29
6	Bantul	Pajangan	1,26
7	Kulonprogo	Pengasih	1,19
8	Kulonprogo	Lendah	1,18
9	Bantul	Sanden	1,15
10	Bantul	Pleret	1,13

10 Terkecil 2018

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	Rata-rata pertumbuhan per tahun 2013-2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sleman	Ngemplak	0,27
2	Yogyakarta	Umbulharjo	0,27
3	Sleman	Cangkringan	0,27
4	Yogyakarta	Kotagede	0,25
5	Yogyakarta	Mantriaron	0,25
6	Yogyakarta	Jetis	0,22
7	Yogyakarta	Kraton	0,21
8	Yogyakarta	Gondomanan	0,18
9	Yogyakarta	Wirobrajan	0,18
10	Yogyakarta	Danurejan	0,15

Menurut skala ini maka terdapat 37 (tiga puluh tujuh) kecamatan yakni 9(sembilan) kecamatan di Kabupaten Bantul, 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Sleman dan 14 (empat belas) kecamatan di Kota Yogyakarta yang masuk dalam kategori pencapaian IPM sangat tinggi. IPM kecamatan yang masuk kategori tinggi terdapat 28 kecamatan, berada di Kulonprogo (12), Bantul(8), Gunungkidul(5), dan Sleman(3). Sedangkan selebihnya terdapat 13 kecamatan di Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kecamatan dengan status capaian pembangunan manusianya tergolong sedang. Namun yang patut disyukuri adalah tidak

satupun kecamatan di DIY yang terkategori dalam status pembangunan manusia yang rendah. Kemajuan IPM yang dicapai serta kemampuan kecepatan dalam angka pertumbuhan hingga mencapai titik ideal sesungguhnya sangat tergantung dari komitmen pemerintah daerah sendiri untuk dapat meningkatkan kapasitas dasar penduduk dengan memperlebar pilihan-pilihan mereka yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

4.3.2. Capaian dan Rata-rata Pertumbuhan IPM per Kecamatan

Jika kita melihat dalam dua aspek tinjauan IPM yakni berdasarkan nilai capaian dan angka pertumbuhan IPM pada masing-masing kecamatan di DIY, maka dapat kita simak dalam gambar 4.7. Amatan dapat dipisahkan menjadi empat kwadran yang berbeda.

Kecamatan yang tergabung dalam kwadran pertama yakni Kecamatan Sanden, Bambang Lipuro, Bantul, Jetis, Sewon, Kasihan, Sedayu, Minggir, Depok, dan Turi. Kecamatan-kecamatan ini memiliki IPM dan angka pertumbuhan di atas median (dalam hal ini digunakan angka IPM dan angka pertumbuhan IPM DIY). Kecamatan-kecamatan yang tergabung dalam kelompok ini memiliki nilai IPM tinggi sekaligus memiliki kecepatan akselerasi yang tinggi juga.

Kecamatan yang tergabung dalam kwadran keempat adalah Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Pengasih, Pandak, Imogiri, Pleret, Pajangan, Saptosari, Tanjungsari, Semanu, Wonosari, Playen, Gedangsari, Semin, dan Prambanan. Kecamatan yang tergabung dalam kwadran ini memiliki peringkat capaian IPM tergolong rendah namun angka pertumbuhannya cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan naik peringkatnya Kecamatan Tanjungsari dan Semin tiga strip di Kabupaten Gunungkidul.

Terdapat 24 kecamatan yang tergolong dalam kwadran ketiga, yaitu kecamatan yang memiliki capaian IPM relatif rendah sekaligus akselerasinya juga rendah. Pada kecamatan ini diperlukan intensifikasi program untuk mempercepat laju pembangunan manusianya. Pada kelompok kecamatan ini jika tidak diperhatikan secara serius akan membawa dampak yang serius secara keseluruhan bagi capaian pembangunan manusia sebagai amanah rakyat di DIY.

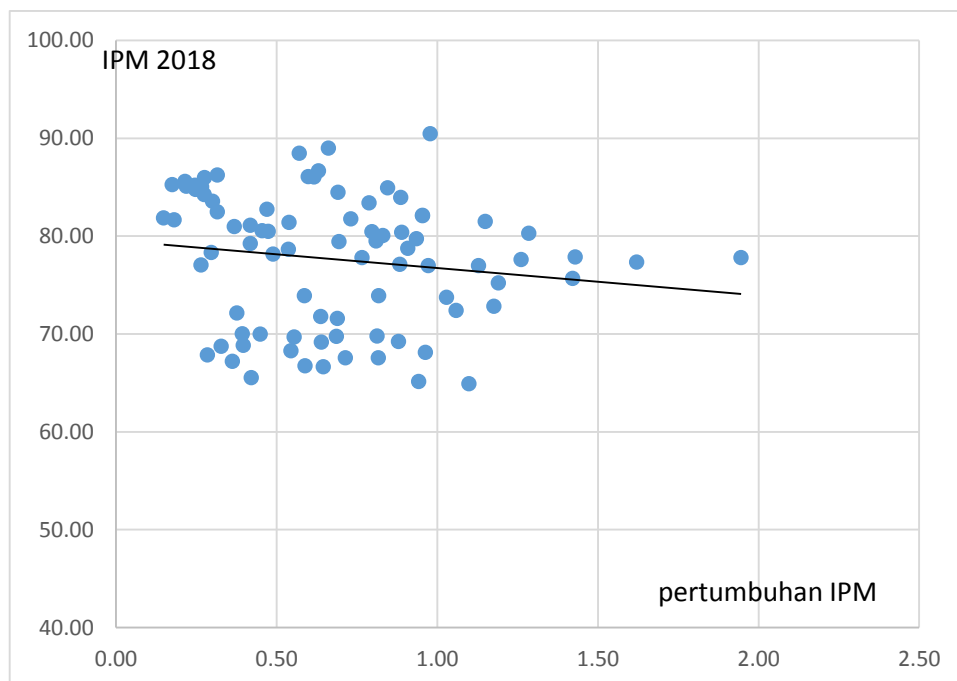
Gambar 4.7.
Kwadran Capaian IPM 2018 dan Angka Pertumbuhan IPM per Tahun

Kwadran II		Capaian IPM 2018	Kwadran I	
Piyungan	Kraton		Sanden	
Banguntapan	Mergangsan		Bambang Lipuro	
Moyudan	Umbulharjo		Bantul	
Godean	Kotagede		Jetis	
Gamping	Gondokusuman		Sewon	
Mlati	Danurejan		Kasihani	
Berbah	Pakualaman		Sedayu	
Kalasan	Gondomanan		Minggir	
Ngemplak	Ngampilan		Depok	
Ngaglik	Wirobrajan		Turi	
Sleman	Gedongtengen			
Pakem	Jetis Y			
Mantrijeron	Tegalrejo			
			Angka pertumbuhan per tahun	
Sentolo	Paliyan		Temon	Saptosari
Kokap	Tepus		Wates	Tanjungsari
Girimulyo	Rongkop		Panjatan	Semanu
Nanggulan	Girisubo		Galur	Wonosari
Kalibawang	Ponjong		Lendah	Playen
Samigaluh	Karangmojo		Pengasih	Gedangsari
Srandakan	Patuk		Pandak	Semin
Kretek	Nglipar		Imogiri	Prambanan
Pundong	Ngawen		Pleret	
Dlingo	Seyegan		Pajangan	
Panggang	Tempel			
Purwosari	Cangkringan			
Kwadran III			Kwadran IV	

Kecamatan yang tergabung dalam kwadran kedua sebanyak 26 kecamatan yaitu di Kabupaten Bantul sebanyak 2 kecamatan, di Kabupaten Sleman terdapat 10 kecamatan, dan di Kota Yogyakarta 14 kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam kwadran ini memiliki capaian IPM tinggi namun mengalami perlambatan dalam akselerasi pembangunan manusianya.

Pola umum yang dapat dilihat dari bahasan ini bahwa semakin tinggi capaian IPM terdapat kecenderungan untuk semakin kecil rata-rata angka pertumbuhannya. Sementara bila capaian IPM masih rendah maka akselerasi pertumbuhan nilai IPM dapat lebih cepat. Dalam bidang kesehatan dikenal tahapan *softrock* dan *hardrock* dalam transisi epidemiologi terutama penurunan angka kematian bayi, yang mendapatkan hasil bahwa penurunan angka kematian bayi akan cepat pada waktu angka kematian bayi masih tinggi tetapi akan melambat dengan semakin kecilnya angka kematian bayi tersebut atau memasuki tahapan *hardrock*. Angka harapan hidup yang merupakan salah satu indikator penyusun IPM berkorelasi kuat negatif dengan angka kematian bayi.

Gambar 4.8.
Kaitan Capaian dan Rata-rata Pertumbuhan IPM per Kecamatan di DIY



4.4. Perkembangan Komponen Penyusun IPM per Kecamatan

4.4.1. Kesehatan

Salah satu kunci pokok dalam pembangunan manusia adalah pembangunan di bidang kesehatan, sehingga derajat dan kualitas kesehatan di masing-masing wilayah dapat terpantau. Salah satu ukuran dalam pembangunan manusia pada indikator kesehatan dilihat dengan meningkatnya usia harapan hidup di masing-masing wilayah. Meningkatnya usia harapan hidup mengindikasikan meningkatnya peran dimensi kesehatan dalam meningkatkan pilihan-pilihan hidup yang tertuang dalam IPM.

Angka harapan hidup pada waktu lahir secara rata-rata di DIY meningkat menjadi 74,82 tahun pada tahun 2018 dari sebelumnya yang mencapai 74,45 tahun di tahun 2013. Angka harapan hidup tertinggi tingkat kecamatan pada tahun 2018 adalah di Kecamatan Pakualaman yakni 78,69 tahun. Angka harapan hidup tertinggi berikutnya terletak pada Kecamatan Ngampilan yakni 78,46 tahun, Kecamatan Depok (77,27 tahun), Kecamatan Ngawen sebesar 77,18; dan Kecamatan Girisubo (76,99 tahun). Kecamatan lain yang memiliki angka harapan hidup masuk dalam 10 terbesar angka harapan hidupnya yaitu Kecamatan Piyungan, Kalasan, Nanggulan, Jetis, dan Mlati.

Tabel 4.6. Angka Harapan Hidup dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di DIY, Tahun 2013-2018

10 Terbesar 2018

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	AHH 2013	AHH 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Yogyakarta	Pakualaman	78,68	78,69
2	Yogyakarta	Ngampilan	78,44	78,46
3	Sleman	Depok	76,65	77,27
4	Gunungkidul	Ngawen	76,49	77,18
5	Gunungkidul	Girisubo	76,30	76,99
6	Bantul	Piyungan	75,95	76,66
7	Sleman	Kalasan	75,94	76,56
8	Kulonprogo	Nanggulan	75,99	76,54
9	Yogyakarta	Jetis	75,76	76,48
10	Sleman	Mlati	75,71	76,32

Lanjutan Tabel 4.6.
10 Terkecil 2018

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	AHH 2013	AHH 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bantul	Jetis	71,75	72,27
2	Kulonprogo	Kokap	71,43	72,03
3	Sleman	Turi	71,50	71,98
4	Gunungkidul	Saptosari	71,09	71,74
5	Sleman	Berbah	70,89	71,38
6	Gunungkidul	Nglipar	70,64	70,76
7	Sleman	Prambanan	69,33	70,46
8	Gunungkidul	Gedangsari	69,07	70,14
9	Sleman	Minggir	69,54	70,01
10	Bantul	Pleret	68,55	69,83

Kecamatan Pleret memiliki besaran angka harapan hidup bagi bayi yang lahir di tahun 2018 paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lain di DIY yaitu mencapai 69,83 tahun. Hampir mirip dengan keadaan di Kecamatan Minggir (70,01) atau Gedangsari (70,14 tahun) atau Prambanan (70,14 tahun). Kecamatan yang juga memiliki angka harapan hidup sekitar 71 tahun pada tahun 2018 yaitu Berbah dan Nglipar. Sedangkan empat kecamatan yang memiliki peringkat angka harapan hidup 10 terendah tetapi angka harapan hidupnya di atas 71 tahun adalah Kecamatan Saptosari (71,74 tahun), Kecamatan Turi (71,98 tahun), Kecamatan Kokap (72,03 tahun) dan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul (72,27 tahun).

Perkembangan angka harapan hidup di setiap kecamatan mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2018, walaupun ada variasi dalam perkembangannya. Hal ini pada prinsipnya menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan pada setiap wilayah kecamatan di DIY menunjukan kinerja yang baik.

4.4.2. Pendidikan

Pembangunan pada dimensi pendidikan saat ini merupakan salah satu prioritas pokok pemerintah yang nampak pada semakin besarnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan alokasi terutama anggaran pendidikan. Indikator pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk melihat bagaimana keberlangsungan pembangunan manusia berproses di DIY. Perkembangan pendidikan ditunjukkan dengan indikator pendidikan yang diukur dengan memantau perkembangan angka harapan lama sekolah di suatu wilayah dan rata-rata lama sekolahnya.

Angka Harapan Lama Sekolah

Disparitas pembangunan manusia di bidang pendidikan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (EMS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (MYS). Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu indikator proses dalam bidang pendidikan. Sementara itu, rata-rata lama sekolah merupakan indikator output dari sebuah proses pendidikan. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Semua kecamatan di DIY mengalami kenaikan persentase angka rata-rata harapan lama sekolah dari tahun 2013 ke tahun 2018. Angka harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini bisa merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Secara berurutan kecamatan yang memiliki angka rata-rata harapan lama sekolah paling tinggi adalah Kecamatan Depok dan Gondokusuman yakni 18 tahun atau lulusan S2/S3. Berikutnya adalah penduduk di Kecamatan Mlati dengan harapan sekolah sebesar 17,77 tahun dan Kecamatan Ngemplak dengan rata-rata sebesar 17,30 tahun. Urutan ke lima dari harapan lama sekolah adalah di Kecamatan Mantrijeron (16,95 tahun), disusul Kecamatan Kraton (16,84 tahun), baru kemudian di urutan ke tujuh Kecamatan Umbulharjo (16,79 persen).

Rata-rata harapan lama sekolah yang relatif kecil ditunjukkan dengan peringkat 10 terkecil di DIY terdapat di Kabupaten Gunungkidul 9 wilayah dan di Kabupaten Kulonprogo ada 1 wilayah yaitu Saptosari, Paliyan, Tanjungsari, Girisubo, Purwosari, Panggang, Gedangsari, Semanu, Tepus, dan Samigaluh. Kecamatan Saptosari menduduki urutan ke 10 terkecil dengan rata-rata harapan lama sekolah sebesar 12,69 tahun. Kecamatan Paliyan (12,67 tahun) urutan berikutnya dan disusul Kecamatan Samigaluh (12,65 tahun). Sementara tiga kecamatan dengan rata-rata harapan lama sekolah terendah masing-masing adalah Kecamatan Gedangsari (12,15 tahun), Kecamatan Semanu (12,10 tahun), dan Kecamatan Tepus (11,36 persen). Dengan demikian rata-rata harapan lama sekolah penduduk di wilayah-wilayah ini setara dengan tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Tabel 4.7. Angka Harapan Lama Sekolah dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di DIY, Tahun 2013-2018

10 Terbesar 2018

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	EMS 2013	EMS 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sleman	Depok	18,00	18,00
2	Yogyakarta	Gondokusuman	17,96	18,00
3	Sleman	Mlati	17,73	17,77
4	Sleman	Ngemplak	17,27	17,30
5	Yogyakarta	Mantrijeron	16,37	16,95
6	Yogyakarta	Kraton	16,25	16,84
7	Yogyakarta	Umbulharjo	16,75	16,79
8	Bantul	Banguntapan	16,54	16,78
9	Sleman	Kalasan	15,49	16,70
10	Sleman	Ngaglik	16,59	16,62

10 Terkecil 2018

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	EMS 2013	EMS 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gunungkidul	Saptosari	11,29	12,69
2	Gunungkidul	Paliyan	12,46	12,67
3	Kulonprogo	Samigaluh	12,30	12,65
4	Gunungkidul	Tanjungsari	12,07	12,49
5	Gunungkidul	Girisubo	12,27	12,48
6	Gunungkidul	Purwosari	12,23	12,44
7	Gunungkidul	Panggang	12,00	12,20
8	Gunungkidul	Gedangsari	11,95	12,15
9	Gunungkidul	Semanu	11,90	12,10
10	Gunungkidul	Tepus	11,18	11,36

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas juga merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY dimana perkembangannya diharapkan merepresentasikan bergeraknya kualitas sumberdaya manusia. Rata-rata lama sekolah di DIY tahun 2018 sebesar 9,32 tahun lebih tinggi dari tahun 2013 yang sebesar 8,72 tahun, atau sekitar lulus SLTP.

Tabel 4.8. Rata-rata Lama Sekolah dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di DIY, Tahun 2013-2018

10 Terbesar 2018

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	MYS 2013	MYS 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sleman	Depok	12.38	12.38
2	Yogyakarta	Gondokusuman	12.13	12.13
3	Yogyakarta	Kraton	12.12	12.12
4	Yogyakarta	Umbulharjo	11.70	11.84
5	Yogyakarta	Mantrijeron	11.77	11.77
6	Yogyakarta	Ngampilan	11.08	11.72
7	Yogyakarta	Pakualaman	11.71	11.71
8	Yogyakarta	Mergangsan	11.70	11.70
9	Sleman	Ngaglik	11.63	11.63
10	Yogyakarta	Tegalrejo	11.03	11.56

10 Terkecil 2018

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	MYS 2013	MYS 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gunungkidul	Semanu	7,14	7,20
2	Gunungkidul	Purwosari	6,76	7,14
3	Gunungkidul	Gedangsari	5.96	6.74
4	Gunungkidul	Rongkop	5.84	6.58
5	Gunungkidul	Tanjungsari	4.98	6.34
6	Gunungkidul	Ngawen	6.28	6.28
7	Gunungkidul	Tepus	5.24	6.05
8	Gunungkidul	Girisubo	5.77	5.87
9	Gunungkidul	Panggang	5.54	5.85
10	Gunungkidul	Saptosari	5.67	5.67

Untuk kecamatan dengan rangking tertinggi berdasarkan angka rata-rata lama sekolahnya adalah Kecamatan Depok, Gondokusuman, dan Kraton masing-masing secara berurutan sebesar 12,38; 12,13; dan 12,12 tahun atau rata-rata penduduknya berpendidikan lulusan SLTA. Berikutnya adalah Kecamatan Umbulharjo dengan rata-rata lama sekolah sekitar 11,84 tahun atau setara kelas tiga SLTA. Kecamatan lain yang masuk 10 tertinggi nilai angka rata-rata lama sekolah adalah Kecamatan Mantrijeron (11,77 tahun), Ngampilan (11,72

tahun), Pakualaman (11,71 tahun), Mergangsan (11,70 tahun), Ngaglik (11,63 tahun), dan Tegalrejo (11,56 tahun). Ke-10 kecamatan tersebut memiliki rata-rata lama sekolah setara lulusan SLTA, jauh di atas rata-rata lama sekolah di DIY yang masih setara tamat SLTP atau 9,32 tahun.

Kecamatan yang memiliki rata-rata penduduk setara tamat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2018 antara lain Kecamatan Tanjungsari (6,34 tahun), Ngawen (6,28 tahun), Tepus (6,05 tahun), Girisubo (5,87 tahun), Panggang (5,85 tahun), dan Saptosari (5,67 tahun). Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki rata-rata lama sekolah terendah di DIY yakni rata-rata penduduknya “hanya” berpendidikan tamat Sekolah Dasar atau dengan rata-rata lama sekolah sekitar 6 tahun.

Selama kurun waktu lima tahun, upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah DIY membawa peningkatan rata-rata lama sekolah 0,6 poin saja. Hal ini menunjukkan bahwa memang upaya meningkatkan kualitas pendidikan bukanlah pekerjaan yang mudah yang semudah membalik telapak tangan. Jika dikaitkan dengan target SDG’S bahwa batas minimal yang diusulkan oleh UNDP tahun 2030 bahwa seluruh penduduk adalah minimal sudah tamat sekolah menengah, maka untuk mencapai keadaan pendidikan tersebut di DIY membutuhkan komitmen dan kesadaran yang tinggi baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Perlu terobosan luar biasa dan pengawalan yang ketat untuk menjamin suksesnya pembangunan manusia terutama dimensi pendidikan di DIY. Selain itu diperlukan sosialisasi yang intensif pada masyarakat untuk menekankan pentingnya bersekolah demi menyadari bahwa pembangunan pendidikan akan menjamin terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam jangka yang panjang.

Angka rata-rata harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah jika digabungkan sesuai dengan standar UNDP, maka kita akan mendapatkan indeks pendidikan. Indeks ini menggambarkan kualitas pendidikan dan posisi kinerja pembangunan manusia di bidang pendidikan masing-masing kecamatan dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Peringkat pertama dalam indeks pendidikan tahun 2018 adalah Kecamatan Depok (91,27). Peringkat selanjutnya yaitu Kecamatan Gondokusuman (90,44), Kraton (87,17), Mantrijeron (86,34), Umbulharjo (86,11), dan Mlati (86,00). Keenam kecamatan tersebut memiliki indeks pendidikan di atas angka indeks sebesar 85. Sementara kecamatan yang memiliki skor indeks pendidikan dalam rangking 10 terbawah berdasarkan indeks pendidikan, masih terdapat kecamatan memiliki skor kurang dari 55. Terdapat 6 kecamatan yang berada pada kelompok indeks pendidikan tersebut di DIY yaitu Kecamatan Tepus (51,05), Panggang

(52,32 persen), Saptosari (52,61), Girisubo (53,55), Tanjungsari (54,86), dan Gedangsari (54,87).

Tabel 4.9. Indeks Pendidikan dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di DIY, Tahun 2013-2018

10 Terbesar 2018

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	Indeks didik 2013	Indeks didik 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sleman	Depok	91,27	91,27
2	Yogyakarta	Gondokusuman	90,34	90,44
3	Yogyakarta	Kraton	85,55	87,17
4	Yogyakarta	Mantrijeron	84,71	86,34
5	Yogyakarta	Umbulharjo	85,53	86,11
6	Sleman	Mlati	85,91	86,00
7	Sleman	Ngaglik	84,83	84,91
8	Yogyakarta	Mergangsan	84,31	84,40
9	Sleman	Ngemplak	83,98	84,06
10	Sleman	Kalasan	78,50	83,52

10 Terkecil 2018

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	Indeks didik 2013	Indeks didik 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gunungkidul	Rongkop	56,54	57,13
2	Gunungkidul	Ngawen	55,64	56,59
3	Gunungkidul	Purwosari	53,46	56,47
4	Gunungkidul	Semanu	52,91	56,08
5	Gunungkidul	Gedangsari	49,81	54,87
6	Gunungkidul	Tanjungsari	51,01	54,86
7	Gunungkidul	Girisubo	52,98	53,55
8	Gunungkidul	Saptosari	46,29	52,61
9	Gunungkidul	Panggang	51,77	52,32
10	Gunungkidul	Tepus	49,52	51,05

4.4.3. Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan

Indikator ekonomi dalam Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan bagaimana pilihan-pilihan dalam membangun sumber daya manusia dapat dipilih oleh rumah tangga. Dengan gambaran keadaan ekonomi pada indikator ekonomi dengan pendekatan

standar hidup layak atau mengukur bagaimana daya beli penduduk, maka konstelasi ekonomi dalam pembangunan manusia dapat diintegrasikan dengan pendekatan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan ukuran makro ekonomi.

Untuk mengukur standar hidup layak, data dasar PDRB per kapita belum cukup mewakili informasi yang diperlukan. Oleh karena itu pada perhitungan IPM ini digunakan ukuran konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat. Nilai tingkat daya beli menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk. Semakin besar nilai indeks daya beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik.

Pendekatan indikator ekonomi dengan melihat kemampuan daya beli atau standar hidup layak sangat dipengaruhi oleh harga riil yang terjadi antar wilayah. Dengan melakukan standarisasi sedemikian rupa, maka kemampuan daya beli di suatu wilayah kecamatan di DIY menjadi dapat diperbandingkan dan diikuti perkembangannya.

Pada tahun 2018, indeks daya beli penduduk atau konsumsi riil per kapita (PPP) penduduk DIY mencapai Rp. 13,95 juta rupiah setahun, lebih tinggi bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2013 yang sebesar Rp. 12,26 juta rupiah. Hal ini memberi gambaran bahwa terjadi peningkatan daya beli masyarakat DIY pada 5 tahun terakhir. Bila PPP dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Gondokusuman nilai PPP-nya tertinggi dibanding dengan kecamatan lain di DIY yaitu mencapai 21,26 juta rupiah pada tahun 2018. Kecamatan dengan nilai PPP yang juga cukup besar yaitu Kecamatan Pakualaman, Depok, dan Gedongtengen. Hal ini tampak wajar karena keempat wilayah ini merupakan pusat perekonomian di wilayah ini. Sementara Kecamatan Tepus dan Ngawen memiliki PPP paling rendah dibandingkan kecamatan lain di DIY pada tahun 2018 yaitu sebesar 8,54 juta rupiah.

Sebagai indeks ekonomi, kita dapat melihat capaian pembangunan ekonomi menuju posisi yang ideal pada kemampuan daya beli penduduknya. Perbandingan indeks standar hidup layak/kemampuan daya beli/PPP dari tahun 2010 ke 2013 menunjukan bahwa perkembangan ekonomi di DIY dan di seluruh wilayah kecamatannya mengalami kenaikan. Secara umum dapat dirasakan adanya dampak, baik langsung maupun tidak langsung dari proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perbaikan ekonomi penduduknya.

Tabel 4.10. Purchasing Power Parity (PPP) dengan Urutan 10 Terbesar dan Terkecil di DIY, Tahun 2013-2018 (dalam ribuan rupiah)

10 Terbesar 2018

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	PPP 2013	PPP 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Yogyakarta	Gondokusuman	16.671	21.259
2	Yogyakarta	Pakualaman	16.636	21.215
3	Sleman	Depok	14.112	20.506
4	Yogyakarta	Gedong Tengen	16.619	18.600
5	Yogyakarta	Mergangsan	16.631	18.254
6	Bantul	Kasihan	13.917	18.244
7	Bantul	Bantul	13.902	18.224
8	Yogyakarta	Jetis	13.884	18.202
9	Sleman	Ngaglik	14.113	17.642
10	Yogyakarta	Umbulharjo	16.662	17.627

10 Terkecil 2018

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	PPP 2013	PPP 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gunungkidul	Paliyan	8.210	8.559
2	Gunungkidul	Karangmojo	8.205	8.554
3	Gunungkidul	Purwosari	8.205	8.554
4	Gunungkidul	Gedangsari	8.203	8.551
5	Gunungkidul	Nglipar	8.199	8.548
6	Gunungkidul	Ponjong	8.199	8.548
7	Gunungkidul	Saptosari	8.198	8.547
8	Gunungkidul	Rongkop	8.198	8.547
9	Gunungkidul	Ngawen	8.190	8.538
10	Gunungkidul	Tepus	8.188	8.536

Namun ke depan perlu lebih diperhatikan bagaimana kecepatan perubahan dari proses pembangunan menyeluruh yang dilakukan pemerintah dengan dampaknya pada pembangunan manusia. Kecamatan Nglipar yang merupakan kecamatan masuk dalam kelompok peringkat 10 terendah dalam kemampuan daya beli penduduknya namun memiliki kenaikan yang cukup besar dari tahun 2010 ke tahun 2013. Hal mengindikasikan bahwa adanya upaya untuk segera “melesat” dari lemahnya posisi tawar ekonomi dalam Indeks Pembangunan

Manusia. Demikian juga Kecamatan Pundong, Bambanglipuro, Kretek, Pleret dan Dlingo, upayanya untuk menuju posisi ideal dengan mengurangi “gap”nya dalam sisi ekonomi nampak lebih signifikan dengan ditunjukkan dengan perubahan indeks PPP yang terbesar dibandingkan kecamatan lain di DIY.

Secara umum indeks ekonomi (indeks standar hidup layak) di masing-masing kecamatan mengalami kenaikan, yang berarti pilihan yang dimiliki oleh penduduk di masing-masing kecamatan lebih baik/lebih banyak dari periode sebelumnya. Oleh karena prinsip dari pembangunan manusia adalah memperbesar kesempatan dan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh penduduk.

BAB V. ANALISIS IPM PER KECAMATAN

5.1. Perkembangan dan Variasi IPM

Pengukuran variasi indeks pembangunan manusia per kecamatan di DIY dilaksanakan menggunakan ukuran yang terdiri dari rata-rata atau *means*, *skewness*, *kurtosis*. Angka rata-rata menunjukkan rata-rata capaian IPM per kecamatan di DIY. *Skewness* sebagai ukuran kemiringan yaitu suatu bilangan yang dapat menunjukkan miring atau tidaknya bentuk kurva suatu distribusi frekuensi data yang kita miliki. Jika kurva suatu distribusi data memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan (dilihat dari rata-ratanya) maka dikatakan menceng kanan (positif) dan jika sebaliknya maka menceng kiri (negatif). Sementara Kurtosis adalah derajat keruncingan suatu distribusi (biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal). Kurva yang lebih runcing dari distribusi normal dinamakan leptokurtik, yang lebih datar platikurtik, sedangkan distribusi normal disebut mesokurtik. Agar lebih proporsional terhadap rata-ratanya, perhitungan variasi pada bab ini menggunakan *coefficient of variation* (CV). Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata suatu data dan dinyatakan dalam persen.

Tabel 5.1 Statistik Indeks Pembangunan Manusia per Kecamatan di DIY

Statistik	2013					2018				
	AHH	EMS	MYS	PPP	IPM	AHH	EMS	MYS	PPP	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mean	73,60	14,18	8,79	12274,83	75,04	74,21	14,66	9,29	13722,27	77,54
Skewness	-0,12	0,43	-0,14	-0,20	-0,10	-0,15	0,16	-0,40	-0,13	-0,26
Kurtosis	0,44	-0,51	-0,93	-1,60	-1,18	0,02	-0,76	-0,95	-1,27	-1,05
CV	2,65	11,50	23,03	26,88	9,17	2,52	10,69	20,74	27,89	8,71

Dari Tabel 5.1, diperoleh informasi bahwa indikator AHH, EMS, dan IPM mengalami penurunan variasi nilai dari tahun 2013 ke tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan oleh CV yang lebih kecil pada tahun 2018 dibandingkan kondisi tahun 2013. Di sisi, lain pada periode yang sama indikator PPP mengalami kenaikan variasi karena nilai CV-nya meningkat. Di antara kelima variabel yang dianalisis, variasi terbesar pada tahun 2013 maupun 2018 terjadi pada PPP dan terkecil pada AHH. Hal ini ditunjukkan oleh nilai CV PPP yang mencapai 27,89 persen pada tahun 2018, sedangkan, nilai CV dari AHH sebesar 2,52 persen pada tahun 2018.

Berdasarkan ukuran *skewness* yang bernilai negatif atau menjulur ke kiri, mayoritas kecamatan di DIY memiliki nilai AHH, MYS, PPP, dan IPM lebih tinggi dari nilai tengahnya. Nilai *skewness* positif hanya terjadi pada variabel EMS yang menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan di DIY memiliki rata-rata harapan lama sekolah yang lebih rendah daripada nilai tengah atau dalam hal ini rata-ratanya.

Dari nilai kurtosis dapat diperhatikan bahwa pada seluruh variabel nilainya kurang dari 3 (tiga), artinya distribusi nilai AHH, EMS, MYS, PPP, dan IPM relatif menyebar atau tidak terpusat pada nilai tertentu. Tidak semua AHH, EMS, MYS, PPP, dan IPM kecamatan mempunyai rata-rata yang sama di setiap kabupaten/kota ditunjukkan oleh nilai CV yang lebih besar dari 0 di semua variabel. Artinya, terdapat variasi pada AHH, EMS, MYS, PPP, dan IPM di tingkat kecamatan di DIY.

Secara umum, IPM per kecamatan di DIY mengalami penurunan variasi. Jika dilihat masing-masing komponen penyusunnya, maka hanya PPP yang mengalami peningkatan tingkat variasi, sedangkan AHH, EMS, dan MYS mengalami penurunan variasi atau ketimpangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variasi IPM per kecamatan di DIY semakin mengecil pada periode 2013-2018.

Bagian ini juga akan menjelaskan perkembangan IPM per kecamatan di setiap kabupaten/kota di DIY. Analisis yang digunakan berupa uji t yang mampu menentukan apakah secara statistik terdapat perbedaan pada dua rata-rata pada periode yang berbeda. Untuk selanjutnya, tanda bintang pada tabel menunjukkan derajat signifikansi. Tanda * berarti signifikan pada tingkat keyakinan 90 persen, ** berarti signifikan pada tingkat keyakinan 95 persen, dan *** berarti signifikan pada tingkat keyakinan 99 persen.

Tabel 5.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di DIY

Indeks	Rata-rata		CV 2018	% Perubahan	t-test
	2013	2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AHH (Tahun)	73,60	74,21	2,52	,84	16,97***
EMS (Tahun)	14,18	14,66	10,69	3,41	7,93***
MYS(Tahun)	8,79	9,29	20,74	5,63	8,21***
PPP (Rp 000)	12274,83	13722,27	27,89	11,79	8,84***
IPM	75,04	77,54	8,71	3,33	16,72***

Berdasar pada Tabel 5.2 bahwa uji t pada seluruh variabel signifikan pada tingkat signifikansi 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan rata-rata

IPM per kecamatan dan indikator penyusunnya di DIY secara signifikan pada tahun 2013 dan 2018.

Tabel 5.3. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kulonprogo

Indeks	Rata-rata		CV 2018	% Perubahan	t-test
	2013	2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AHH (Tahun)	74,33	74,95	1,80	,83	13,98***
EMS (Tahun)	13,00	13,89	4,95	6,82	7,37***
MYS(Tahun)	8,02	8,60	10,53	7,24	4,03***
PPP (Rp 000)	8467,99	9698,00	16,40	14,53	2,69**
IPM	69,89	73,12	4,01	4,61	7,18***

Bila kita melakukan pengujian statistik yang dibedakan pada tingkat kabupaten/kota maka hasilnya dapat diperhatikan seperti berikut ini. Hasil uji-t pada Tabel 5.3. menunjukkan bahwa seluruh indikator IPM yang ada di Kabupaten Kulonprogo mengalami kenaikan yang signifikan (semua indikator kecuali PPP signifikan pada taraf 1 persen). Nilai PPP mengalami kenaikan dengan taraf keyakinan 5 persen. Berdasarkan perubahan nilai indikator, peningkatan tertinggi terjadi pada indikator PPP yang meningkat 14,53 persen dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Sedangkan peningkatan terendah terjadi pada indikator AHH (0,83 persen) yang meningkat dari 74,33 tahun menjadi 74,95 tahun.

Tabel 5.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bantul

Indeks	Rata-rata		CV 2018	% Perubahan	t-test
	2013	2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AHH (Tahun)	73,12	73,88	2,19	1,03	7,40***
EMS (Tahun)	14,35	15,06	7,11	4,92	4,55***
MYS(Tahun)	8,72	9,50	11,93	8,92	5,23***
PPP (Rp 000)	13891,79	15701,38	10,67	13,03	4,47***
IPM	76,63	79,84	3,55	4,18	12,54***

Dari perubahan indeks dan uji t pada Tabel 5.4, dapat dilihat bahwa IPM per kecamatan di Kabupaten Bantul beserta komponen-komponennya mengalami peningkatan yang signifikan pada periode 2013-2018. Secara persentase, peningkatan terbesar terjadi pada PPP yang rata-rata nya meningkat dari 13,9 juta menjadi 15,7 juta (13,03 persen), sedangkan variabel AHH mengalami peningkatan terendah (1,03 persen).

Tabel 5.5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gunungkidul

Indeks	Rata-rata		CV 2018	% Perubahan	t-test
	2013	2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AHH (Tahun)	73,06	73,74	2,72	,93	8,87***
EMS (Tahun)	12,49	12,79	4,84	2,42	4,47***
MYS(Tahun)	6,22	6,72	15,93	8,11	4,85***
PPP (Rp 000)	8198,96	9163,00	12,27	11,76	3,64***
IPM	66,12	68,51	4,35	3,62	7,30***

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa semua indikator IPM per kecamatan di Kabupaten Gunungkidul beserta komponennya mengalami kenaikan yang signifikan dalam periode 2013-2018. Hal tersebut ditunjukkan oleh perubahan rata-rata yang positif dan hasil uji t yang signifikan pada 1 persen. AHH mengalami peningkatan terendah (0,93 persen) dari 73,06 tahun menjadi 73,74 tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada PPP (11,76 persen) dari 8,2 juta menjadi 9,2 juta rupiah.

Tabel 5.6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sleman

Indeks	Rata-rata		CV 2018	% Perubahan	t-test
	2013	2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AHH (Tahun)	73,38	73,96	2,85	,80	10,24***
EMS (Tahun)	15,32	15,78	7,80	2,98	2,89**
MYS(Tahun)	10,03	10,48	10,02	4,46	3,07***
PPP (Rp 000)	14069,88	15844,00	9,15	12,61	5,10***
IPM	79,45	81,88	4,37	3,05	10,33***

Tabel 5.6 menunjukkan perkembangan IPM kecamatan di Kabupaten Sleman pada tahun 2013-2018. Terlihat bahwa perubahan rata-rata IPM kecamatan dan komponen pendukungnya di Kabupaten Sleman pada tahun 2013-2018 signifikan pada 1 persen secara keseluruhan kecuali rata-rata harapan lama sekolah (EMS). Rata-rata IPM kecamatan di Kabupaten Sleman meningkat signifikan dengan peningkatan terbesar pada PPP (12,61 Persen), sedangkan AHH memiliki peningkatan yang terendah dibanding variabel lainnya (0,80 persen).

Demikian pula untuk kondisi di Kota Yogyakarta, nilai yang mengalami kenaikan secara signifikan pada taraf keyakinan 1 persen semakin berkurang. Tabel 5.7 menunjukkan bahwa semua variabel IPM kecamatan di Kota Yogyakarta beserta komponennya mengalami kenaikan yang signifikan dengan taraf keyakinan 1 persen dalam periode 2013-2018 kecuali EMS dan MYS. Peningkatan rata-rata pada indikator EMS dan MYS signifikan secara statistik pada taraf keyakinan 5 persen.

Tabel 5.7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta

Indeks	Rata-rata		CV 2018	% Perubahan	t-test
	2013	2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AHH (Tahun)	74,50	74,90	2,54	,54	5,16***
EMS (Tahun)	15,75	15,89	7,82	,84	2,39**
MYS(Tahun)	11,36	11,48	4,11	1,09	2,23**
PPP (Rp 000)	16635,07	18053,96	7,81	8,53	3,78***
IPM	83,63	84,88	2,73	1,50	7,33***

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan yang signifikan pada nilai IPM per kecamatan dan semua komponen pendukungnya, baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota pada taraf keyakinan 1 persen, kecuali PPP di Kabupaten Kulonprogo, EMS di Kabupaten Sleman, serta EMS dan MYS di Kota Yogyakarta yang signifikan kenaikannya hanya pada taraf 5 persen.

5.1.1. Kabupaten Kulonprogo

Pada tahun 2018, IPM tertinggi di Kabupaten Kulonprogo dicapai oleh Kecamatan Wates dengan nilai indeks sebesar 77,89 yang mengalami peningkatan 5,2 poin atau rata-rata 1,43 persen per tahun dari tahun 2013. Sementara IPM Kecamatan Kokap merupakan yang terendah di kabupaten ini dengan nilai 69,15 tahun 2018 dengan peningkatan rata-rata selama 2013-2018 sebesar 0,64 persen per tahun. AHH Kecamatan Kokap adalah yang terendah di Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 72,03 tahun. Kecamatan Wates dan Nanggulan mencapai AHH tertinggi di tahun 2018 dengan nilai masing-masing secara berurutan sebesar 76,23 dan 76,54 tahun. Kondisi capaian komponen IPM tertinggi dan terendah di Kabupaten Kulonprogo disajikan sebagai berikut dalam Tabel 5.8.

Tabel 5.8. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018

Indikator	Tertinggi		Terendah	
	Kecamatan	Nilai	Kecamatan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IPM	Wates	77,89	Kokap	69,18
AHH (tahun)	Nanggulan	76,54	Kokap	72,03
EMS (tahun)	Pengasih	14,99	Samigaluh	12,65
MYS (tahun)	Panjatan	9,94	Girimulyo	7,28
PPP (Rp000)	Wates	12.862	Kokap	8.606

Pada tahun 2018, IPM tertinggi dicapai oleh Kecamatan Wates dengan nilai 77,89. Kecamatan Wates memiliki indeks tertinggi disebabkan terutama pada nilai PPP yang mencapai tertinggi dengan nilai 12,86 juta per tahun.

Tabel 5.9. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013

Indikator	Tertinggi		Terendah	
	Kecamatan	Nilai	Kecamatan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IPM	Wates	72,69	Kokap	67,03
AHH (tahun)	Nanggulan	75,99	Kokap	71,43
EMS (tahun)	Galur	13,88	Girimulyo	12,19
MYS (tahun)	Wates	9,50	Lendah	7,12
PPP (Rp000)	Lendah	8.478	Samigaluh	8.458

IPM Kecamatan Kokap konsisten merupakan yang terendah di Kabupaten Kulonprogo dengan nilai 69,18 tahun 2018 dan 67,03 pada tahun 2013. AHH dan PPP Kecamatan Kokap tahun 2018 adalah yang terendah di Kabupaten Kulonprogo yaitu AHH sebesar 72,03 tahun, sedangkan PPP sebesar 8,6 juta rupiah. Untuk indikator pendidikan, dilihat angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tertinggi dicapai oleh Kecamatan Pengasih dan Panjatan dan terendah secara berturut-turut oleh Kecamatan Samigaluh dan Girimulyo (Tabel 5.8).

Tabel 5.10 menunjukkan statistik deskriptif IPM Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kulonprogo. Melalui analisis CV dapat dilihat sebaran data dari seluruh ukuran yang dianalisis (nilai CV yang lebih dari 0). Sebaran data terbesar tahun 2018 yang mengindikasikan ketimpangan terlebar terdapat pada nilai PPP (16,40 persen) dan MYM (10,53 persen) sedangkan sebaran data terkecil terdapat pada variabel AHH (1,80 persen). Dari perubahan CV pada periode tahun 2013 ke tahun 2018, terlihat bahwa seluruh variabel

mengalami mengalami kenaikan ketimpangan antar kecamatan yang ditunjukkan oleh meningkatnya nilai CV. Hanya AHH yang mengalami penurunan variasi yaitu dari 1,92 persen ke 1,80 persen.

Tabel 5.10. Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kulonprogo

Statistik	2013					2018				
	AHH	EMS	MYS	PPP	IPM	AHH	EMS	MYS	PPP	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mean	74,33	13,00	8,02	8467,99	69,89	74,95	13,89	8,60	9698,00	73,12
Skewness	-1,28	0,03	0,78	0,37	-0,14	-1,26	0,14	0,11	1,51	0,32
Kurtosis	1,02	-0,58	0,14	-0,11	-0,75	1,16	-0,24	-1,39	1,10	-1,07
CV	1,92	4,00	9,20	0,07	2,40	1,80	4,95	10,53	16,40	4,01

Angka *skewness* di Kabupaten Kulonprogo menunjukkan bahwa nilai IPM beserta mayoritas komponen penyusunnya memiliki sebaran data yang lebih banyak pada posisi lebih kecil dari nilai tengahnya karena skewness-nya positif kecuali untuk AHH. Hal yang cukup menarik adalah variabel PPP yang skewness-nya bergeser cukup besar dari 0,37 pada tahun 2013 ke 1,51 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kecamatan di Kabupaten Kulonprogo belum mampu menggeser pembangunan manusia dari sebelumnya yang lebih rendah dari nilai tengah. Hanya saja hal ini tampaknya lebih dipengaruhi oleh adanya beberapa kecamatan tertentu yang nilai PPP-nya besar.

Semua indikator mempunyai nilai kurtosis kurang dari 3 (bersifat platikurtik). Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan ketimpangan pada seluruh indikator penyusun IPM kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kulonprogo.

5.1.2. Kabupaten Bantul

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 5.11, IPM Kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2018 berkisar antara 73,93 hingga 84,96. IPM tertinggi pada tahun tersebut berada di Kecamatan Kasihan sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Dlingo.

Pada indikator kesehatan, AHH kecamatan tertinggi di Kabupaten Bantul tercatat di Kecamatan Piyungan (76,66 tahun), sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Pleret (69,83 tahun). Di bidang pendidikan yang indikatornya terdiri atas EMS dan MYS, Kecamatan Banguntapan mencapai nilai tertinggi pada keduanya yaitu berturut-turut 16,78 dan 11,03 tahun. Untuk pencapaian EMS dan MYS terendah di Kecamatan Dlingo (dengan EMS sebesar 12,73 tahun) dan Imogiri (dengan MYS sebesar 7,07 tahun). PPP tertinggi di

Kabupaten Bantul tahun 2018 berada di Kecamatan Banguntapan dengan nilai sekitar Rp 18,2 juta rupiah dan terendah di Kecamatan Dlingo sebesar Rp 13,9 juta rupiah.

Tabel 5.11. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2018

Indikator	Tertinggi		Terendah	
	Kecamatan	Nilai	Kecamatan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IPM	Kasihan	84,96	Dlingo	73,93
AHH (tahun)	Piyungan	76,66	Pleret	69,83
EMS (tahun)	Banguntapan	16,78	Dlingo	12,73
MYS (tahun)	Banguntapan	11,03	Imogiri	7,07
PPP (Rp000)	Banguntapan	18.244	Dlingo	13.918

Bila data IPM per kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2018 dibandingkan dengan data tahun 2013 yang terdapat pada Tabel 5.12, terlihat bahwa IPM tertinggi dan terendah masih sama yaitu yang tertinggi di Kecamatan Kasihan dan Dlingo. Hanya saja kalau kita lihat per indikator penyusun IPM tampak bahwa AHH tertinggi di Kecamatan Piyungan, sedangkan indikator yang lain angka tertinggi terdapat di Kecamatan Banguntapan. Untuk nilai terendah sebagian besar terdapat di Dlingo, hanya untuk indikator AHH yang menunjukkan bahwa yang terendah ada di Pleret.

Tabel 5.12. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2013

Indikator	Tertinggi		Terendah	
	Kecamatan	Nilai	Kecamatan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IPM	Kasihan	81,51	Dlingo	71,82
AHH (tahun)	Piyungan	75,35	Pleret	68,55
EMS (tahun)	Banguntapan	16,54	Dlingo	11,99
MYS (tahun)	Banguntapan	11,03	Dlingo	6,40
PPP (Rp000)	Banguntapan	13.920	Dlingo	13.872

Kecamatan Banguntapan mencatatkan pencapaian tertinggi pada indikator pendidikan dan pendapatan di Kabupaten Bantul tahun 2013 dan bertahan sampai 2018 dengan nilai EMS dan MYS secara berturut-turut sebesar 16,54 dan 11,03 tahun. Kecamatan Banguntapan juga tertinggi dalam indikator pendapatan di Kabupaten Bantul tahun 2013 dengan PPP sebesar 13,92 juta rupiah. Di sisi lain, Kecamatan Dlingo menjadi kecamatan yang tertinggal di Kabupaten Bantul tahun 2013 dalam hal EMS, MYS, dan PPP dengan nilai 11,99 tahun, 6,40 tahun, dan Rp 13,87 juta berturut-turut.

Analisis ketimpangan IPM per kecamatan di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel 5.13. Terdapat penurunan ketimpangan IPM beserta komponennya di Kabupaten Bantul jika dilihat dari nilai CV yang menurun, kecuali pada indikator PPP. Ketimpangan terbesar dialami pada komponen MYS yang nilai CV-nya sebesar 11,93 persen sedangkan ketimpangan terendah terjadi pada variabel AHH yang nilai CV-nya 2,19 persen. Dari tahun 2013 sampai tahun 2018 terjadi penurunan ketimpangan IPM secara keseluruhan di kecamatan di Kabupaten Bantul dengan CV turun dari 3,77 menjadi 3,55 persen.

Tabel 5.13 Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bantul

Statistik	2013					2018				
	AHH	EMS	MYS	PPP	IPM	AHH	EMS	MYS	PPP	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mean	73,12	14,35	8,72	13891,79	76,63	73,88	15,06	9,50	15701,38	79,84
Skewness	-0,70	0,20	0,02	0,50	0,13	-0,52	-0,20	-0,99	0,40	-0,07
Kurtosis	2,35	0,45	-0,20	-0,98	-0,75	1,38	-0,04	0,87	-1,37	-0,17
CV	2,35	8,02	13,92	0,12	3,77	2,19	7,11	11,93	10,67	3,55

Pada tahun 2018 hampir seluruh indikator memiliki nilai skewness yang negatif (kecuali indikator PPP), sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas kecamatan di Kabupaten Bantul memiliki nilai IPM beserta komponen-komponen penyusun yang lebih tinggi daripada nilai tengahnya. Lebih lanjut, dari nilai kurtosis seluruh variabel yang kurang dari 3 menunjukkan distribusi nilai variabel yang menyebar sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat kecenderungan ketimpangan IPM beserta komponennya antar kecamatan di Kabupaten Bantul.

5.1.3. Kabupaten Gunungkidul

Tabel 5.14 menunjukkan capaian IPM tertinggi dan terendah tingkat kecamatan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2018. IPM kecamatan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun

tersebut berkisar antara 64,92 sampai 77,82. Kecamatan Wonosari mencapai IPM tertinggi dan yang terendah adalah Kecamatan Saptosari.

Tabel 5.14. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

Indikator	Tertinggi		Terendah	
	Kecamatan	Nilai	Kecamatan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IPM	Wonosari	77,82	Saptosari	64,92
AHH (tahun)	Ngawen	77,18	Gedangsari	70,14
EMS (tahun)	Wonosari	13,65	Tepus	11,36
MYS (tahun)	Wonosari	9,63	Saptosari	5,20
PPP (Rp000)	Wonosari	13.052	Tepus	8.536

Kecamatan dengan AHH tertinggi tahun 2018 di Kabupaten Gunungkidul adalah Kecamatan Ngawen (77,18 tahun) sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Gedangsari (70,14 tahun). Kecamatan Wonosari mencatatkan pencapaian tertinggi di indikator pendidikan dengan nilai EMS sebesar 13,65 tahun dan MYS 9,63 tahun. Di sisi lain, Kecamatan Tepus mencatatkan pencapaian EMS terendah di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 karena hanya mencapai 11,36 tahun. MYS terendah di Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 berada di Kecamatan Saptosari dengan nilai 5,20 tahun. Dari sisi paritas daya beli, Kecamatan Wonosari dan Tepus adalah dua kecamatan dengan PPP tertinggi dan terendah di Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 berturut-turut yaitu Rp 13,05 juta dan Rp 8,54 juta.

Selanjutnya, Tabel 5.15 menunjukkan IPM dan komponen tertinggi dan terendah di tingkat kecamatan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2013. Dapat dilihat bahwa komposisi kecamatan dengan capaian IPM tertinggi dan terendah sama dengan tahun 2018. Kecamatan Wonosari mencapai nilai tertinggi pada aspek IPM, EMS, MYS dan PPP. AHH tertinggi berada di Kecamatan Ngawen. Di sisi lain, Kecamatan Saptosari menjadi yang paling tertinggal dalam hal IPM dan MYS. Selanjutnya, EMS dan PPP terendah di Kecamatan Tepus dan untuk AHH terendah di Kecamatan Gedangsari. Angka harapan hidup penduduk Gedangsari hanya mencapai 69,07 tahun.

Tabel 5.15. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013

Indikator	Tertinggi		Terendah	
	Kecamatan	Nilai	Kecamatan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IPM	Wonosari	70,92	Saptosari	61,54
AHH (tahun)	Ngawen	76,49	Gedangsari	69,07
EMS (tahun)	Wonosari	13,43	Tepus	11,18
MYS (tahun)	Wonosari	8,41	Saptosari	4,48
PPP (Rp000)	Wonosari	8.213	Tepus	8.188

Lebih lanjut, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan rata-rata dalam semua aspek IPM dan komponennya di kecamatan-kecamatan tersebut dari tahun 2013-2018. Tabel 5.16 menunjukkan statistik deskriptif peningkatan nilai IPM kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul. Melalui analisis CV, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terdapat ketimpangan terlebar pada MYS (15,93 persen) dan terkecil terdapat pada variabel AHH (2,72 persen). Dari perubahan CV tahun 2013 ke tahun 2018, terlihat bahwa hampir seluruh indikator mengalami penurunan ketimpangan yang ditunjukkan oleh CV yang semakin kecil, kecuali pada indikator PPP.

Tabel 5.16. Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gunungkidul

Statistik	2013					2018				
	AHH	EMS	MYS	PPP	IPM	AHH	EMS	MYS	PPP	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mean	73,06	12,49	6,22	8198,96	66,12	73,74	12,79	6,72	9163,00	68,51
Skewness	0,05	-0,41	0,60	0,44	-0,08	0,07	-0,51	1,11	2,79	1,87
Kurtosis	-0,39	-0,62	-0,17	0,06	0,23	-0,67	-0,06	1,89	8,70	5,04
CV	2,73	5,43	16,77	0,08	3,51	2,72	4,84	15,93	12,27	4,35

Angka skewness yang mayoritas positif pada tahun 2018 menunjukkan bahwa IPM beserta mayoritas komponen penyusunnya memiliki sebaran data yang lebih kecil dari nilai tengahnya. Hal yang cukup menarik adalah indikator PPP yang skewness-nya bergeser dari 0,44 pada tahun 2013 ke 2,79 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kecamatan di Kabupaten Gunungkidul belum mampu menggeser tingkat pendapatan dari yang sebelumnya lebih kecil dari nilai tengah menjadi lebih tinggi dari nilai tengah kabupaten. Kecuali PPP, nilai kurtosis indikator lain bernilai kurang dari 3. Hal ini menunjukkan

bahwa distribusi nilai mayoritas indikator penyusun IPM kecamatan di Kabupaten Gunungkidul tersebar melebar atau cenderung timpang.

5.1.4. Kabupaten Sleman

Pada tahun 2018 Kecamatan Depok mencapai IPM tertinggi di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 90,47 dan mencapai nilai tertinggi untuk seluruh indikator unsur IPM yaitu AHH (77,27 tahun), EMS (18 tahun), MYS (12,38 tahun), dan PPP (20,5 juta rupiah). Nilai dari indikator-indikator tersebut jauh di atas indikator untuk kondisi DIY yaitu IPM sebesar 79,53; AHH sebesar 74,82 tahun, EMS sebesar 15,56 tahun, MYS sebesar 9,32 tahun, dan PPP sekitar 13,95 juta rupiah. Sementara Kecamatan Prambanan mencapai IPM terendah yaitu 77,01. Untuk indikator penyusun IPM nilai terendah di Minggir untuk indikator kesehatan, di Kecamatan Cangkringan untuk indikator pendidikan, dan Kecamatan Turi untuk indikator daya beli.

Nilai IPM di Kabupaten Sleman memang mengalami peningkatan yang cukup berarti. Salah satunya di bidang pendidikan, bagi pemerintah Kabupaten Sleman pendidikan merupakan aspek terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia. Beberapa faktor yang mendukung dalam bidang pendidikan adalah ketersediaan sekolah yang memadai dengan sarana prasarannya, tenaga pengajar dan keterlibatan anak didik, maupun komite sekolah.

Tabel 5.17. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2018

Indikator	Tertinggi		Terendah	
	Kecamatan	Nilai	Kecamatan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IPM	Depok	90,47	Prambanan	77,01
AHH (tahun)	Depok	77,27	Minggir	70,01
EMS (tahun)	Depok	18,00	Cangkringan	13,66
MYS (tahun)	Depok	12,38	Cangkringan	8,59
PPP (Rp000)	Depok	20.506	Turi	15.166

Pada kurun waktu tahun 2013-2018, secara umum Kabupaten Sleman masih mengalami peningkatan di masing-masing indikator walaupun lebih lambat yaitu AHH di Kabupaten Sleman (naik 0,22 tahun), EMS (1,19 tahun), MYS (0,63 tahun) dan PPP (dengan angka pertumbuhan 12,48 persen), serta IPM (3,16 poin). Variasi capaian IPM Kabupaten Sleman pada tahun 2018 ditunjukkan Tabel 5.17 dan tahun 2013 ditunjukkan pada

Tabel 5.18. Dengan demikian Kabupaten Sleman masih mengalami peningkatan IPM sebesar 0,63 persen per tahun.

Tabel 5.18. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2013

Indikator	Tertinggi		Terendah	
	Kecamatan	Nilai	Kecamatan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IPM	Depok	86,25	Prambanan	73,45
AHH (tahun)	Depok	76,65	Prambanan	69,33
EMS (tahun)	Depok	18,00	Prambanan	13,41
MYS (tahun)	Depok	12,38	Prambanan	8,27
PPP (Rp000)	Ngaglik	14.113	Turi	14.035

IPM kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sleman cenderung mengalami peningkatan ketimpangan karena nilai CV IPM yang lebih besar pada tahun 2018 dibanding tahun 2013. Namun demikian, ketimpangannya menurun dari 3,08 persen di tahun 2013 menjadi 3,07 persen pada tahun 2018. Pola ketimpangan IPM kecamatan di Kabupaten Sleman adalah lebih banyaknya kecamatan dengan IPM kurang dari nilai tengah kabupaten yang ditunjukkan oleh nilai skewness yang lebih dari 0. Namun demikian, dengan nilai kurtosis minus pada indikator kesehatan dan pendidikan mengindikasikan bahwa ketimpangannya besar.

Tabel 5.19. Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sleman

Statistik	2013					2018				
	AHH	EMS	MYS	PPP	IPM	AHH	EMS	MYS	PPP	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mean	73,38	15,32	10,03	14069,88	79,45	73,96	15,78	10,48	15844,00	81,88
Skewness	-0,48	0,79	0,32	0,39	0,38	-0,39	0,29	-0,44	2,54	0,84
Kurtosis	-0,48	-0,17	-0,28	-0,51	-0,35	-0,55	-0,68	-0,30	6,54	0,61
CV	2,93	8,81	11,11	0,17	4,24	2,85	7,80	10,02	9,15	4,37

Sementara itu pada indikator penyusun IPM, ketimpangan terbesar terdapat pada MYS tahun 2018 (nilai CV 10,02 persen). Dalam prosesnya, terjadi penurunan ketimpangan pada indikator AHH, EMS dan MYS dari tahun 2013-2018. Di sisi lain, terjadi peningkatan ketimpangan pada indikator PPP yaitu nilai CV meningkat menjadi 9,15 persen pada tahun 2018.

Dari analisis skewness, hanya AHH dan EMS yang memiliki nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pola ketimpangan mayoritas indikator penyusun IPM kecamatan di Kabupaten Sleman adalah lebih banyak kecamatan dengan nilai indikator yang lebih kecil daripada nilai tengahnya.

Distribusi data pada indikator PPP cenderung mengumpul pada satu nilai ditunjukkan oleh kurtosis yang lebih dari 3. Sedangkan pada indikator AHH, EMS, dan MYS distribusinya merata karena kurtosis kurang dari 3. Hal ini menunjukkan bahwa indikator lain penyusun IPM antar kecamatan cenderung timpang.

5.1.5. Kota Yogyakarta

Secara umum perkembangan IPM di Kota Yogyakarta dari tahun 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan. Kecamatan Gondokusuman menduduki IPM tertinggi di Kota Yogyakarta tahun 2018 dengan indeks sebesar 89,01 yang juga merupakan IPM tertinggi se-DIY (Tabel 5.20). Kecamatan Gondokusuman juga mencapai unsur penyusun IPM tertinggi pada indikator EMS (18 tahun), MYS sebesar 12,13 dan PPP sebesar 21,26 juta rupiah per tahun, yang juga merupakan capaian tertinggi se-DIY. Capaian pembangunan manusia di Kota Yogyakarta adalah yang tertinggi mengingat hampir semua indikator IPM terendah di Kota Yogyakarta masih lebih tinggi dibandingkan IPM dan unturnya se-DIY kecuali AHH dan EMS yaitu secara berurutan sebesar 72,34 tahun dan 13,33 yang lebih kecil dari AHH dan EMS tingkat provinsi DIY yang sebesar 79,53 tahun dan 15,56 tahun.

Tabel 5.20. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2018

Indikator	Tertinggi		Terendah	
	Kecamatan	Nilai	Kecamatan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IPM	Gondokusuman	89,01	Gedongtengen	81,01
AHH (tahun)	Pakualaman	78,69	Danurejan	72,34
EMS (tahun)	Gondokusuman	18,00	Gedongtengen	13,33
MYS (tahun)	Gondokusuman	12,13	Gedongtengen	10,45
PPP (Rp000)	Gondokusuman	21.259	Gondomanan	17.228

Pada tahun 2013, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.21, kecamatan dengan IPM tertinggi di Kota Yogyakarta adalah Kecamatan Gondokusuman dengan nilai indeks sebesar 86,17 sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Gedongtengen (79,54). Kecamatan Pakualaman mencatatkan AHH tertinggi tahun 2013 yaitu mencapai 78,68 tahun.

Di sisi lain, AHH terendah berada di Kecamatan Danurejan dengan besaran 71,92 tahun.

Tabel 5.21. IPM dan Komponen Tertinggi dan Terendah Tingkat Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2013

Indikator	Tertinggi		Terendah	
	Kecamatan	Nilai	Kecamatan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IPM	Gondokusuman	86,17	Gedongtengen	79,54
AHH (tahun)	Pakualaman	78,68	Danurejan	71,92
EMS (tahun)	Gondokusuman	17,96	Gedongtengen	13,27
MYS (tahun)	Gondokusuman	12,13	Gedongtengen	10,32
PPP (Rp000)	Gondokusuman	16.671	Gondomanan	16.607

Pada 2013, kecamatan dengan EMS dan MYS tertinggi adalah Kecamatan Gondokusuman dan yang terendah adalah Kecamatan Gedongtengen. Kecamatan Gondokusuman juga memiliki nilai PPP tertinggi di Kota Yogyakarta tahun 2013 yaitu mencapai 16,67 juta per tahun. Di sisi lain, Kecamatan Danurejan menjadi kecamatan dengan nilai AHH terendah yaitu 71,92 tahun. Sedangkan Kecamatan Gondomanan adalah kecamatan dengan PPP terendah di Kota Yogyakarta tahun 2013 dengan PPP sekitar 16,61 juta rupiah.

Tabel 5.22 menunjukkan kondisi ketimpangan IPM kecamatan di Kota Yogyakarta beserta komponennya. Dari analisis CV dan kurtosis dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan ketimpangan pada seluruh indikator, dengan nilai CV yang lebih dari 0 dan mayoritas nilai kurtosis yang kurang dari 3. Ketimpangan tertinggi terdapat pada EMS sebesar 7,82 persen pada tahun 2018. Sebaliknya, ketimpangan terkecil terdapat pada indikator AHH yaitu 2,54 persen pada tahun 2018. Namun demikian, indikator PPP mengalami peningkatan ketimpangan dari tahun 2013 ke tahun 2018 karena perubahan CV yang positif cukup besar. Selain PPP, indikator lainnya yang mengalami kenaikan ketimpangan adalah EMS. Berdasarkan nilai skewness yang mayoritas positif (kecuali indikator pendidikan), dapat disimpulkan bahwa mayoritas sebaran IPM lebih rendah dari nilai tengahnya.

Tabel 5.22. Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta

Statistik	2013					2018				
	AHH	EMS	MYS	PPP	IPM	AHH	EMS	MYS	PPP	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mean	74,50	15,75	11,36	16635,07	83,66	74,90	15,89	11,48	18053,96	84,92
Skewness	1,12	-0,54	-0,14	0,61	-0,87	0,96	-0,63	-0,63	1,94	-0,05
Kurtosis	0,79	0,99	-0,19	0,22	0,06	0,26	0,47	0,20	2,60	-0,13
CV	2,70	7,49	4,47	0,10	2,33	2,54	7,82	4,10	7,81	2,74

5.2. Faktor yang Mempengaruhi Variasi IPM per Kecamatan

Capaian IPM pada tingkat kecamatan se-DIY yang menunjukkan adanya keragaman. Keragaman tersebut, meskipun dalam besaran yang lebih kecil, juga ditemukan jika dilakukan perbandingan IPM kecamatan pada masing-masing kabupaten/kota. Variasi capaian IPM per kecamatan tersebut tentunya tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana di kecamatan masing-masing. Dalam laporannya, BPS (2016) menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas dan akses terhadap sarana kesehatan, pendidikan, dan perekonomian mempunyai pengaruh terhadap capaian IPM di suatu wilayah.

5.2.1. Fasilitas Kesehatan

Sebagai salah satu indeks penyusun angka IPM, angka harapan hidup antara lain dipengaruhi oleh ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Ketersediaan fasilitas dan kemudahan akses terhadap sarana kesehatan mempunyai pengaruh terhadap meningkatnya pelayanan kesehatan dan membantu memperbaiki perilaku hidup yang lebih bersih dan sehat. Selain itu, keberadaan fasilitas kesehatan juga berdampak pada pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, dan perawatan terhadap kelompok yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pada gilirannya keberadaan fasilitas kesehatan dapat meningkatkan derajat kesehatan di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil penghitungan indeks angka harapan hidup terlihat bahwa nilai AHH tercatat lebih tinggi pada kecamatan dengan fasilitas kesehatan yang relatif lengkap lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan dengan fasilitas kesehatan yang terbatas. Di Kabupaten Kulonprogo, indeks AHH tertinggi terdapat di Kecamatan Nanggulan sebesar 86,99. Hal tersebut selaras dengan data Potensi Desa (Podes) 2018 dimana fasilitas kesehatan di Kecamatan Nanggulan termasuk yang relatif paling lengkap dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Di kecamatan ini terdapat fasilitas kesehatan mulai dari rumah sakit, puskesmas,

puskesmas pembantu, poliklinik/balai pengobatan sampai dengan apotek. Sebaliknya, Kecamatan Kokap dengan nilai AHH terendah (80,05) memiliki fasilitas kesehatan yang relative terbatas. Di Kecamatan Kokap, fasilitas kesehatan yang tersedia hanya berupa Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Tempat Praktek Dokter, Praktek Bidan, Poskesdes, dan Toko Khusus Obat/Jamu (BPS Kulonprogo, 2019).

Di Kabupaten Bantul, kecamatan dengan nilai AHH tertinggi adalah Piyungan (87,17). Fasilitas kesehatan di kecamatan tersebut relatif lengkap dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Bantul. Adapun Kecamatan Pleret, meskipun mempunyai fasilitas kesehatan yang relatif lengkap, termasuk mempunyai Rumah Sakit, namun jumlah fasilitas kesehatan di kecamatan tersebut masih sedikit (BPS Bantul, 2019). Terbatasnya jumlah sarana dan fasilitas kesehatan tersebut diduga berkontribusi terhadap pencapaian indeks AHH yang besarnya 76,66 untuk Kecamatan Pleret, dimana angka indeks tersebut merupakan yang terendah di wilayah Kabupaten Bantul.

Untuk Kabupaten Gunungkidul, nilai AHH tertinggi dicapai oleh Kecamatan Girisubo (87,68) sementara AHH terendah dicapai oleh Kecamatan Gedang Sari (77,14). Sedikit berbeda dengan kabupaten lainnya dimana nilai AHH tertinggi biasanya dicapai oleh kecamatan dengan fasilitas yang relatif lengkap, di Kabupaten Gunungkidul nilai AHH justru dicapai oleh Kecamatan Girisubo dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif kurang lengkap. Di kecamatan tersebut tidak terdapat rumah sakit. Meskipun tidak mempunyai fasilitas kesehatan yang lengkap, nampaknya akses penduduk di Kecamatan Girisubo terhadap fasilitas rumah sakit terdekat tidak terlalu sulit. Berdasarkan hasil Podes 2018, akses penduduk Girisubo ke rumah sakit terdekat dapat ditempuh dalam waktu kira-kira 30 menit. Sebaliknya, penduduk di Gedang Sari yang merupakan kecamatan dengan AHH terendah di Gunungkidul harus menempuh jarak selama 1 jam untuk dapat mengakses rumah sakit terdekat.

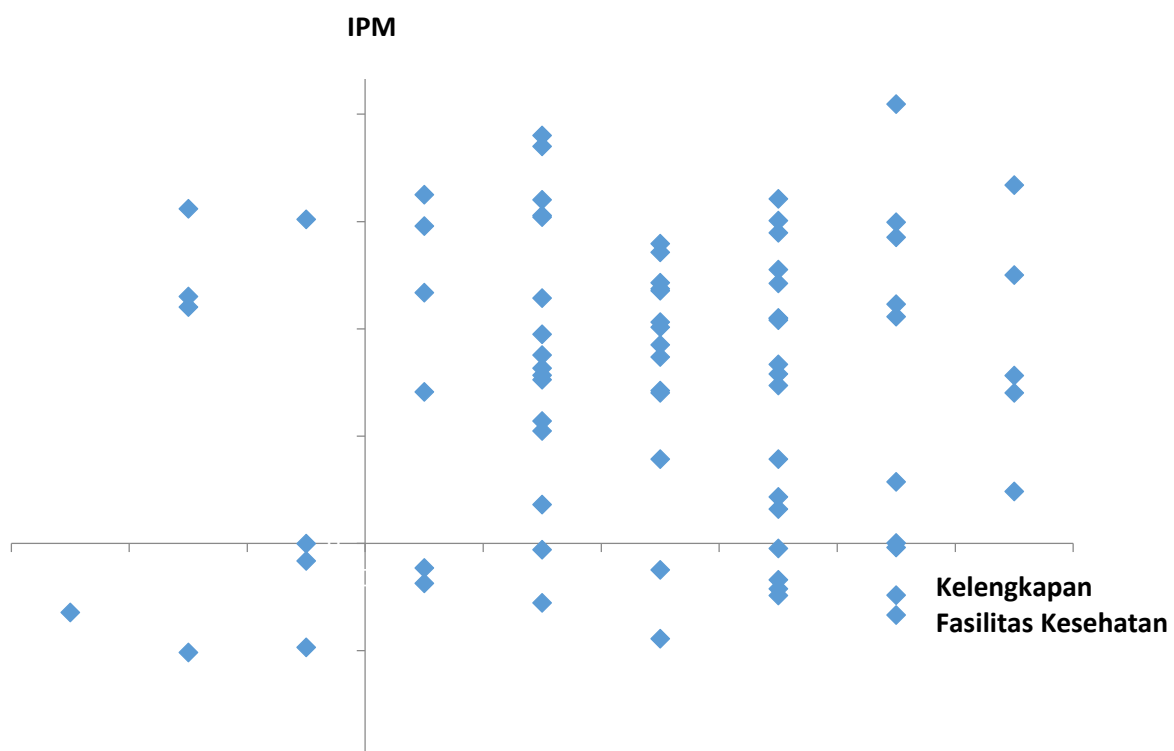
Di Kabupaten Sleman, indeks AHH yang tinggi dicapai oleh Kecamatan Depok (88,11). Hasil pendataan Podes 2018 menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di kecamatan ini merupakan yang terlengkap dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Semua fasilitas kesehatan, dari toko obat/jamu sampai dengan rumah sakit telah tersedia di kecamatan ini untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kecamatan Minggir dengan nilai AHH 76,93 merupakan kecamatan dengan indeks AHH terendah di Kabupaten Sleman. Fasilitas kesehatan yang tersedia di kecamatan ini relatif kurang lengkap dengan jumlah yang terbatas.

Nilai terendah AHH di Kota Yogyakarta tercatat di Kecamatan Danurejan sebesar 80,52. Meskipun merupakan angka terendah untuk ukuran Kota Yogyakarta, pencapaian angka AHH di kecamatan ini relatif tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan

lainnya di DIY. Adapun angka AHH tertinggi di Kota Yogyakarta dicapai oleh Kecamatan Pakualaman yaitu sebesar 90,29. Tingginya rata-rata indeks AHH di Kota Yogyakarta diduga sangat dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas kesehatan yang tersedia lengkap dengan akses yang mudah dan dalam jumlah yang relatif memadai. Untuk melayani kesehatan penduduk di 45 kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta, terdapat 21 rumah sakit umum, 18 puskesmas, 8 puskesmas pembantu, dan 133 apotek serta 22 toko obat.

Gambar 5.1. menunjukkan hubungan antara pencapaian IPM dengan kelengkapan fasilitas kesehatan di kecamatan-kecamatan di DIY. Data mengenai fasilitas kesehatan diperoleh dari pendataan Podes 2018 yang mencakup fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, apotek, hingga toko jamu/obat. Selanjutnya dilakukan *scoring* terhadap kelengkapan fasilitas kesehatan pada setiap kecamatan. Pada sumbu X yang merepresentasikan fasilitas kesehatan semakin ke kanan menunjukkan ketersediaan fasilitas kesehatan yang semakin lengkap. Adapun sumbu Y yang mewakili IPM semakin ke atas menunjukkan pencapaian IPM yang semakin tinggi.

Gambar 5.1. Kuadran Hubungan IPM dan Fasilitas Kesehatan



Pada kuadran I menunjukkan kecamatan-kecamatan dengan fasilitas kesehatan yang relatif lebih lengkap dan pencapaian IPM yang tinggi. Terdapat 55 kecamatan di DIY yang

berada di kuadran ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas kecamatan di DIY telah memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap sehingga pencapaian IPM-nya pun menjadi semakin tinggi. Pada kuadran II terdapat 4 kecamatan yang pencapaian IPM-nya tinggi namun fasilitas kesehatan di kecamatan tersebut relatif belum lengkap. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sanden, Kraton, Gedong Tengen, dan Jetis. Kuadran III mencerminkan kondisi kecamatan dengan pencapaian IPM yang rendah dan fasilitas kesehatan yang belum lengkap. Kecamatan yang berada pada kuadran ini adalah Kokap, Girimulyo, Purwosari, Saptosari, dan Gedangsari. Sementara itu, pada kuadran IV masih terdapat 14 kecamatan yang pencapaian IPM-nya relatif rendah meskipun fasilitas kesehatan di kecamatan tersebut sudah lengkap.

5.2.2. Fasilitas Pendidikan

Selain kesehatan, pendidikan merupakan bidang yang mendapat perhatian untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut karena banyak diyakini bahwa tingginya tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan tingkat pendapatan/kesejahteraan penduduk. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, menurunkan angka putus sekolah, memperbaiki kualitas pendidikan, mengembangkan sarana dan infrastruktur sekolah.

Kaitan antara fasilitas pendidikan dengan IPM terjadi melalui dimensi pendidikan yang diukur dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Diasumsikan bahwa dengan semakin lengkapnya fasilitas pendidikan di suatu wilayah maka nilai indeks dimensi pendidikan akan meningkat. Pada akhirnya dengan meningkatnya indeks pendidikan maka capaian IPM di wilayah tersebut akan meningkat.

Hasil pendataan Podes 2018 menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan dasar berupa Sekolah Dasar (SD) telah dimiliki oleh semua kecamatan di DIY. Demikian juga halnya untuk fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun Madrasah Tsanawiyah (MTs) dimana semua kecamatan di DIY telah memiliki fasilitas tersebut. Untuk fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas ataupun yang sederajat juga tersedia di semua kecamatan di DIY. Dengan demikian, untuk pendidikan dasar dan menengah dapat dikatakan bahwa keberadaannya telah tersebar merata di semua kecamatan yang ada di seluruh DIY. Adapun untuk tingkat pendidikan tinggi, keberadaan universitas, perguruan tinggi maupun akademi hanya terdapat di 28 kecamatan di DIY (BPS DIY, 2019).

Di Kabupaten Kulonprogo, indeks dimensi pendidikan tertinggi dicapai oleh Kecamatan Pengasih dengan nilai indeks pendidikan sebesar 72,91. Pada saat yang sama, indeks pendidikan terendah di Kabupaten Kulonprogo terdapat di Kecamatan Girimulyo

dengan nilai sebesar 60,81. Dari sisi fasilitas pendidikan, hampir semua fasilitas pendidikan telah tersedia di Girimulyo kecuali akademi/perguruan tinggi. Selain itu, dari tiga kecamatan dengan nilai indeks pendidikan tertinggi di Kabupaten Kulonprogo, yaitu Pengasih (72,91), Panjatan (70,82), dan Galur (70,79) ditinjau dari segi fasilitas pendidikan tidak terlalu jauh berbeda dengan kecamatan lainnya (BPS Kulonprogo, 2019).

Indeks pendidikan tertinggi di Kabupaten Bantul terdapat di Kecamatan Banguntapan (83,38). Sementara indeks pendidikan terendah berada di Kecamatan Dlingo (58,94). Dilihat dari fasilitas pendidikan yang tersedia, Kecamatan Dlingo telah memiliki semua fasilitas pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Satu-satunya yang membedakan Kecamatan Dlingo dengan Kecamatan Banguntapan dalam hal fasilitas pendidikan adalah keberadaan perguruan tinggi, dimana Dlingo tidak memiliki perguruan tinggi sementara Banguntapan memiliki fasilitas perguruan tinggi. Selain itu kecamatan-kecamatan yang memiliki perguruan tinggi mempunyai kecenderungan untuk memperoleh nilai indeks pendidikan yang relatif tinggi, misalnya Kecamatan Sewon (80,71), Kasihan (80,26), dan Sedayu (77,89).

Untuk Kabupaten Gunungkidul, indeks pendidikan tertinggi dicapai oleh Kecamatan Wonosari (70,04). Adapun, Kecamatan Tepus memperoleh indeks pendidikan terendah (51,05). Dalam hal keberadaan fasilitas pendidikan, Kecamatan Tepus hanya memiliki fasilitas pendidikan yang terbatas. Di kecamatan ini tidak tersedia fasilitas pendidikan SMA. Kondisi yang sama juga terjadi di Kecamatan Saptosari, Girisubo, dan Gedangsari. Ketiga kecamatan tersebut selain tidak memiliki fasilitas pendidikan SMA juga memiliki pencapaian indeks pendidikan yang rendah.

Dari 17 kecamatan yang berada di Kabupaten Sleman, indeks pendidikan terendah terdapat di Kecamatan Cangkringan (66,56). Adapun indeks pendidikan tertinggi terdapat di Kecamatan Depok (91,27). Kondisi di Sleman menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian indeks pendidikan. Nilai indeks pendidikan di kecamatan-kecamatan yang mempunyai perguruan tinggi menempati posisi teratas di Kabupaten Sleman (Tabel Lampiran 1).

Kondisi yang hampir sama juga dapat ditemukan di Kota Yogyakarta. Di Kota ini, pencapaian indeks pendidikan tertinggi didominasi oleh kecamatan-kecamatan yang memiliki fasilitas pendidikan lengkap dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Adapun untuk kecamatan yang tidak mempunyai perguruan tinggi, nilai indeks pendidikan yang diperolehnya relative rendah. Ketiga kecamatan yang tidak mempunyai fasilitas perguruan tinggi dan pencapaian indeks pendidikan yang rendah adalah Kecamatan Wirobrajan (indeks pendidikan

83,37), Gondomanan (indeks pendidikan 75,18), dan Gedong Tengen (indeks pendidikan 71,76). Meskipun demikian, karena infrastruktur transportasi yang cukup baik dan fasilitas pendidikan yang relatif lengkap, rata-rata capaian indeks pendidikan di Kota Yogyakarta merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di DIY.

Dalam kaitannya dengan pencapaian IPM, keberadaan fasilitas pendidikan yang lengkap juga mempunyai peranan yang strategis. Kecamatan-kecamatan dengan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap mempunyai capaian IPM yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang fasilitas pendidikannya kurang lengkap. Dalam kasus DIY, kelengkapan fasilitas pendidikan yang dimaksud adalah tersedianya fasilitas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sebagai contoh, Kecamatan Saptosari yang merupakan kecamatan dengan fasilitas pendidikan yang relatif kurang lengkap. Di kecamatan ini, tidak tersedia fasilitas pendidikan SMA dan perguruan tinggi (BPS Gunungkidul, 2019). Hasil penghitungan IPM menunjukkan bahwa capaian IPM di kecamatan ini merupakan yang terendah di DIY, yaitu 64,92. Adapun kecamatan dengan capaian IPM tertinggi, yaitu Kecamatan Depok (90,47) merupakan kecamatan dengan fasilitas pendidikan yang sangat lengkap dengan jumlah yang memadai (BPS Sleman, 2019).

5.2.3. Fasilitas Perekonomian

Informasi mengenai fasilitas perekonomian diperoleh dari data Podes 2018. Selanjutnya data tersebut diolah menjadi indeks ketahanan ekonomi, yang juga merupakan salah satu indeks penyusun Indeks Desa Membangun. Indeks ketahanan ekonomi (IKE) merupakan indeks yang mengukur dimensi ekonomi wilayah perdesaan (Permendes 2 Tahun 2016). Indeks ini disusun berdasarkan informasi mengenai:

1. Keragaman produksi masyarakat desa.
2. Ketersediaan pusat pelayanan perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen, warung dan minimarket, kedai makanan, restoran, dan penginapan).
3. Akses distribusi/logistik (kantor pos, jasa pengiriman, dan jasa logistik).
4. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan (perbankan umum, dan BPR).
5. Lembaga ekonomi, tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi).
6. Keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator moda transportasi umum dan infrastruktur jalan.

IKE diasumsikan mempunyai kaitan yang erat dengan IPM. Nilai IKE yang semakin tinggi menunjukkan semakin tersedianya fasilitas ekonomi di suatu wilayah. Keberadaan fasilitas ekonomi yang lengkap merupakan salah satu pendukung utama ketersediaan barang

dan jasa di suatu wilayah. Selain itu, dengan adanya fasilitas ekonomi diharapkan dapat menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga dapat menekan biaya produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan membaiknya daya beli masyarakat maka pada akhirnya akan dapat meningkatkan pengeluaran masyarakat sehingga dapat meningkatkan capaian IPM di suatu wilayah.

Hasil uji korelasi antara indeks IKE dengan IPM di DIY menunjukkan hasil yang positif. Nilai koefisien korelasi antara IKE dan IPM sebesar 0,745 menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara keduanya dalam hubungan yang positif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan indeks IKE yang merupakan indikasi semakin lengkap dan semakin baiknya fasilitas perekonomian sejalan dengan peningkatan IPM (Tabel Lampiran).

Di Kabupaten Kulonprogo, nilai IKE tertinggi terdapat di Kecamatan Wates sebesar 0,85. Sejalan dengan hal tersebut, capaian IPM tertinggi di Kulonprogo juga terdapat di Kecamatan Wates dengan nilai 77,83. Demikian juga halnya dengan Kecamatan Pengasih dengan nilai indeks IKE 0,84 mempunyai capaian IPM yang termasuk tinggi di Kulonprogo, yaitu sebesar 75,24.

Secara umum, kondisi yang sama juga ditemui di Kabupaten Bantul, dimana capaian IPM yang tinggi terdapat pada kecamatan dengan nilai IKE yang juga tinggi. Sebagai contoh, nilai IKE di Kecamatan Banguntapan, Sewon, dan Kasihan termasuk yang tertinggi, masing-masing sebesar 0,89; 0,85; dan 0,85. Sejalan dengan hal tersebut, capaian IPM di ketiga kecamatan tersebut juga termasuk yang tertinggi di wilayah Kabupaten Bantul.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul juga menunjukkan bahwa nilai indeks IKE yang tinggi sejalan dengan pencapaian nilai IPM yang juga tinggi. Sebaliknya kecamatan dengan nilai IKE yang rendah biasanya memiliki nilai IPM yang juga rendah. Kecamatan Saptosari, Gedangsari, dan Tepus dengan nilai IKE yang relatif kecil, yaitu berturut-turut 0,62; 0,70; dan 0,75 menunjukkan pencapaian IPM yang juga rendah. Nilai IPM di Kecamatan Saptosari (64,92), Gedangsari (65,16), dan Tepus (65,55) termasuk kelompok kecamatan dengan IPM yang terendah.

Di Kabupaten Sleman, secara umum masih menunjukkan kecenderungan yang sama dengan kabupaten lainnya, meskipun demikian terdapat beberapa kecamatan di mana nilai IKE yang tinggi tidak selalu diikuti dengan capaian IPM yang juga tinggi. Salah satunya adalah Kecamatan Sleman. Kecamatan ini mempunyai IKE sebesar 0,93, namun capaian IPM-nya tercatat sebesar 80,57 dan menempati urutan ke-10 di Kabupaten Sleman. Demikian juga

halnya dengan Kecamatan Mlati yang nilai IKE-nya sebesar 0,88 namun IPM-nya tercatat terbesar kedua di Kabupaten Sleman, yaitu 86,69.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Sleman, juga hampir sama dengan Kota Yogyakarta. Terdapat beberapa anomali dimana, nilai IKE yang tinggi tidak selalu disertai dengan pencapaian IPM yang tinggi. Kecamatan Umbulharjo dengan nilai IKE sebesar 0,94 mempunyai nilai IPM 85,04 (urutan kesembilan IPM kecamatan di Kota Yogyakarta). Demikian juga dengan Kecamatan Gondomanan yang mempunyai nilai IKE 0,92 ternyata capaian IPM-nya sebesar 81,68 (urutan ke-13 IPM kecamatan di Yogyakarta).

Meskipun secara umum terdapat korelasi positif antara IKE dan IPM, namun di beberapa kecamatan hubungan antara IKE dan IPM menunjukkan adanya anomali. Kondisi tersebut terutama dijumpai di kecamatan-kecamatan yang tergolong kategori kecamatan di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut diduga karena indeks IKE yang kurang sensitif digunakan untuk mengukur wilayah perkotaan. Hal tersebut karena secara umum, kondisi infrastruktur perekonomian di wilayah perkotaan relatif telah berkembang dan tertata dengan baik.

5.3. Indeks Desa Membangun (IDM) dan IPM

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang disusun dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Berdasarkan informasi dari website kementerian desa, Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kegiatan pembangunan dan upaya terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan harus dapat menghasilkan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat setempat, bersendikan pada nilai-nilai lokal dan memperkuat nilai-nilai tersebut, serta ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konsep tersebut ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang saling memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Lebih lanjut, Indeks Desa Membangun memberikan gambaran perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun menjadi acuan bagi program intervensi pembangunan di wilayah perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri. Cara klasifikasi tersebut tentu harus peka terhadap karakteristik desa yang sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik geografis tetapi juga terkait nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, disebutkan bahwa IDM dimaksudkan antara lain untuk (a) menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian Desa; (b) menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa, (c) menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain.

Lebih lanjut, Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 juga menyatakan bahwa secara khusus, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dihasilkan dapat digunakan:

- a. Sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa;
- b. Menjadi salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Sebagai masukan dalam perumusan targetting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional;
- d. Sebagai instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa IDM disusun berdasarkan 3 indeks utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Indeks ketahanan sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Adapun dimensi ekonomi dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup resiko resiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan. Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap resiko bencana.

Selanjutnya dari hasil penghitungan IDM tersebut dilakukan klasifikasi status desa sebagai berikut:

1. Status Desa Sangat Tertinggal, $IDM \leq 0,491$
2. Status Desa Tertinggal, $0,491 < IDM \leq 0,599$
3. Status Desa Berkembang, $0,599 < IDM \leq 0,707$
4. Status Desa Maju, $0,707 < IDM \leq 0,815$
5. Status Desa Mandiri, $IDM > 0,815$

Karena analisa yang akan dilakukan pada tingkat kecamatan, maka nilai IDM yang diperoleh kemudian dilakukan *adjustment* untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi di masing-masing kecamatan di DIY. Hasil penghitungannya adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel 5.23.

Tabel 5.23. Nilai IDM dan IPM per Kecamatan di DIY Tahun 2018

KABUPATEN	KECAMATAN	IKS	IKL	IDM	IKE	IPM
Kulonprogo	Temon	,73	,72	0,74	,78	77,35
	Wates	,82	,68	0,78	,85	77,89
	Panjatan	,75	,79	0,75	,71	75,71
	Galur	,76	,74	0,74	,72	73,92
	Lendah	,75	,68	0,72	,73	72,86
	Sentolo	,80	,79	0,79	,77	71,60
	Pengasih	,81	,75	0,80	,84	75,24
	Kokap	,77	,84	0,80	,80	69,18
	Girimulyo	,70	,77	0,73	,72	69,99
	Nanggulan	,75	,72	0,75	,78	72,16
	Kalibawang	,78	,80	0,81	,84	71,81
	Samigaluh	,76	,91	0,81	,74	69,70
Bantul	Srandakan	,73	,53	0,79	,73	78,17
	Sanden	,83	,67	0,81	,75	81,51
	Kretek	,78	,77	0,81	,75	78,68
	Pundong	,84	,64	0,78	,84	77,83
	Bambang Lipuro	,87	,58	0,86	,88	80,08
	Pandak	,79	,77	0,80	,77	78,77
	Bantul	,76	,77	0,83	,80	82,11
	Jetis	,81	,68	0,83	,80	80,30
	Imogiri	,86	,58	0,79	,89	77,12
	Dlingo	,81	,69	0,79	,82	73,93
	Pleret	,84	,84	0,72	,83	77,02
	Piyungan	,85	,87	0,78	,85	80,50
	Banguntapan	,87	,78	0,79	,89	82,50
	Sewon	,87	,82	0,84	,85	83,96
	Kasihani	,84	,83	0,80	,85	84,96
	Pajangan	,87	,64	0,76	1,00	77,62
	Sedayu	,86	,80	0,82	,85	82,14
Gunungkidul	Panggung	,77	,74	0,76	,77	66,66
	Purwosari	,67	,68	0,71	,78	66,77
	Paliyan	,70	,59	0,68	,75	67,57
	Sapto Sari	,70	,66	0,66	,62	64,92
	Tepus	,71	,77	0,74	,75	65,55
	Tanjungsari	,77	,71	0,73	,71	68,14
	Rongkop	,74	,61	0,68	,70	67,89
	Girisubo	,73	,78	0,74	,70	68,30
	Semanu	,79	,69	0,76	,81	67,59

KABUPATEN	KECAMATAN	IKS	IKL	IDM	IKE	IPM
Gunungkidul	Ponjong	,76	,67	0,70	,69	68,86
	Karangmojo	,84	,72	0,79	,83	70,02
	Wonosari	,81	,62	0,75	,83	77,82
	Playen	,81	,69	0,76	,77	72,42
	Patuk	,79	,72	0,76	,76	69,77
	Gedang Sari	,78	,82	0,77	,70	65,16
	Nglipar	,74	,81	0,75	,71	67,23
	Ngawen	,74	,76	0,75	,74	68,76
	Semin	,79	,68	0,71	,67	69,81
Sleman	Moyudan	,87	,63	0,75	,76	81,42
	Minggir	,85	,81	0,81	,77	79,75
	Seyegan	,85	,85	0,83	,79	79,25
	Godean	,84	,81	0,82	,82	81,14
	Gamping	,87	,64	0,81	,91	82,76
	Mlati	,85	,81	0,85	,88	86,70
	Depok	,87	,91	0,92	,97	90,47
	Berbah	,87	,85	0,87	,88	80,47
	Prambanan	,79	,82	0,80	,79	77,01
	Kalasan	,88	,88	0,88	,87	84,48
	Ngemplak	,83	,93	0,88	,87	84,27
	Ngaglik	,88	,86	0,89	,92	86,06
	Sleman	,88	,81	0,87	,93	80,57
	Tempel	,81	,90	0,84	,80	78,34
	Turi	,86	,93	0,84	,73	80,39
	Pakem	,83	,87	0,84	,81	81,77
	Cangkringan	,76	,95	0,82	,75	77,06
Kota Yogyakarta	Mantrijeron	,93	,84	0,92	,98	85,21
	Kraton	,75	,91	0,91	,83	85,60
	Mergangsan	,87	,87	0,89	,85	86,25
	Umbulharjo	,87	,85	0,89	,94	85,04
	Kotagede	,88	,96	0,92	,93	84,78
	Gondokusuman	,89	,88	0,88	,95	89,01
	Danurejan	,81	,98	0,87	,88	81,87
	Pakualaman	,80	,77	0,87	,89	88,50
	Gondomanan	,86	,73	0,86	,92	81,68
	Ngampilan	,84	,83	0,86	,93	86,01
	Wirobrajan	,89	,76	0,85	,93	85,28
	Gedong Tengen	,86	,80	0,84	,89	81,01
	Jetis	,86	,89	0,83	,92	85,10
	Tegalrejo	,88	,85	0,82	,87	83,57

Hasil penghitungan IDM untuk kecamatan di seluruh DIY menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan di wilayah ini rata-rata desanya tergolong sebagai desa maju. Bahkan

sebanyak 32 kecamatan di DIY, atau hampir separuhnya, rata-rata desanya tergolong sebagai desa mandiri. Namun demikian, masih terdapat 4 kecamatan yang rata-rata desanya masih tergolong sebagai desa berkembang. Keempat kecamatan tersebut adalah Saptosari (0,66), Paliyan (0,68), Rongkop (0,61), dan Ponjong (0,70).

Dalam kaitannya dengan IPM, tabel 5.23. menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan dengan nilai IDM yang kecil pada umumnya memiliki capaian IPM yang rendah. Demikian juga halnya kecamatan-kecamatan dengan nilai IDM yang besar biasanya memiliki capaian IPM yang tinggi. Sebagai contoh, Kecamatan Saptosari dengan nilai IDM 0,66 mempunyai capaian IPM 64,92 yang merupakan capaian IPM terendah di DIY. Sebaliknya, Kecamatan Depok dengan nilai IDM sebesar 0,92 memiliki capaian IPM sebesar 90,47 yang merupakan capaian IPM tertinggi di DIY.

Lebih lanjut, hasil uji korelasi person menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara IDM dan IPM untuk kecamatan sebesar 0,815 (tabel lampiran). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai IDM kecamatan maka capaian IPM-nya juga akan semakin tinggi. Selain itu, besarnya nilai korelasi tersebut menunjukkan kuatnya hubungan antara IDM dan IPM kecamatan di DIY.

Berdasarkan kondisi tersebut, untuk mengukur pencapaian kemajuan suatu wilayah dapat digunakan indikator IDM pada tingkat kecamatan. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian, antara lain:

1. IDM merupakan indikator input sedangkan IPM merupakan indikator output, sehingga penggunaannya juga harus tetap memperhatikan tujuan dan relevansi kebutuhan data.
2. Desain awal penggunaan IDM adalah untuk mengukur kemajuan desa, sehingga ketika digunakan untuk mengukur kemajuan unit wilayah lainnya perlu dilakukan penyesuaian. Selain itu, ketersediaan data pada masing-masing unit wilayah juga berbeda, kondisi ini juga perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
3. Masih perlu dilakukan analisa yang lebih komprehensif terkait dengan hubungan antara IDM dan IPM terkait dengan ukuran pencapaian pembangunan di suatu wilayah.

BAB 6. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Capaian IPM DIY pada tahun 2018 sebesar 79,53, meningkat dari kondisi tahun 2013 yang mencapai 76,44. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pembangunan manusia di DIY. Angka IPM sebesar itu menunjukkan bahwa IPM di DIY masuk dalam kategori tinggi.

Capaian IPM tertinggi terdapat di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, yang pada tahun 2018 dengan poin mencapai 90,47 yang relatif konsisten pada posisi teratas dengan kondisi pada tahun 2013. Posisi berikutnya adalah Kecamatan Gondokusuman dengan nilai IPM pada 2018 sebesar 89,01. Sementara itu yang mengejutkan adalah capaian pembangunan manusia di posisi ketiga yaitu Kecamatan Pakualaman (dengan indeks sebesar 88,50) mengungguli Kecamatan Mergangsan dan Ngampilan yang memiliki capaian IPM masing-masing secara berturut-turut sebesar 86,25 dan 86,01 poin di Kota Yogyakarta, atau Kecamatan Mlati (86,70) serta Kecamatan Ngaglik dengan angka IPM sebesar 86,01 di Kabupaten Sleman.

Sementara itu tiga kecamatan terendah capaian pembangunan manusia dibandingkan kecamatan lain pada tahun 2018 adalah Kecamatan Saptosari (64,92), Gedangsari (65,16) dan Tepus (65,55). Sementara kecamatan yang masuk 10 terkecil berdasarkan nilai IPM lainnya seluruhnya ada di Kabupaten Gunungkidul yaitu Panggang, Purwosari, Nglipar, Paliyan, Semanu, Rongkop, dan Tanjungsari.

Kecamatan Depok yang merupakan kecamatan dengan indeks pembangunan manusia peringkat pertama di DIY memiliki keunggulan pada ketiga indeks penyusunnya yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. Indikator pendidikan yaitu rata-rata harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di daerah tersebut cukup menonjol dan sangat mendukung berada di peringkat pertama. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kecamatan Depok sudah mencapai 12 tahun atau lulus SLTA.

Selain melihat peringkat atau ranking, capaian IPM di kecamatan dapat juga dilihat dari besaran angka pertumbuhan nilai IPM-nya. Besaran angka pertumbuhan per tahun menggambarkan seberapa besar rata-rata akselerasi capaian pembangunan manusia dalam lima tahun (tahun 2013 berbanding 2018). Akselerasi tertinggi pembangunan manusia secara umum berada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, diikuti Kecamatan Temon, Wates, dan Panjatan di Kabupaten Kulonprogo, serta Kecamatan Jetis dan Pajangan di

Kabupaten Bantul. Sehingga sangat wajar dengan akselerasi pembangunan manusia yang relatif tinggi Kecamatan Panjatan mampu menggeser peringkat Kecamatan Galur atau Nanggulan di Kabupaten Kulonprogo, dengan kata lain Kecamatan Panjatan mampu naik tiga peringkat dibandingkan lima tahun sebelumnya. Besaran angka pertumbuhan dari Kecamatan Panjatan dalam periode 2013-2018 rata-rata mencapai 1,42 persen per tahun. Kecamatan Jetis dan Pajangan di Kabupaten Bantul juga memiliki angka pertumbuhan sangat tinggi, yaitu berturut-turut 1,29 dan 1,26 persen per tahun. Hal ini cukup wajar oleh karena bangkitnya wilayah tersebut kemungkinan disebabkan adanya perumahan baru atau rencana pembangunan bandara dan mega proyek lain di Kabupaten Kulonprogo sehingga masyarakat lebih termotivasi dalam pemberdayaan kualitas manusia.

Kecamatan Rongkop dan Nglipar merupakan kecamatan yang memiliki capaian IPM masuk dalam 10 terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sayangnya rata-rata angka pertumbuhan IPM juga tidak menunjukkan indikasi menggembirakan bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan capaian rata-rata angka pertumbuhan IPM kecamatan lain, masing-masing hanya 0,29 dan 0,36 persen per tahun. Sementara Kecamatan Danurejan di Kota Yogyakarta memiliki rata-rata angka pertumbuhan IPM paling rendah, yaitu hanya 0,15 persen per tahun pada periode 2013-2018.

6.2. Saran Tindak Lanjut: Tantangan Pembangunan

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan utama pembangunan manusia adalah untuk memastikan bahwa manusia dapat memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki. Hal ini tentunya dapat terwujud apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset kekayaan bangsa sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya dan berkontribusi dalam pembangunan. Pada umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu.

Perkembangan pembangunan manusia secara umum menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Seluruh kecamatan menunjukkan kenaikan IPM selama periode 2013 hingga 2018. Hal-hal yang mendasar dalam peningkatan kualitas manusia semakin meningkat. Walaupun demikian, masih terdapat persoalan dasar yang harus diselesaikan pada masa mendatang agar kualitas manusia DIY terus meningkat.

Pendidikan Memperluas Peluang

Pendidikan memperluas peluang seseorang dan meningkatkan kreativitas serta imajinasi. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga memperluas pilihan-pilihan lain. DIY kaya dengan keunggulan komparatif, antara lain sudah lama dikenal sebagai kota pendidikan yang ditandai dengan banyaknya pilihan pendidikan berkualitas pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Kondisi tersebut tidak lepas dari kuatnya dukungan modal budaya dan modal sosial serta komitmen segenap komponen daerah untuk mengunggulkan dunia pendidikan.

Partisipasi Sekolah Terus Meningkat

Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah perlu menjamin bahwa warga negaranya minimal menikmati pendidikan dasar hingga 9 tahun. Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, partisipasi pendidikan menjadi target dalam Program Indonesia Pintar. Untuk memonitor kemajuan partisipasi pendidikan dalam program ini, pemerintah menggunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan terhadap akses pendidikan. APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Nilai APS semakin besar sejalan dengan meningkatnya kelompok umur sekolah. Sementara, perkembangan APS selama periode tahun 2013 hingga 2018 menunjukkan pola tren meningkat setiap tahun untuk APS usia 13-15 dan APS usia 16-18, sementara APS 7-12 tahun berfluktuatif. Pada tahun 2018 APS usia 7-12 tahun (setara SD) di DIY mencapai 99,90 persen. Artinya tingkat pemerataan akses pendidikan SD di DIY sudah cukup baik, walaupun jika dibandingkan periode tahun 2013 sedikit mengalami penurunan (99,96 persen). Kemudian APS usia 13-15 tahun di DIY pada tahun 2018 telah mencapai 99,72.

Sejalan dengan APS, angka APM juga meningkat sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan sekolah. APM DIY selama periode tahun 2013-2018 mempunyai pola fluktuatif namun cenderung meningkat setiap tahun. APM DIY menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Capaian APM SD/Sederajat telah mencapai 99,50 persen. Sementara itu, APM SMP/Sederajat baru mencapai 83,61 persen yang memberikan gambaran bahwa lebih dari 16 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP. Demikian pula, APM SMA/Sederajat tercatat masih belum optimal, sebesar 70,22 persen pada tahun 2019. Perkembangan APM SD/Sederajat dari tahun 2013 hingga 2018 terus menunjukkan tren yang meningkat. Hingga tahun 2019, lebih dari 99 persen penduduk usia 7-12 tahun telah mengenyam pendidikan SD/Sederajat seperti yang ditunjukkan oleh capaian APM SD/Sederajat sebesar 99,50 persen. Upaya pemerintah untuk menghimbau agar penduduk mengenyam pendidikan sesuai umurnya harus terus ditingkatnya, mengingat sekolah sebagai awal pembentukan karakter anak. Dengan melihat capaian pada tahun 2018, pekerjaan berat yang menanti pemerintah adalah meningkatkan APS serta APM SMA/Sederajat.

Putus Sekolah Cenderung Turun

Partisipasi siswa yang mengikuti jenjang pendidikan formal tentunya akan menunjang keberhasilan program pendidikan. Dalam dunia pendidikan, putus sekolah masih merupakan persoalan mendasar termasuk di DIY. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka putus sekolah sehingga komitmen ini menjadi sasaran pokok dalam Program Indonesia Pintar.

Berdasarkan informasi pada dataku (Bappeda DIY) selama periode 2015 hingga 2018 jumlah siswa yang putus sekolah semakin turun. Kondisi ini terjadi pada jenjang dari SD/Sederajat sampai SMA/Sederajat. Nampaknya upaya yang dilakukan pemerintah daerah mencatat perkembangan yang positif. Penurunan angka putus sekolah pada tahun 2015 di tingkat SD mencapai 98 siswa. Angka ini berkurang drastis pada tahun 2018 menjadi 43 siswa. Meskipun jumlah siswa putus sekolah turun, masih terdapat persoalan lain yang perlu mendapat perhatian. Di tingkat SMP dan SMA/ sederajat, jumlah siswa yang putus sekolah cenderung lebih banyak dibanding pada tingkat SD. Hal ini memang umum terjadi di Indonesia dimana putus sekolah semakin tinggi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sekolah yang Layak Masih Terbatas

Aktivitas belajar mengajar dapat berjalan dengan baik bila didukung dengan sarana pendidikan yang berkualitas. Sarana pendidikan yang penting salah satunya adalah jumlah sekolah. Selama tiga tahun terakhir, jumlah sekolah yang berstatus baik mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan. Hal ini tentu berdampak positif terhadap aktivitas belajar mengajar. Persoalan yang perlu mendapat perhatian secara terus menerus adalah jumlah sekolah yang layak masih terbatas. Tahun 2018, jumlah sekolah berstatus layak di tingkat SD hanya 66,37 persen saja. Artinya, hampir satu per tiga SD masih kurang layak untuk kegiatan belajar mengajar (dataku-Bappeda DIY). Hal yang sama juga terjadi pada jenjang SMA. Sementara pada jenjang SMP, persentase sekolah yang berstatus layak pada tahun 2018 mencapai 76,97 persen.

Hidup Lebih Lama dan Kesehatan yang Lebih Baik

Hidup lebih lama adalah dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, kesehatan juga menentukan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia sangat tergantung dari derajat kesehatannya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pemerintah mengusung tema program yang sarat dengan cita-cita manusia Indonesia yang berkualitas, yaitu Program Indonesia Sehat.

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang (Kementrian Kesehatan RI, 2015). Hal ini dilakukan sebagai investasi bagi pembangunan manusia yang produktif secara sosial ekonomi. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang tinggi.

Berdasarkan Teori Henrik L. Blum (1974) dalam Notoadmodjo (2007), derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk per tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) dapat menunjukkan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya. Pada tahun 2018 capaian AHH DIY sebesar 74,82 tahun atau meningkat 0,37 tahun dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 74,45 tahun. Sementara itu morbiditas bisa

ditunjukkan dengan proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Semakin tinggi morbiditas menunjukkan rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Hal ini menunjukkan masyarakat rentan terhadap berbagai macam penyakit yang timbul akibat lemahnya daya resistensinya. Kondisi kesehatan yang buruk akan berdampak pada umur harapan hidup dan tingkat mortalitas. Berdasarkan data Susenas tahun 2018, angka keluhan kesehatan penduduk di DIY sebesar 35,32 persen.

Berdasarkan teori Henrik L. Blum (1974) tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk yang merupakan ukuran dari derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor penentu yaitu faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang paling besar yaitu 45 persen. Sementara itu, pengaruh perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan kependudukan/keturunan sebesar 5 persen. Keempat faktor tersebut saling terkait dan berinteraksi dengan faktor lingkungan dan perilaku kesehatan yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan manusia (Kasnodihardjo dkk, 1997).

Meningkatkan Kondisi Lingkungan yang Sehat

Berdasarkan konsep derajat kesehatan yang dikemukakan oleh Hendrik L. Blum (1974), faktor terbesar yang mempengaruhi derajat kesehatan yaitu faktor lingkungan. Lingkungan memberikan peran yang paling penting dan berpengaruh positif terhadap terwujudnya kesehatan masyarakat yang baik. Lingkungan juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam penularan dan munculnya suatu penyakit. Oleh sebab itu, harus diupayakan untuk meningkatkan kondisi lingkungan yang sehat dari masa ke masa. Disamping itu, lingkungan yang baik juga secara tidak langsung berhubungan dengan keturunan dan pelayanan kesehatan.

Kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan ditunjukkan oleh beberapa indikator, antara lain: kepemilikan tempat buang air besar, kondisi sanitasi, dan akses terhadap air minum yang layak, dan jenis lantai terluas. Berdasarkan data Susenas tahun 2018 terlihat bahwa terdapat 80,58 persen rumah tangga di DIY sudah memiliki tempat buang air besar sendiri. Dengan kata lain masih ada 19,42 persen rumah tangga yang tidak memiliki tempat buang air besar sendiri. Indikator lain adalah akses sanitasi layak yang merupakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan (dilengkapi dengan kloset leher angsa dan dengan tempat pembuangan tangki septik). Faktor sanitasi sangat penting karena masyarakat membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika sanitasi layak tidak terpenuhi, maka fasilitas

tersebut akan rentan dalam menularkan dan menumbuhkan penyakit. Pada tahun 2018 rumah tangga DIY yang sudah menikmati sanitasi layak hanya sebesar 88,92 persen. Artinya, masih ada sekitar 11,08 persen rumah tangga yang belum menggunakan fasilitas buang air dengan sanitasi layak.

Sementara itu, akses terhadap air bersih yang layak merupakan salah satu indikator yang juga berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat. Dengan adanya pembangunan sarana air bersih di suatu wilayah/daerah, beberapa infeksi oleh mikrobakteria, misalnya kolera, desentri, thypus dan lainnya dapat dikurangi (Said, 1999). Namun demikian, suplai air bersih tersebut harus memenuhi standar kesehatan agar berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Di DIY, pada tahun 2018 masih terdapat 19,38 persen rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak. Artinya masih ada sekitar seperlima rumah tangga di DIY yang rentan terhadap infeksi penyakit akibat mikrobakteria. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk memberikan penyuluhan mengenai penggunaan air bersih oleh masyarakat, sekaligus juga memberikan fasilitas air bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Selain beberapa indikator lingkungan di atas, jenis lantai rumah juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Lantai yang baik harus selalu kering (Achmadi, 2008). Syarat yang paling penting adalah tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim hujan, sehingga penularan penyakit dapat dihindari. Kriteria lantai yang baik adalah yang berasal dari ubin atau semen, bukan dari tanah, karena tanah cenderung lembab dan tidak memenuhi kriteria tersebut. Namun demikian, pada tahun 2018 masih terdapat 3,04 persen rumah tangga di DIY yang jenis lantai terluasnya adalah tanah, karena yang menggunakan lantai bukan tanah tercatat sebesar 96,96 persen. Hal ini juga terkait dengan tingkat kemiskinan penduduk. Oleh sebab itu peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang harus dilakukan karena juga berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

Dengan perkembangan berbagai indikator lingkungan di atas, maka secara umum kondisi lingkungan penduduk DIY belum sepenuhnya aman terhadap penularan penyakit. Khususnya untuk indikator sanitasi yang layak dan akses terhadap air bersih, capaian angka indikatornya masih jauh dari angka ideal. Oleh sebab itu, upaya memperbaiki lingkungan menjadi lebih sehat menjadi suatu hal yang menjadi prioritas untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Tanpa lingkungan yang sehat, berbagai penyakit akan cepat muncul dan menular

sehingga akan menambah angka morbiditas yang pada akhirnya akan mengurangi umur harapan hidup.

Fasilitas Kesehatan Terus Meningkatkan

Salah satu faktor penentu untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk adalah pelayanan kesehatan. Indikator yang dapat mengukur pelayanan kesehatan adalah ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan. Pemerintah sendiri telah menjamin penyediaan fasilitas kesehatan dalam Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Oleh sebab itu faktor kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus terus diupayakan dalam rangka membangun kesehatan masyarakat. Akses terhadap fasilitas kesehatan ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas fasilitas kesehatan (Ridwan dan Saftarina, 2015).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DIY jumlah fasilitas kesehatan meningkat selama periode 2011-2018. Di Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah penduduk 736.210 orang, hanya ada 5 rumah sakit. Ini berarti secara rata-rata 1 rumah sakit melayani 147.242 orang. Di lain pihak, terdapat 30 rumah sakit di Kabupaten Sleman dan 20 rumah sakit di Kabupaten Bantul. Meski jumlah penduduk lebih banyak, namun kedua wilayah ini mempunyai luas wilayah yang jauh lebih sempit daripada Kabupaten Gunungkidul. Artinya dari sisi keterjangkauan fasilitas kesehatan rumah sakit di Kabupaten Gunungkidul lebih sulit karena jarak selain beban pasien yang harus ditangani.

Perilaku Hidup Sehat Masih Kurang

Perilaku hidup sehat sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat. Dalam teori Blum (1974), perilaku sehat menyumbang 30 persen dalam mengukur derajat kesehatan manusia. Salah satu contoh perilaku sehat adalah tidak merokok. Bahaya rokok bagi kesehatan sangat besar karena mengandung nikotin. Menurut Sue Armstrong (1991), nikotin merupakan bahan kimia yang tidak berwarna dan merupakan salah satu racun paling keras. Dalam jumlah besar, nikotin sangat berbahaya, yaitu antara 20 mg sampai 50 mg nikotin dapat menyebabkan terhentinya pernapasan. Selain nikotin, rokok juga mengandung karbon monoksida dan tar yang berbahaya bagi kesehatan (Mandagi, 1996). Tidak hanya kandungan zatnya, asap rokok juga berbahaya karena mengandung polutan bagi manusia dan

lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, seseorang yang merokok tidak hanya membahayakan dirinya namun juga orang-orang sekitarnya yang umum disebut perokok pasif.

Berdasarkan data Susenas 2017, penduduk DIY yang merokok sekitar 19,41 persen, dan sebagian besar merokok setiap hari (sekitar 16,95 persen). Angka merokok ini akan lebih besar di wilayah perdesaan (21,42%) dibandingkan dengan di perkotaan (18,56%). Gambaran ini menunjukkan pola hidup sehat di perkotaan sedikit lebih baik dibandingkan di perdesaan. Meskipun hanya sekitar seperlima penduduk di DIY yang merokok, namun dampaknya tidak hanya pada penduduk yang merokok tetapi juga kepada penduduk di sekitarnya.

Perilaku kebiasaan merokok dapat menular ke anak-anak. Menurut Jeanne (1996) biasanya orang mulai merokok karena orang lain merokok. Hal ini akan berdampak sangat cepat menyerang anak-anak karena mencontoh orang di sekelilingnya, yaitu orang tua, saudara, dan teman-temannya. Oleh sebab itu, anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi dari kebiasaan merokok agar mereka terhindar dari berbagai penyakit di kemudian hari. Regulasi yang ketat terhadap penggunaan rokok harus diterapkan agar penggunaan rokok dapat lebih terawasi.

Gizi Ibu dan Anak Harus terus Ditingkatkan

Gizi memegang peranan yang sangat penting dalam kesehatan. Gizi yang seimbang akan memastikan tumbuh kembang penduduk yang berkualitas. Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah memprioritaskan gizi terhadap ibu dan balita. Untuk memastikan balita mendapatkan gizi yang cukup, pemerintah menargetkan dua indikator, yaitu prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita dan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek).

Saat ini, kasus anak balita kurang gizi di DIY tercatat 8.620 kasus (Dataku-Bappeda DIY, 2018). Sementara itu, prevalensi stunting saat ini terdapat 19,8 persen (krjogja.com). Artinya, satu dari lima balita di DIY memiliki tinggi badan yang tidak normal sesuai umurnya. Meskipun demikian, angka ini telah melebihi standar WHO meskipun masih cukup besar. Namun, upaya untuk terus menekan prevalensi stunting harus terus dilakukan agar manusia di kemudian hari semakin berkualitas.

Peningkatan Standar Hidup Layak

Pengurangan Kemiskinan Terus Ditingkatkan

Kapabilitas seseorang dalam ekonomi seringkali terbentur oleh kemiskinan. Faktor kemiskinan dapat menghambat berbagai aspek dalam kehidupan diantaranya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, padahal kedua aspek tersebut merupakan kapabilitas dasar dalam pembangunan manusia. Sayangnya menanggulangi kemiskinan bukan perkara yang mudah karena terkait dengan berbagai dimensi kehidupan yang saling berpengaruh satu sama lain.

Selama periode 2011 hingga 2019, jumlah maupun persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan cenderung berkurang. Namun demikian, pergerakan kedua indikator tersebut belum secepat yang diharapkan, terlebih lagi jika melihat perbandingan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan yang masih terlihat sangat berbeda. Pada Maret 2019, tercatat sebanyak 13,89 persen penduduk miskin di perdesaan dan hanya sekitar 10,89 persen yang berada di perkotaan.

Lambatnya penurunan kemiskinan juga didukung oleh kondisi stagnan dalam ketimpangan pengeluaran penduduk yang dicerminkan oleh gini rasio. Gini rasio DIY cenderung tidak berubah dari tahun 2015 hingga 2018, walaupun turun cenderung lambat dengan ketimpangan yang lebih tinggi di wilayah perkotaan dibanding wilayah perdesaan. Sementara itu, menurut paradigma yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1989) dalam UNDP (1996), pembangunan manusia adalah perluasan kebebasan yang nyata yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan salah satunya bergantung pada faktor ekonomi yang di dalamnya terkandung makna adanya kesetaraan atau pemerataan (UNDP, 1996).

Penurunan Pengangguran Harus Terus Ditingkatkan

Penurunan kemiskinan yang kurang cepat pada tahun 2018 juga dibarengi dengan penurunan pengangguran yang belum optimal. Pada Agustus 2018, tingkat pengangguran terbuka di DIY mencapai 3,35 persen. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2018 lebih tinggi dibanding Agustus 2017. Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat kemiskinan dan pengangguran saling berkaitan satu sama lain. Pengangguran mengurangi pendapatan yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Sebaliknya, kemiskinan akan menjerat seseorang dalam lingkaran setan sehingga membatasi

kapabilitas seseorang untuk menciptakan output yang bernilai ekonomi akibat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Dari penganggur pada Agustus 2018, mayoritas penganggur berpendidikan SMA atau sederajat. Penganggur yang belum pernah sekolah atau belum tamat SD lebih sedikit dibandingkan penganggur yang pernah mengenyam bangku kuliah. Dengan melihat fenomena ini maka terlihat adanya mismatch atau ketidaksesuaian antara profil lulusan perguruan tinggi dengan kualifikasi tenaga kerja siap pakai yang dibutuhkan pasar kerja. Sistem pendidikan perguruan tinggi dan pilihan jurusan seharusnya menyesuaikan kebutuhan, terlebih lagi tantangan dalam perekonomian global akan memperberat daya saing tenaga kerja dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Berdasarkan gambaran pembangunan manusia di DIY, perencanaan pembangunan diharapkan dapat memperbaiki kualitas dari determinan variabel setiap komponen IPM sehingga target dan sasaran yang ingin dicapai lebih fokus dan tetap sasaran. Beberapa hal yang diutamakan untuk dilaksanakan dengan pertimbangan upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan guna mendongkrak determinan variabel angka harapan hidup, dengan menurunkan angka kesakitan serta menghilangkan kasus kekurangan gizi pada balita melalui: pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta sadar gizi; mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama bagi keluarga miskin; meningkatkan pembiayaan kesehatan melalui APBD untuk menjamin pembiayaan kesehatan rakyat miskin; memperluas pelayanan kesehatan sampai ke pelosok melalui sistem monitoring dan informasi kesehatan untuk menangani secara cepat pada saat terjadi kasus-kasus yang mengancam kesehatan masyarakat.
2. Realisasi anggaran pendidikan dari APBD seyogyanya difokuskan kepada tiga permasalahan mendasar yaitu belum meratanya pelayanan pendidikan, masih besarnya sekolah yang tidak layak, dan pengelolaan pendidikan yang belum optimal.
3. Daya beli masyarakat secara mendasar dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga. Relatif masih rendahnya kualitas hidup masyarakat di perdesaan perlu langkah terobosan untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi di perdesaan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Mengembangkan usaha pertanian supaya lebih produktif, memberdayakan industri kecil dan mendorong para investor khususnya dari

kalangan swasta, untuk turut berperan serta pada proses pembangunan pada daerah-daerah yang kurang berkembang merupakan hal yang perlu dilakukan.

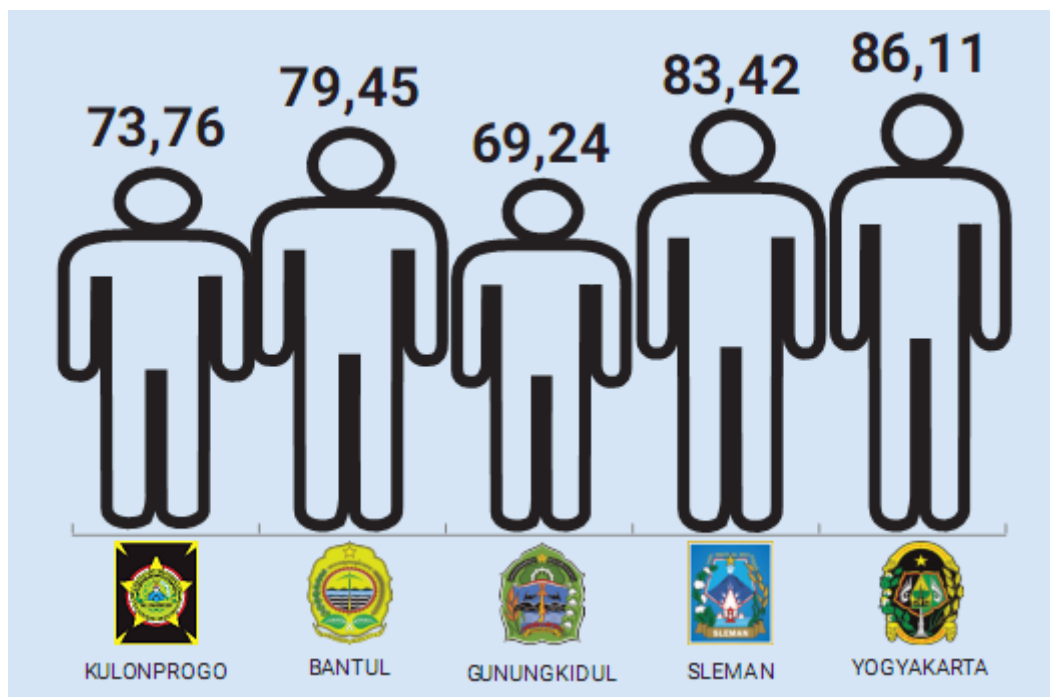
DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, U.F., 2008. Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah. UI Press, Jakarta.
- Armstrong, Sue. 1991. Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan. Arcan, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Indeks Pembangunan Manusia 2017. Jakarta: CV. Rioma
- _____. 2019. Statistik Indonesia 2018. Jakarta: BPS.
- _____. 2014. Sosialisasi IPM Metode Baru. Jakarta: BPS.
- _____. 2014. Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. 2019. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2019. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY
- _____. 2019. Indeks Pembangunan Manusia 2018 Provinsi DIY. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY
- _____. 2018. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DIY 2018. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY
- _____. 2018. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi DIY 2017. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY
- Badan Pusat Statistik Kulonprogo. 2019. Kabupaten Kulonprogo Dalam Angka. Wates. BPS Kabupaten Kulonprogo
- Badan Pusat Statistik Sleman. 2019. Kabupaten Sleman Dalam Angka. Sleman. BPS Kabupaten Sleman
- Bappenas. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Buku I. Jakarta: Bappenas.
- _____. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Buku II. Jakarta:
- Bappenas. Istiqomah, Umi. 2003. Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok. Setiaji, Jakarta.
- Kasnodihardjo. 1997. Gambaran Perilaku Penduduk Mengenai Kesehatan
- Barro, Robert J. & Lee, Jong-Wha, 1993. "International comparisons of educational attainment," *Journal of Monetary Economics*, Elsevier, vol. 32(3), pages 363-394, December.
- Blum, Henrik L. 1974. Planning for Health: Development and Application of Social Change Theory. Human Sciences Press. New York.
- Kementrian Kesehatan RI. 2015. Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Jakarta.
- Mandagi, Jeanne. 1996. Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya serta Penanggulangannya. Bina Darma Pemuda Printing, Jakarta.
- Notoatmodjo, Sukidjo. 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Rineka Cipta, Jakarta.
- Pemda DIY. 2018. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022. Yogyakarta

- Pusdatin Kemenkes. 2018. Profil Kesehatan Indonesia 2017. Jakarta: Pusdatin Kemenkes
- Ramirez, A. Ranis, G. Dan Steward, F. 1998. Working Paper: Economic Growth and Human Development. UNDP
- Rao, DS Prasada. 2001. Integration of CPI and PPP: Methodological Issues, Feasibility and Recommendations. Joint World Bank-OECD Seminar on Purchasing Power Parities Recent Advances in Methods and Applications. Washington D.C. 30 January-2 February 2001.
- Ridwan, Ivani, Fitria Saftarina. 2015. Pelayanan Fasilitas Kesehatan: Faktor Kepuasan dan Loyalitas Pasien. Abstrak Majority Volume 4 Nomor 9 Desember 2015.
- Said, Nusa Idaman. 1999. Kesehatan Masyarakat Dan Teknologi Peningkatan Kualitas Air. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Sekretariat Sdg2030indonesia. 2017. Sustainable Development Goals. <https://www.sdg2030indonesia.org/>. Diakses tanggal 26 Agustus 2019. Jakarta.
- Stanton, EA. 2007. The Human Development Index: A History. Working paper series no 127. Political Economy Research Institute. University of Massachusetts-Amherst, Amherst MA.
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Alih Bahasa: Haris Munandar dan Puji A.L.). Edisi Kedelapan. Jakarta. Erlangga.
- UNDP, BPS, dan Bappenas. 2001. Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001: Demokrasi dan Pembangunan Manusia.
- _____. 2004. Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004: Ekonomi dari Demokrasi.
- United Nations Development Programme. 1990. Human Development Report. New York: UNDP.
- _____. 1996. Human Development Report. New York: UNDP.
- _____. 2016. Human Development Report. New York: UNDP.

LAMPIRAN

IPM Menurut Kabupaten/kota



Tabel Lampiran 1

Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (EMS), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), Daya Beli (PPP), Indeks Penyusun IPM dan IPM, serta Rangking Menurut Kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013 dan 2018

No	Kecamatan	AHH 2013	EMYS 2013	MYS25+ 2013	PPP 2013	Indeks AHH	Indeks EMYS	Indeks MYS	Indeks sekolah	Indeks PPP	IPM 2013	Rang- king IPM	AHH 2018	EMS 2018	MYS 2018	PPP 2018	Indeks AHH	Indeks EMYS	Indeks MYS	Indeks sekolah	Indeks PPP	IPM 2018	Rang- king IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
3401010	TEMON	74,48	13,22	9,13	8.474	83,82	73,45	60,90	67,17	65,08	71,56	2	75,02	13,60	9,74	12.857	84,65	75,58	64,95	70,27	77,82	77,35	2
3401020	WATES	75,68	13,40	9,50	8.477	85,66	74,44	63,34	68,89	65,09	72,69	1	76,23	13,79	9,56	12.862	86,51	76,60	63,76	70,18	77,83	77,89	1
3401030	PANJATAN	75,43	12,91	8,34	8.465	85,28	71,72	55,60	63,66	65,04	70,68	6	75,87	13,56	9,94	10.381	85,96	75,36	66,28	70,82	71,28	75,71	3
3401040	GALUR	73,99	13,88	8,32	8.467	83,06	77,10	55,47	66,29	65,05	71,02	3	74,53	14,82	8,89	9.328	83,89	82,34	59,25	70,79	68,01	73,92	5
3401050	LEDAH	74,70	12,87	7,12	8.478	84,15	71,50	47,48	59,49	65,09	68,81	9	75,24	14,10	7,86	9.834	84,99	78,32	52,43	65,37	69,62	72,86	6
3401060	SENTOLO	74,25	12,85	7,61	8.466	83,46	71,38	50,75	61,06	65,05	69,21	8	74,89	13,67	8,50	8.607	84,45	75,95	56,63	66,29	65,55	71,60	9
3401070	PENGASIH	74,88	13,69	8,15	8.470	84,43	76,03	54,35	65,19	65,06	71,01	4	75,42	14,99	9,38	9.484	85,27	83,28	62,54	72,91	68,52	75,24	4
3401080	KOKAP	71,43	12,47	7,17	8.465	79,12	69,27	47,82	58,54	65,04	67,04	12	72,03	13,66	7,55	8.606	80,05	75,87	50,33	63,10	65,55	69,18	12
3401090	GIRIMULYO	75,14	12,19	7,28	8.464	84,83	67,71	48,54	58,13	65,04	68,45	10	75,91	13,15	7,28	8.605	86,01	73,07	48,54	60,81	65,54	69,99	10
3401100	NANGGULAN	75,99	13,20	8,02	8.466	86,14	73,35	53,49	63,42	65,05	70,83	5	76,54	13,92	8,17	8.607	86,99	77,32	54,48	65,90	65,55	72,16	7
3401110	KALIBAWANG	74,37	13,03	7,72	8.466	83,65	72,39	51,48	61,94	65,05	69,59	7	75,01	14,72	7,75	8.607	84,64	81,79	51,68	66,74	65,55	71,81	8
3401120	SAMIGALUH	71,68	12,30	7,86	8.458	79,50	68,32	52,38	60,35	65,02	67,82	11	72,71	12,65	8,57	8.599	81,09	70,30	57,16	63,73	65,52	69,70	11
3401000	KULONPROGO	74,89	13,00	8,02	8.468	84,45	72,22	53,47	62,84	65,05	70,15		75,12	14,24	8,65	9.698	84,80	79,11	57,67	68,39	69,20	73,76	

Tabel Lampiran 1

Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (EMS), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), Daya Beli (PPP), Indeks Penyusun IPM dan IPM, serta Rangking Menurut Kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013 dan 2018

No	Kecamatan	AHH 2013	EMYS 2013	MYS25+ 2013	PPP 2013	Indeks AHH	Indeks EMYS	Indeks MYS	Indeks sekolah	Indeks PPP	IPM 2013	Rang- king IPM	AHH 2018	EMS 2018	MYS 2018	PPP 2018	Indeks AHH	Indeks EMYS	Indeks MYS	Indeks sekolah	Indeks PPP	IPM 2018	Rang- king IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
3402010	SRANDAKAN	72,73	14,30	8,58	13.872	81,12	79,42	57,23	68,33	80,14	76,30	10	72,76	14,75	9,60	14.103	81,17	81,95	63,98	72,97	80,64	78,17	12
3402020	SANDEN	72,31	14,82	8,94	13.888	80,48	82,35	59,59	70,97	80,17	77,08	7	73,67	15,04	10,09	17.347	82,57	83,55	67,27	75,41	86,97	81,51	6
3402030	KRETEK	72,16	14,38	8,98	13.908	80,24	79,90	59,86	69,88	80,22	76,62	9	72,68	14,59	9,48	15.392	81,05	81,06	63,20	72,13	83,32	78,68	11
3402040	PUNDONG	73,14	13,69	7,88	13.877	81,75	76,03	52,52	64,28	80,15	74,96	13	73,67	13,88	8,66	16.092	82,57	77,14	57,73	67,43	84,67	77,83	13
3402050	BAMBANG LIPURO	73,47	14,33	8,74	13.879	82,25	79,59	58,27	68,93	80,15	76,88	8	74,76	15,92	9,52	13.926	84,24	88,42	63,47	75,95	80,26	80,08	9
3402060	PANDAK	72,92	13,98	8,01	13.885	81,42	77,66	53,40	65,53	80,16	75,35	12	73,45	15,85	9,01	13.931	82,23	88,05	60,04	74,04	80,27	78,77	10
3402070	BANTUL	73,04	14,61	9,90	13.902	81,59	81,14	65,98	73,56	80,20	78,37	6	73,57	14,82	10,43	18.224	82,41	82,32	69,55	75,93	88,48	82,11	5
3402080	JETIS	71,75	14,08	8,46	13.884	79,61	78,22	56,40	67,31	80,16	75,45	11	72,27	14,28	9,94	18.202	80,41	79,35	66,28	72,82	88,44	80,30	8
3402090	IMOGIRI	73,66	13,43	7,07	13.898	82,55	74,59	47,13	60,86	80,20	73,86	14	73,94	14,98	7,07	16.153	82,99	83,24	47,13	65,19	84,79	77,12	15
3402100	DLINGO	74,99	11,99	6,40	13.872	84,60	66,61	42,68	54,65	80,14	71,82	17	75,53	12,73	7,08	13.918	85,44	70,71	47,17	58,94	80,24	73,93	17
3402110	PLERET	68,55	13,56	8,11	13.883	74,69	75,34	54,08	64,71	80,16	72,90	16	69,83	13,94	9,66	15.758	76,66	77,43	64,39	70,91	84,03	77,02	16
3402120	PIYUNGAN	75,95	14,36	9,18	13.889	86,08	79,77	61,17	70,47	80,17	78,64	4	76,66	15,83	9,18	13.935	87,17	87,94	61,17	74,56	80,28	80,50	7
3402130	BANGUNTAPAN	72,46	16,54	11,03	13.920	80,71	91,88	73,55	82,72	80,24	81,22	2	73,27	16,78	11,03	14.828	81,95	93,21	73,55	83,38	82,17	82,50	3
3402140	SEWON	73,21	16,20	10,24	13.916	81,86	89,99	68,26	79,12	80,23	80,40	3	74,57	16,43	10,52	17.569	83,96	91,30	70,12	80,71	87,36	83,96	2
3402150	KASIHAN	75,68	16,05	10,27	13.917	85,67	89,15	68,44	78,80	80,24	81,51	1	76,12	16,57	10,27	18.244	86,34	92,07	68,44	80,26	88,51	84,96	1
3402160	PAJANGAN	72,28	12,93	7,34	13.873	80,43	71,85	48,95	60,40	80,14	73,02	15	73,62	14,62	9,02	13.919	82,50	81,20	60,11	70,65	80,24	77,62	14
3402170	SEDAYU	74,81	14,72	9,11	13.897	84,33	81,77	60,73	71,25	80,19	78,40	5	75,52	14,93	10,93	15.380	85,41	82,96	72,84	77,90	83,29	82,14	4
3402000	BANTUL	73,22	14,35	8,72	13.902	81,88	79,72	58,13	68,93	80,20	76,78		73,66	15,03	9,35	15.386	82,55	83,50	62,33	72,92	83,30	79,45	

Tabel Lampiran 1

Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (EMS), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), Daya Beli (PPP), Indeks Penyusun IPM dan IPM, serta Rangking Menurut Kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013 dan 2018

No	Kecamatan	AHH 2013	EMYS 2013	MYS25+ 2013	PPP 2013	Indeks AHH	Indeks EMYS	Indeks MYS	Indeks sekolah	Indeks PPP	IPM 2013	Rang- king IPM	AHH 2018	EMS 2018	MYS 2018	PPP 2018	Indeks AHH	Indeks EMYS	Indeks MYS	Indeks sekolah	Indeks PPP	IPM 2018	Rang- king IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
3403010	PANGGANG	72,79	12,00	5,53	8.193	81,22	66,66	36,88	51,77	64,04	64,58	15	74,12	12,20	5,53	9.321	83,27	67,77	36,88	52,32	67,99	66,66	15
3403011	PURWOSARI	71,78	12,23	5,84	8.205	79,66	67,96	38,96	53,46	64,09	64,86	14	72,43	12,44	6,58	8.554	80,67	69,09	43,84	56,47	65,36	66,77	14
3403020	PALIYAN	71,54	12,46	6,00	8.210	79,29	69,25	39,99	54,62	64,11	65,24	11	72,31	12,67	7,03	8.559	80,48	70,40	46,85	58,63	65,38	67,57	12
3403030	SAPTO SARI	71,09	11,29	4,48	8.198	78,60	62,70	29,87	46,29	64,07	61,54	18	71,74	12,69	5,20	8.547	79,60	70,53	34,70	52,61	65,34	64,92	18
3403040	TEPUS	74,23	11,18	5,54	8.188	83,44	62,09	36,95	49,52	64,03	64,20	16	74,91	11,36	5,85	8.536	84,48	63,13	38,97	51,05	65,30	65,55	16
3403041	TANJUNGSARI	74,64	12,07	5,24	8.195	84,07	67,06	34,95	51,01	64,05	65,00	12	75,33	12,49	6,05	9.246	85,12	69,38	40,33	54,86	67,74	68,14	9
3403050	RONGKOP	73,81	12,82	6,28	8.198	82,79	71,21	41,87	56,54	64,06	66,93	8	74,48	13,03	6,28	8.547	83,82	72,40	41,87	57,13	65,34	67,89	10
3403051	GIRISUBO	76,30	12,27	5,67	8.197	86,62	68,18	37,78	52,98	64,06	66,49	9	76,99	12,48	5,67	9.283	87,68	69,32	37,78	53,55	67,86	68,30	8
3403060	SEMANU	72,51	11,90	5,96	8.201	80,78	66,11	39,71	52,91	64,07	64,94	13	72,86	12,10	6,74	9.238	81,32	67,21	44,94	56,08	67,72	67,59	11
3403070	PONJONG	72,90	12,99	6,88	8.199	81,38	72,19	45,86	59,03	64,07	67,52	5	72,99	13,21	7,38	8.548	81,52	73,40	49,17	61,29	65,34	68,86	6
3403080	KARANGMOJO	72,79	13,35	7,54	8.205	81,22	74,14	50,28	62,21	64,09	68,67	3	74,12	13,57	7,62	8.554	83,27	75,37	50,78	63,08	65,36	70,02	3
3403090	WONOSARI	75,33	13,43	8,41	8.213	85,13	74,61	56,07	65,34	64,12	70,92	1	75,87	13,65	9,63	13.052	85,95	75,85	64,22	70,04	78,28	77,82	1
3403100	PLAYEN	72,23	13,35	7,83	8.199	80,35	74,16	52,21	63,19	64,07	68,77	2	72,89	13,57	8,13	10.639	81,37	75,40	54,19	64,79	72,03	72,42	2
3403110	PATUK	71,91	12,63	7,48	8.193	79,86	70,15	49,87	60,01	64,05	67,45	6	72,57	12,84	7,48	9.732	80,88	71,32	49,87	60,59	69,31	69,77	5
3403120	GEDANG SARI	69,07	11,95	4,98	8.203	75,49	66,39	33,22	49,81	64,08	62,23	17	70,14	12,15	6,34	8.551	77,14	67,49	42,25	54,87	65,35	65,16	17
3403130	NGLIPAR	70,64	12,98	6,49	8.199	77,91	72,11	43,25	57,68	64,07	66,03	10	70,76	13,20	6,87	8.548	78,09	73,31	45,80	59,55	65,34	67,23	13
3403140	NGAWEN	76,49	13,11	5,77	8.190	86,90	72,83	38,46	55,64	64,03	67,65	4	77,18	13,33	5,87	8.538	87,97	74,04	39,15	56,59	65,31	68,76	7
3403150	SEMIN	74,99	12,82	6,03	8.195	84,61	71,20	40,20	55,70	64,05	67,08	7	75,62	13,29	6,80	8.943	85,57	73,82	45,34	59,58	66,72	69,81	4
3403000	GUNUNGKIDUL	73,38	12,49	6,22	8.202	82,12	69,39	41,47	55,43	64,08	66,32		73,92	12,95	7,00	9.163	82,95	71,94	46,67	59,31	67,46	69,24	

Tabel Lampiran 1

Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (EMS), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), Daya Beli (PPP), Indeks Penyusun IPM dan IPM, serta Rangking Menurut Kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013 dan 2018

No	Kecamatan	AHH 2013	EMYS 2013	MYS25+ 2013	PPP 2013	Indeks AHH	Indeks EMYS	Indeks MYS	Indeks sekolah	Indeks PPP	IPM 2013	Rang- king IPM	AHH 2018	EMS 2018	MYS 2018	PPP 2018	Indeks AHH	Indeks EMYS	Indeks MYS	Indeks sekolah	Indeks PPP	IPM 2018	Rang- king IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
3404010	MOYUDAN	72,40	15,56	10,07	14.046	80,61	86,43	67,15	76,79	80,52	79,28	8	72,88	15,58	10,56	16.028	81,35	86,58	70,37	78,48	84,55	81,42	8
3404020	MINGGIR	69,54	15,26	8,89	14.071	76,21	84,79	59,24	72,02	80,57	76,19	15	70,01	15,29	11,11	15.204	76,93	84,94	74,04	79,49	82,94	79,75	13
3404030	SEYEGAN	74,30	14,33	8,92	14.055	83,54	79,62	59,45	69,54	80,54	77,63	11	74,51	14,54	9,36	15.188	83,86	80,77	62,43	71,60	82,91	79,25	14
3404040	GODEAN	74,06	14,77	10,17	14.064	83,17	82,08	67,79	74,93	80,56	79,48	7	74,55	14,99	10,54	15.197	83,92	83,28	70,24	76,76	82,92	81,14	9
3404050	GAMPING	74,29	15,40	10,74	14.063	83,53	85,54	71,58	78,56	80,56	80,86	6	74,89	16,18	10,79	15.196	84,45	89,91	71,96	80,93	82,92	82,76	6
3404060	MLATI	75,71	17,73	10,99	14.100	85,70	98,52	73,29	85,91	80,63	84,05	2	76,32	17,77	10,99	17.626	86,65	98,70	73,29	86,00	87,46	86,70	2
3404070	DEPOK	76,65	18,00	12,38	14.112	87,16	100,00	82,54	91,27	80,66	86,25	1	77,27	18,00	12,38	20.506	88,11	100,00	82,54	91,27	92,08	90,47	1
3404080	BERBAH	70,89	14,48	9,97	14.080	78,30	80,47	66,44	73,46	80,59	77,39	12	71,38	15,82	10,66	15.215	79,04	87,88	71,07	79,47	82,96	80,47	11
3404090	PRAMBANAN	69,33	13,41	8,27	14.047	75,89	74,51	55,15	64,83	80,52	73,45	17	70,46	15,12	8,70	15.178	77,63	83,99	57,99	70,99	82,89	77,01	17
3404100	KALASAN	75,94	15,49	10,64	14.080	86,07	86,03	70,96	78,50	80,59	81,66	5	76,56	16,70	11,14	15.214	87,01	92,79	74,25	83,52	82,96	84,48	4
3404110	NGEMPLAK	75,15	17,27	10,80	14.088	84,84	95,97	71,99	83,98	80,61	83,12	4	75,76	17,30	10,80	15.223	85,78	96,14	71,99	84,06	82,98	84,27	5
3404120	NGAGLIK	75,28	16,59	11,63	14.113	85,04	92,15	77,51	84,83	80,66	83,49	3	75,77	16,62	11,63	17.642	85,80	92,31	77,51	84,91	87,48	86,06	3
3404130	SLEMAN	72,53	14,69	10,29	14.058	80,82	81,61	68,59	75,10	80,54	78,78	10	73,71	14,72	10,64	15.190	82,64	81,75	70,92	76,34	82,91	80,57	10
3404140	TEMPEL	73,31	14,24	9,04	14.036	82,02	79,13	60,24	69,68	80,50	77,20	13	73,80	14,40	9,04	15.166	82,76	79,99	60,24	70,11	82,86	78,34	15
3404150	TURI	71,50	14,60	9,28	14.035	79,23	81,13	61,88	71,50	80,49	76,97	14	71,98	16,45	9,82	15.166	79,97	91,39	65,45	78,42	82,86	80,39	12
3404160	PAKEM	73,13	15,00	9,85	14.076	81,74	83,34	65,69	74,52	80,58	78,88	9	73,62	15,09	11,39	15.210	82,49	83,83	75,96	79,89	82,95	81,77	7
3404170	CANGKRINGAN	73,38	13,63	8,59	14.066	82,12	75,71	57,24	66,48	80,56	76,05	16	73,88	13,66	8,59	15.199	82,89	75,87	57,24	66,56	82,93	77,06	16
3404000	SLEMAN	74,47	15,52	10,03	14.085	83,80	86,22	66,87	76,54	80,60	80,26		74,69	16,71	10,66	15.844	84,14	92,83	71,07	81,95	84,20	83,42	

Tabel Lampiran 1

Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (EMS), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), Daya Beli (PPP), Indeks Penyusun IPM dan IPM, serta Rangking Menurut Kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013 dan 2018

No	Kecamatan	AHH 2013	EMYS 2013	MYS25+ 2013	PPP 2013	Indeks AHH	Indeks EMYS	Indeks MYS	Indeks sekolah	Indeks PPP	IPM 2013	Rang- king IPM	AHH 2018	EMS 2018	MYS 2018	PPP 2018	Indeks AHH	Indeks EMYS	Indeks MYS	Indeks sekolah	Indeks PPP	IPM 2018	Rang- king IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
3471010	MANTRIJERON	73,42	16,37	11,77	16.626	82,18	90,93	78,49	84,71	85,67	84,17	8	73,67	16,95	11,77	17.248	82,56	94,19	78,49	86,34	86,79	85,21	7
3471020	KRATON	73,85	16,25	12,12	16.645	82,84	90,30	80,80	85,55	85,71	84,69	5	73,86	16,84	12,12	17.267	82,86	93,53	80,80	87,17	86,83	85,60	5
3471030	MERGANGSAN	75,08	16,31	11,70	16.631	84,75	90,64	77,98	84,31	85,68	84,91	3	75,81	16,35	11,70	18.254	85,86	90,83	77,98	84,40	88,53	86,25	3
3471040	UMBULHARJO	72,38	16,75	11,70	16.662	80,59	93,07	77,99	85,53	85,74	83,92	9	73,07	16,79	11,84	17.627	81,65	93,27	78,95	86,11	87,46	85,04	9
3471050	KOTAGEDE	74,64	15,95	11,17	16.633	84,07	88,59	74,47	81,53	85,68	83,74	10	74,66	16,27	11,32	17.596	84,09	90,38	75,43	82,91	87,40	84,78	10
3471060	GONDOKUSUMAN	73,68	17,96	12,13	16.671	82,58	99,79	80,89	90,34	85,75	86,17	1	74,40	18,00	12,13	21.259	83,69	100,00	80,89	90,44	93,18	89,01	1
3471070	DANUREJAN	71,92	14,97	11,04	16.650	79,88	83,16	73,59	78,38	85,72	81,26	12	72,34	15,00	11,04	17.273	80,52	83,34	73,59	78,47	86,84	81,87	12
3471080	PAKUALAMAN	78,68	15,59	11,71	16.636	90,28	86,61	78,05	82,33	85,69	86,04	2	78,69	15,62	11,71	21.215	90,29	86,80	78,05	82,43	93,12	88,50	2
3471090	GONDONANAN	73,60	13,87	10,97	16.607	82,46	77,06	73,14	75,10	85,64	80,94	13	74,30	13,90	10,97	17.228	83,54	77,22	73,14	75,18	86,76	81,68	13
3471100	NGAMPILAN	78,44	15,25	11,08	16.617	89,91	84,73	73,89	79,31	85,65	84,84	4	78,46	15,28	11,72	17.244	89,94	84,91	78,14	81,52	86,79	86,01	4
3471110	WIROBRAJAN	75,04	16,51	11,23	16.633	84,68	91,70	74,85	83,28	85,68	84,54	6	75,50	16,54	11,23	17.438	85,39	91,90	74,85	83,37	87,13	85,28	6
3471120	GEDONG TENGEN	73,59	13,27	10,32	16.619	82,44	73,71	68,81	71,26	85,66	79,54	14	74,04	13,30	10,45	18.600	83,14	73,86	69,66	71,76	89,10	81,01	14
3471130	JETIS	75,76	15,94	11,07	16.624	85,78	88,55	73,80	81,18	85,67	84,18	7	76,48	15,97	11,21	17.245	86,90	88,74	74,71	81,73	86,79	85,10	8
3471140	TEGALREJO	72,93	15,56	11,03	16.638	81,44	86,43	73,51	79,97	85,69	82,33	11	73,38	15,59	11,56	17.260	82,13	86,61	77,10	81,85	86,82	83,57	11
3471000	YOGYAKARTA	74,05	15,89	11,36	16.645	83,15	88,28	75,73	82,01	85,71	83,61		74,45	17,05	11,44	18.629	83,77	94,72	76,27	85,49	89,15	86,11	
3400000	D.I. YOGYAKARTA	74,45	14,67	8,72	12.261	83,77	81,50	58,13	69,82	76,36	76,44		74,82	15,56	9,32	13.946	84,34	86,44	62,13	74,29	80,30	79,53	

Tabel Lampiran 2

**IPM dan Angka Pertumbuhan IPM per Tahun Menurut Kecamatan
di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013 dan 2018**

No	Kecamatan	IPM 2013	Rangking IPM 2018	IPM 2018	Rangking IPM 2018	Angka pertumbuhan per tahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3401010	TEMON	71,56	2	77,35	2	1,62
3401020	WATES	72,69	1	77,89	1	1,43
3401030	PANJATAN	70,68	6	75,71	3	1,42
3401040	GALUR	71,02	3	73,92	5	0,82
3401050	LENDAH	68,81	9	72,86	6	1,18
3401060	SENTOLO	69,21	8	71,60	9	0,69
3401070	PENGASIH	71,01	4	75,24	4	1,19
3401080	KOKAP	67,04	12	69,18	12	0,64
3401090	GIRIMULYO	68,45	10	69,99	10	0,45
3401100	NANGGULAN	70,83	5	72,16	7	0,38
3401110	KALIBAWANG	69,59	7	71,81	8	0,64
3401120	SAMIGALUH	67,82	11	69,70	11	0,55
3401000	KULONPROGO	70,15		73,76		1,03
3402010	SRANDAKAN	76,30	10	78,17	12	0,49
3402020	SANDEN	77,08	7	81,51	6	1,15
3402030	KRETEK	76,62	9	78,68	11	0,54
3402040	PUNDONG	74,96	13	77,83	13	0,77
3402050	BAMBANG LIPURO	76,88	8	80,08	9	0,83
3402060	PANDAK	75,35	12	78,77	10	0,91
3402070	BANTUL	78,37	6	82,11	5	0,95
3402080	JETIS	75,45	11	80,30	8	1,29
3402090	IMO GIRI	73,86	14	77,12	15	0,88
3402100	DLINGO	71,82	17	73,93	17	0,59
3402110	PLERET	72,90	16	77,02	16	1,13
3402120	PIYUNGAN	78,64	4	80,50	7	0,47

Tabel Lampiran 2

**IPM dan Angka Pertumbuhan IPM per Tahun Menurut Kecamatan
di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013 dan 2018**

No	Kecamatan	IPM 2013	Rangking IPM 2018	IPM 2018	Rangking IPM 2018	Angka pertumbuhan per tahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3402130	BANGUNTAPAN	81,22	2	82,50	3	0,32
3402140	SEWON	80,40	3	83,96	2	0,89
3402150	KASIHAN	81,51	1	84,96	1	0,85
3402160	PAJANGAN	73,02	15	77,62	14	1,26
3402170	SEDAYU	78,40	5	82,14	4	0,95
3402000	BANTUL	76,78		79,45		0,69
3403010	PANGGANG	64,58	15	66,66	15	0,65
3403011	PURWOSARI	64,86	14	66,77	14	0,59
3403020	PALIYAN	65,24	11	67,57	12	0,71
3403030	SAPTO SARI	61,54	18	64,92	18	1,10
3403040	TEPUS	64,20	16	65,55	16	0,42
3403041	TANJUNGSARI	65,00	12	68,14	9	0,96
3403050	RONGKOP	66,93	8	67,89	10	0,29
3403051	GIRISUBO	66,49	9	68,30	8	0,54
3403060	SEMANU	64,94	13	67,59	11	0,82
3403070	PONJONG	67,52	5	68,86	6	0,40
3403080	KARANGMOJO	68,67	3	70,02	3	0,39
3403090	WONOSARI	70,92	1	77,82	1	1,95
3403100	PLAYEN	68,77	2	72,42	2	1,06
3403110	PATUK	67,45	6	69,77	5	0,69
3403120	GEDANG SARI	62,23	17	65,16	17	0,94
3403130	NGLIPAR	66,03	10	67,23	13	0,36
3403140	NGAWEN	67,65	4	68,76	7	0,33
3403150	SEMIN	67,08	7	69,81	4	0,81
3403000	GUNUNGKIDUL	66,32		69,24		0,88

Tabel Lampiran 2

**IPM dan Angka Pertumbuhan IPM per Tahun Menurut Kecamatan
di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013 dan 2018**

No	Kecamatan	IPM 2013	Rangking IPM 2018	IPM 2018	Rangking IPM 2018	Angka pertumbuhan per tahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3404010	MOYUDAN	79,28	8	81,42	8	0,54
3404020	MINGGIR	76,19	15	79,75	13	0,94
3404030	SEYEGAN	77,63	11	79,25	14	0,42
3404040	GODEAN	79,48	7	81,14	9	0,42
3404050	GAMPING	80,86	6	82,76	6	0,47
3404060	MLATI	84,05	2	86,70	2	0,63
3404070	DEPOK	86,25	1	90,47	1	0,98
3404080	BERBAH	77,39	12	80,47	11	0,80
3404090	PRAMBANAN	73,45	17	77,01	17	0,97
3404100	KALASAN	81,66	5	84,48	4	0,69
3404110	NGEMPLAK	83,12	4	84,27	5	0,27
3404120	NGAGLIK	83,49	3	86,06	3	0,62
3404130	SLEMAN	78,78	10	80,57	10	0,46
3404140	TEMPEL	77,20	13	78,34	15	0,30
3404150	TURI	76,97	14	80,39	12	0,89
3404160	PAKEM	78,88	9	81,77	7	0,73
3404170	CANGKRINGAN	76,05	16	77,06	16	0,27
3404000	SLEMAN	80,26		83,42		0,79
3471010	MANTRIJERON	84,17	8	85,21	7	0,25
3471020	KRATON	84,69	5	85,60	5	0,21
3471030	MERGANGSAN	84,91	3	86,25	3	0,32
3471040	UMBULHARJO	83,92	9	85,04	9	0,27
3471050	KOTAGEDE	83,74	10	84,78	10	0,25
3471060	GONDOKUSUMAN	86,17	1	89,01	1	0,66
3471070	DANUREJAN	81,26	12	81,87	12	0,15

Tabel Lampiran 2**IPM dan Angka Pertumbuhan IPM per Tahun Menurut Kecamatan
di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013 dan 2018**

No	Kecamatan	IPM 2013	Rangking IPM 2018	IPM 2018	Rangking IPM 2018	Angka pertumbuhan per tahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3471080	PAKUALAMAN	86,04	2	88,50	2	0,57
3471090	GONDOMANAN	80,94	13	81,68	13	0,18
3471100	NGAMPILAN	84,84	4	86,01	4	0,28
3471110	WIROBRAJAN	84,54	6	85,28	6	0,18
3471120	GEDONG TENGEN	79,54	14	81,01	14	0,37
3471130	JETIS	84,18	7	85,10	8	0,22
3471140	TEGALREJO	82,33	11	83,57	11	0,30
3471000	YOGYAKARTA	83,61		86,11		0,60
3400000	D.I. YOGYAKARTA	76,44		79,53		0,81

Tabel Lampiran 3
IPM 2013 dengan Metode Lama dan Metode Baru per Kecamatan
di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kecamatan	IPM 2013 Metode Lama	IPM 2013 Metode Baru
(1)	(2)	(3)	(4)
3401010	TEMON	76,63	71,56
3401020	WATES	77,10	72,69
3401030	PANJATAN	75,63	70,68
3401040	GALUR	75,28	71,02
3401050	LEDAH	75,87	68,81
3401060	SENTOLO	75,02	69,21
3401070	PENGASIH	75,47	71,01
3401080	KOKAP	72,68	67,04
3401090	GIRIMULYO	75,09	68,45
3401100	NANGGULAN	76,35	70,83
3401110	KALIBAWANG	75,28	69,59
3401120	SAMIGALUH	73,02	67,82
3401000	KULONPROGO	75,95	70,15
3402010	SRANDAKAN	73,66	76,30
3402020	SANDEN	74,97	77,08
3402030	KRETEK	73,75	76,62
3402040	PUNDONG	75,78	74,96
3402050	BAMBANG LIPURO	75,11	76,88
3402060	PANDAK	74,05	75,35
3402070	BANTUL	76,30	78,37
3402080	JETIS	74,01	75,45
3402090	IMOGIRI	74,43	73,86
3402100	DLINGO	74,44	71,82
3402110	PLERET	70,82	72,90
3402120	PIYUNGAN	76,65	78,64
3402130	BANGUNTAPAN	76,80	81,22
3402140	SEWON	76,98	80,40
3402150	KASIHAN	78,41	81,51
3402160	PAJANGAN	73,29	73,02
3402170	SEDAYU	77,25	78,40
3402000	BANTUL	76,01	76,78
3403010	PANGGANG	70,66	64,58
3403011	PURWOSARI	70,33	64,86
3403020	PALIYAN	70,40	65,24
3403030	SAPTO SARI	68,40	61,54
3403040	TEPUS	71,39	64,20
3403041	TANJUNGSARI	71,61	65,00

Tabel Lampiran 3
IPM 2013 dengan Metode Lama dan Metode Baru per Kecamatan
di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kecamatan	IPM 2013 Metode Lama	IPM 2013 Metode Baru
(1)	(2)	(3)	(4)
3403050	RONGKOP	72,29	66,93
3403051	GIRISUBO	71,58	66,49
3403060	SEMANU	71,18	64,94
3403070	PONJONG	71,02	67,52
3403080	KARANGMOJO	72,67	68,67
3403090	WONOSARI	74,65	70,92
3403100	PLAYEN	73,68	68,77
3403110	PATUK	71,50	67,45
3403120	GEDANG SARI	67,17	62,23
3403130	NGLIPAR	68,67	66,03
3403140	NGAWEN	71,79	67,65
3403150	SEMIN	71,42	67,08
3403000	GUNUNGKIDUL	71,64	66,32
3404010	MOYUDAN	78,08	79,28
3404020	MINGGIR	75,53	76,19
3404030	SEYEGAN	78,10	77,63
3404040	GODEAN	79,06	79,48
3404050	GAMPING	79,15	80,86
3404060	MLATI	80,80	84,05
3404070	DEPOK	83,24	86,25
3404080	BERBAH	77,28	77,39
3404090	PRAMBANAN	73,16	73,45
3404100	KALASAN	80,90	81,66
3404110	NGEMPLAK	80,76	83,12
3404120	NGAGLIK	81,49	83,49
3404130	SLEMAN	77,24	78,78
3404140	TEMPEL	77,11	77,20
3404150	TURI	75,96	76,97
3404160	PAKEM	77,84	78,88
3404170	CANGKRINGAN	78,82	76,05
3404000	SLEMAN	79,97	80,26
3471010	MANTRIJERON	79,72	84,17
3471020	KRATON	79,98	84,69
3471030	MERGANGSAN	81,06	84,91
3471040	UMBULHARJO	80,07	83,92
3471050	KOTAGEDE	80,21	83,74
3471060	GONDOKUSUMAN	81,20	86,17

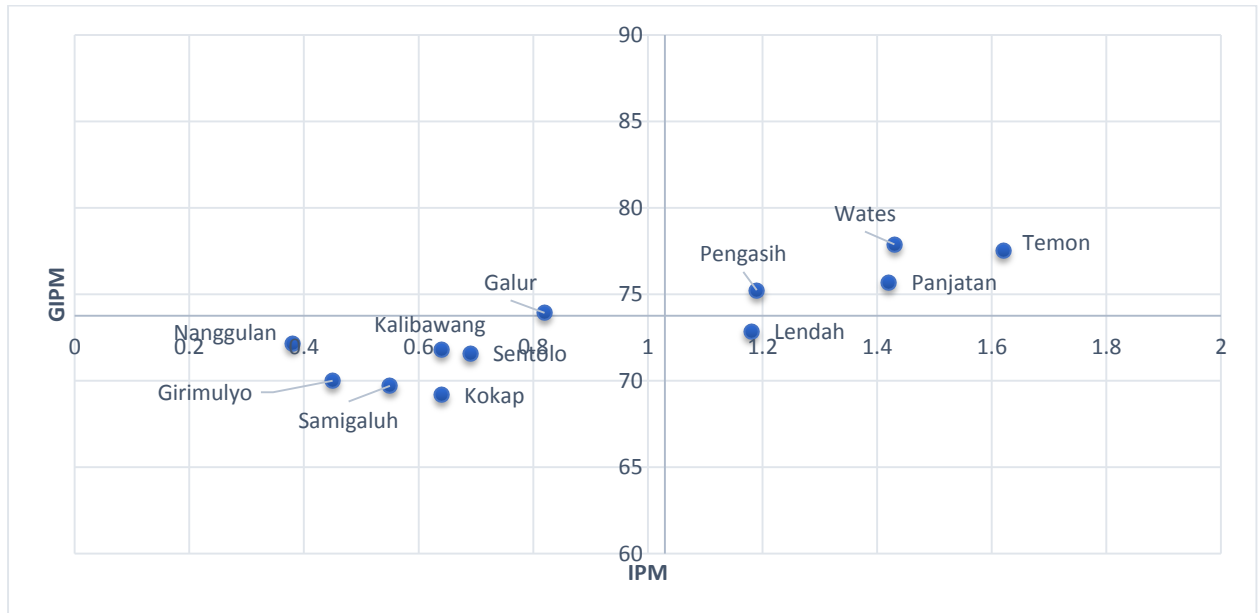
Tabel Lampiran 3
 IPM 2013 dengan Metode Lama dan Metode Baru per Kecamatan
 di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kecamatan	IPM 2013 Metode Lama	IPM 2013 Metode Baru
(1)	(2)	(3)	(4)
3471070	DANUREJAN	79,33	81,26
3471080	PAKUALAMAN	83,65	86,04
3471090	GONDOMANAN	79,76	80,94
3471100	NGAMPILAN	82,35	84,84
3471110	WIROBRAJAN	80,57	84,54
3471120	GEDONG TENGEN	78,81	79,54
3471130	JETIS	80,75	84,18
3471140	TEGALREJO	79,53	82,33
3471000	YOGYAKARTA	80,52	83,61
3400000	DIY	77,37	76,44

Tabel Lampiran 4

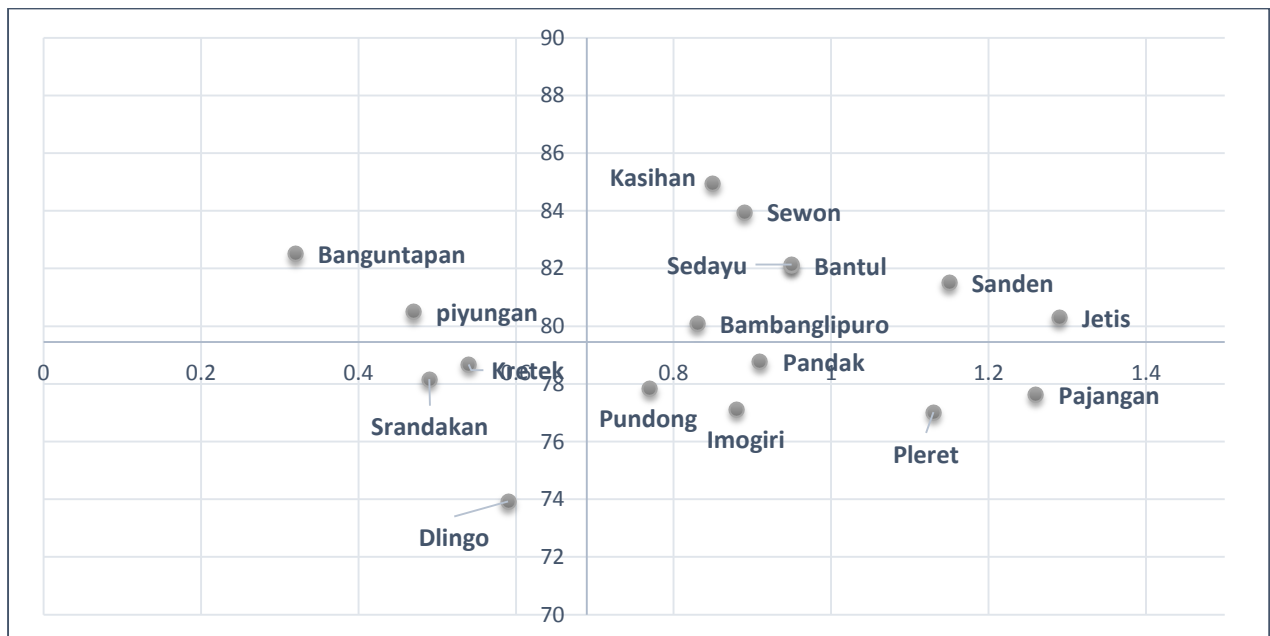
IPM Kabupaten Kulonprogo menurut Kecamatan dan Angka Pertumbuhan IPM

Tahun 2018

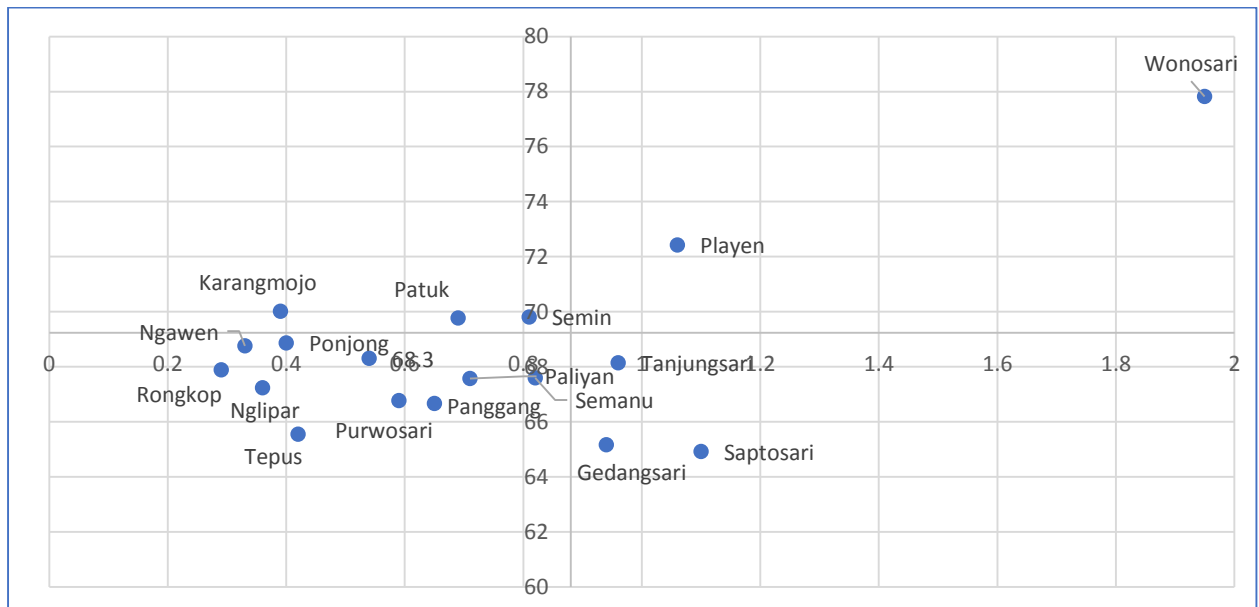


IPM Kabupaten Bantul menurut Kecamatan dan Angka Pertumbuhan IPM

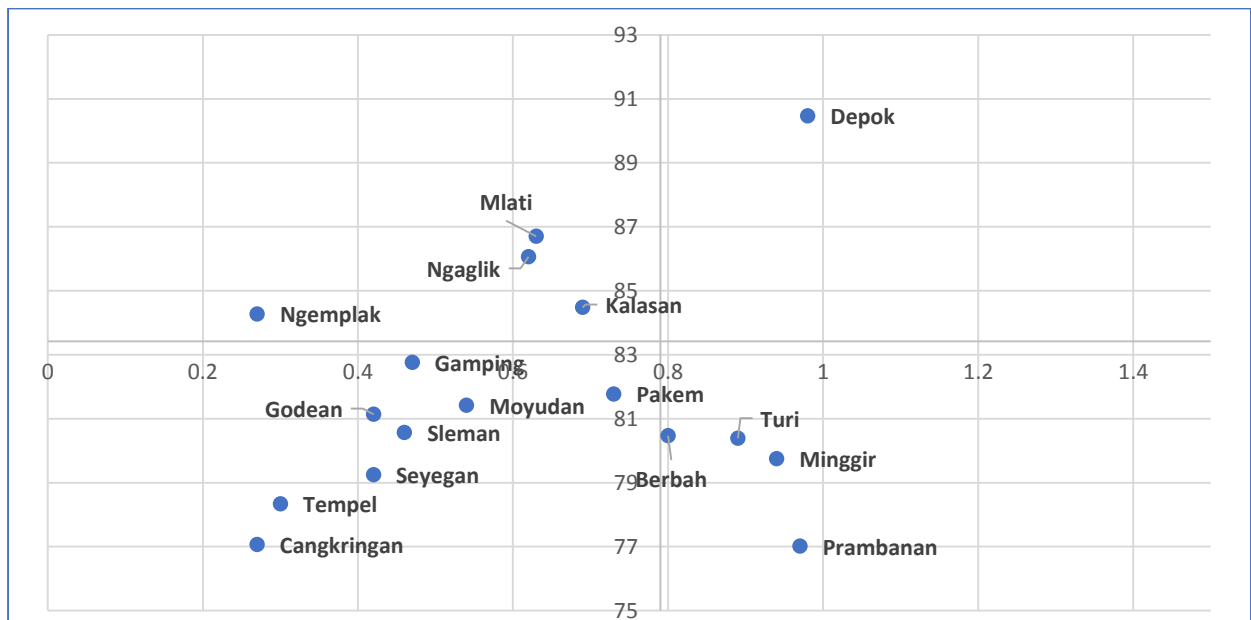
Tahun 2018



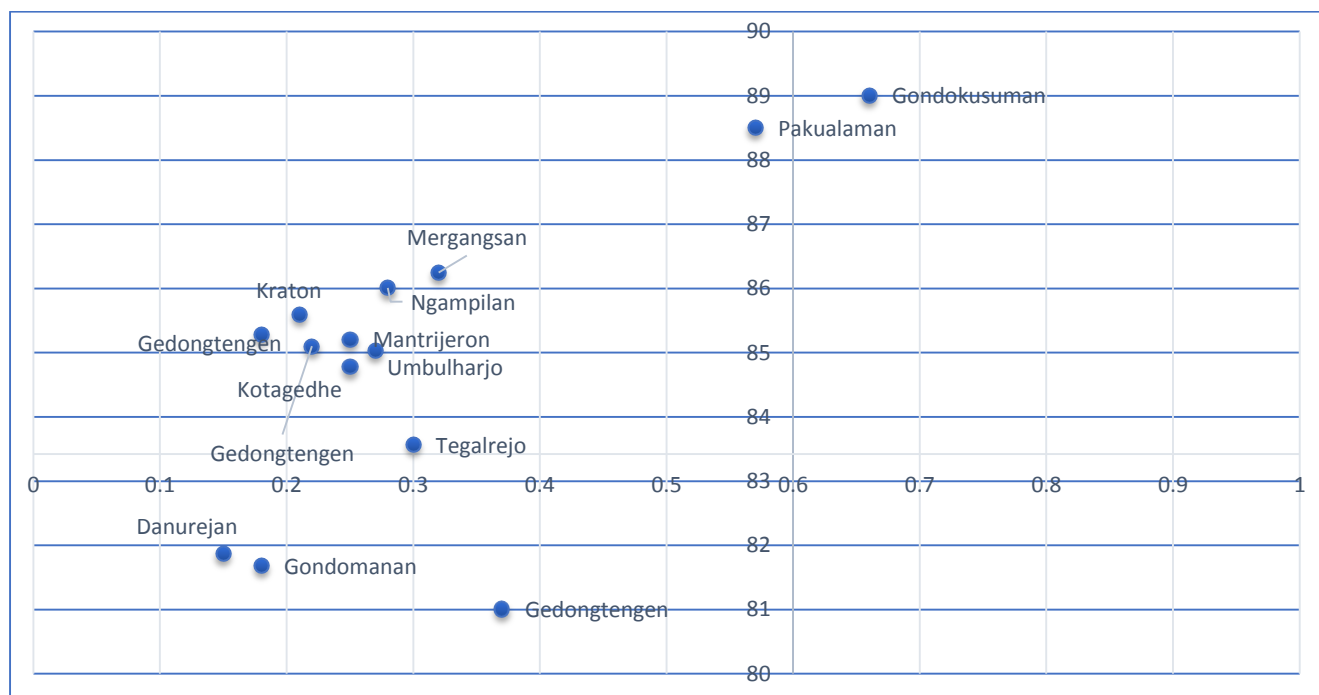
**IPM Kabupaten Gunungkidul menurut Kecamatan dan Angka Pertumbuhan IPM
Tahun 2018**



**IPM Kabupaten Sleman menurut Kecamatan dan Angka Pertumbuhan IPM
Tahun 2018**



**IPM Kota Yogyakarta menurut Kecamatan dan Angka Pertumbuhan IPM
Tahun 2018**



**PERBANDINGAN KOMPONEN IPM KECAMATAN DENGAN IPM KABUPATEN/KOTA DAN IPM PROVINSI
DI KABUPATEN KULONPROGO, 2018**

No.	Komponen	Di bawah Kabupaten/Kota	Di bawah angka provinsi
1.	AHH 2018	Galur, Kokap, Samigaluh, Temon, Sentolo	Galur, Kokap, Samigaluh
2.	EMYS 2018	Temon, Wates, Panjatan, Lendah, Sentolo, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Samigaluh	Semua kecamatan
3.	MYS 2018	Lendah, Sentolo, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, Samigaluh	Galur, Lendah Sentolo, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, Samigaluh
4.	PPP	Galur, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, Samigaluh	Semua kecamatan

**PERBANDINGAN KOMPONEN IPM KECAMATAN DENGAN IPM KABUPATEN/KOTA DAN IPM PROVINSI
DI KABUPATEN BANTUL, 2018**

No.	Komponen	Di bawah Kabupaten/Kota	Di bawah angka provinsi
1.	AHH 2018	Srandakan, Kretek, Pandak, Bantul, Jetis, Pleret, Banguntapan, Pajangan	Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Pleret, Banguntapan, Sewon, Pajangan
2.	EMYS 2018	Srandakan, Kretek, Pundong, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Banguntapan, Pajangan, Sedayu	Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bantul, Jetis, Imogiri, Pleret, Banguntapan, Pajangan, Sedayu
3.	MYS 2018	Pundong, Pandak, Imogiri, Dlingo, Piyungan, Pajangan	Pundong, Pandak, Imogiri, Dlingo, Piyungan, Pajangan
4.	PPP	Bambanglipuro, Pandak, Imogiri, Dlingo, Piyungan, Banguntapan, Pajangan, Srandakan, Sedayu	Bambanglipuro, Pandak, Imogiri, Dlingo, Piyungan, Pajangan

**PERBANDINGAN KOMPONEN IPM KECAMATAN DENGAN IPM KABUPATEN/KOTA DAN IPM PROVINSI
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 2018**

No.	Komponen	Di bawah Kabupaten/Kota	Di bawah angka provinsi
1.	AHH 2018	Purwosari, Paliyan, Saptosari, Semanu, Ponjong, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar	Panggang, Purwosari, paliyan, Saptosari, Rongkop, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar
2.	EMYS 2018	Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Semanu, Patuk, Gedangsari	Semua kecamatan
3.	MYS 2018	Panggang, Purwosari, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Gedangsari, Nglipar Ngawen, Semin	Semua kecamatan kecuali Wonosari : Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar Ngawen, Semin
4.	PPP	Purwosari, Saptosari, Tepus, Ponjong, Karangmojo, Rongkop, Gedangsari, Nglipar Ngawen, Semin	Semua kecamatan kecuali Wonosari : Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar Ngawen, Semin

**PERBANDINGAN KOMPONEN IPM KECAMATAN DENGAN IPM KABUPATEN/KOTA DAN IPM PROVINSI
DI KABUPATEN SLEMAN, 2018**

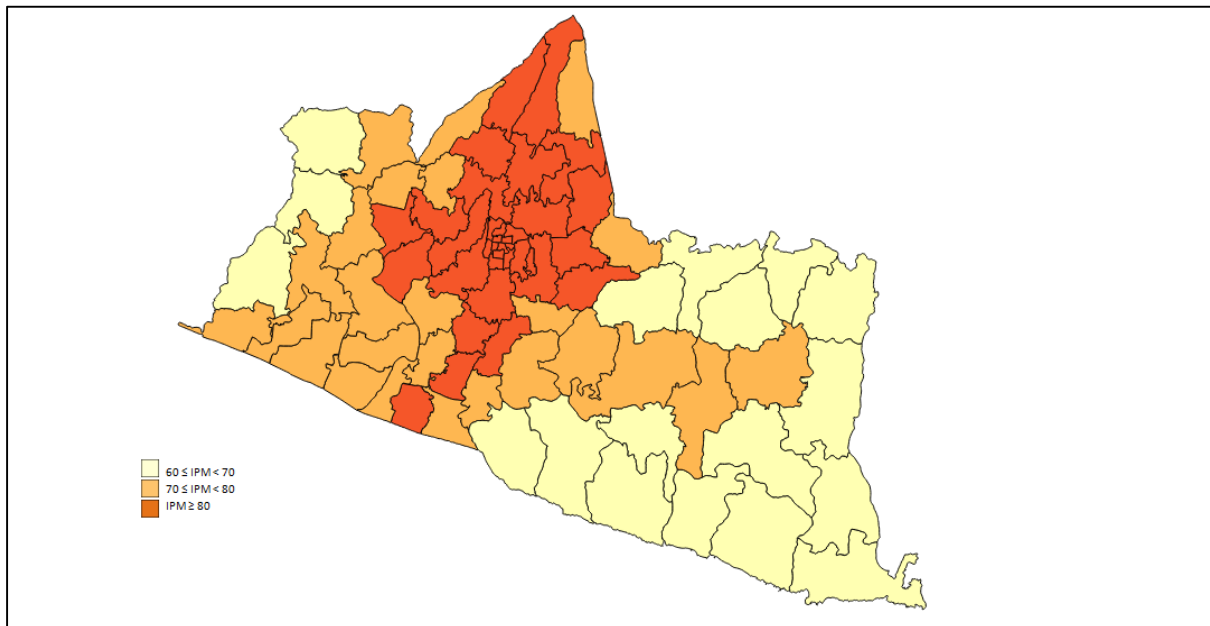
No.	Komponen	Di bawah Kabupaten/Kota	Di bawah angka provinsi
1.	AHH 2018	Moyudan, Minggir, Seyegan, Godean, Berbah, Prambanan, Kalasan, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan	Moyudan, Minggir, Seyegan, Godean, Berbah, Prambanan, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan
2.	EMYS 2018	Moyudan, Minggir, Seyegan, Godean, Gamping, Berbah, Prambanan, Ngaglik, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan	Minggir, Seyegan, Godean, Prambanan, Sleman, Tempel, Pakem Cangkringan
3.	MYS 2018	Moyudan, Seyegan, Godean, Gamping, , Prambanan, Sleman, Tempel, Turi, Cangkringan	Prambanan, Tempel, Cangkringan
4.	PPP	Minggir, Seyegan, Godean, Gamping, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan	Tidak ada

**PERBANDINGAN KOMPONEN IPM KECAMATAN DENGAN IPM KABUPATEN/KOTA DAN IPM PROVINSI
DI KOTA YOGYAKARTA, 2018**

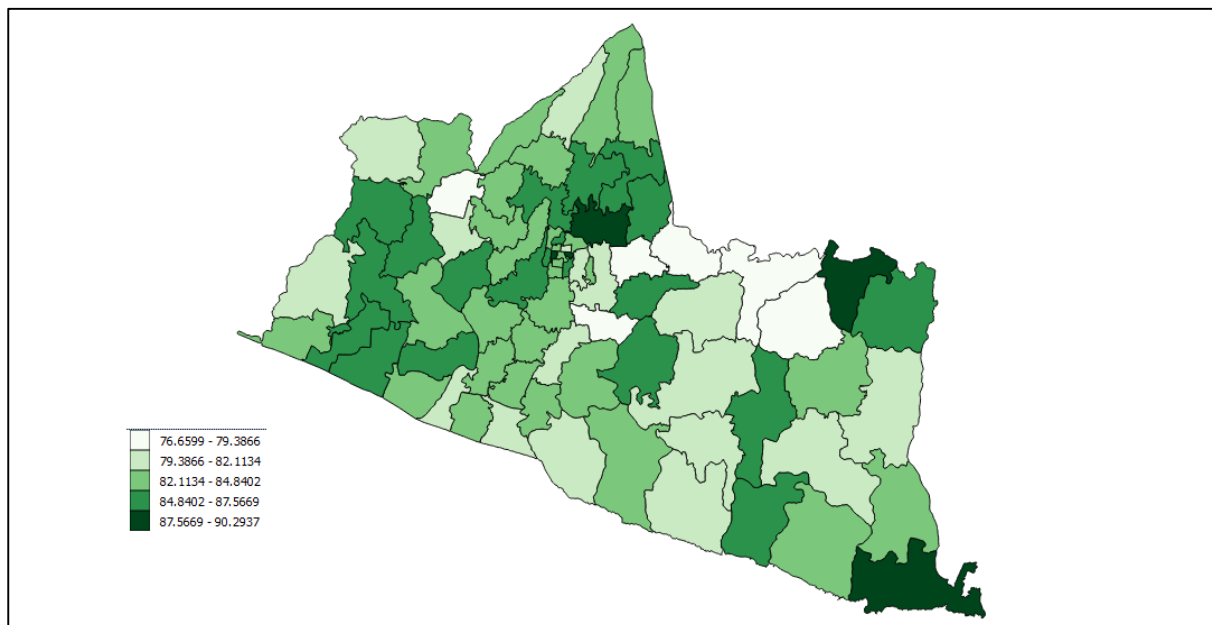
No.	Komponen	Di bawah Kabupaten/Kota	Di bawah angka provinsi
1.	AHH 2018	Mantrijeron, Kraton, Umbulharjo, Gondokusuman, Danurejan, Gondomanan, Gedongtengen, Tegalrejo.	Mantrijeron, Kraton, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Gondomanan, Gedongtengen, Tegalrejo.
2.	EMYS 2018	Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis, Tegalrejo.	Danurejan, Gondomanan, Ngampilan, Gedongtengen
3.	MYS 2018	Kotagede, Danurejan, Gondomanan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis	Tidak ada
4.	PPP	Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Danurejan, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis, Tegalrejo.	Tidak ada

Lampiran 5

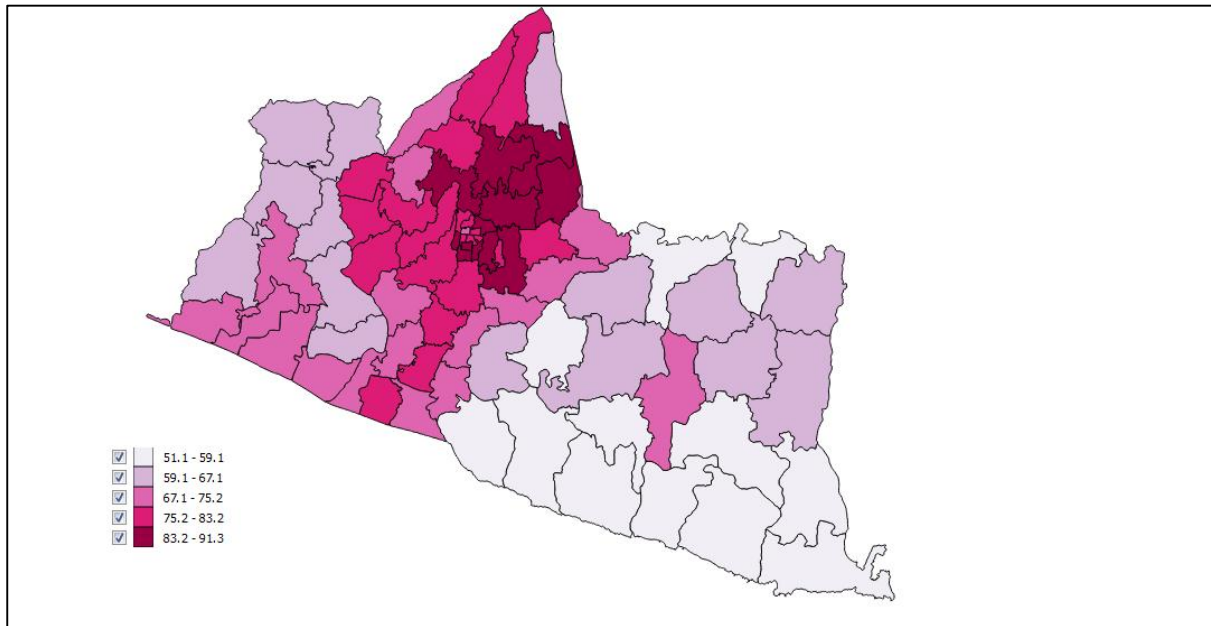
**Gambar 5.1. Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan
se-D.I. Yogyakarta Tahun 2018**



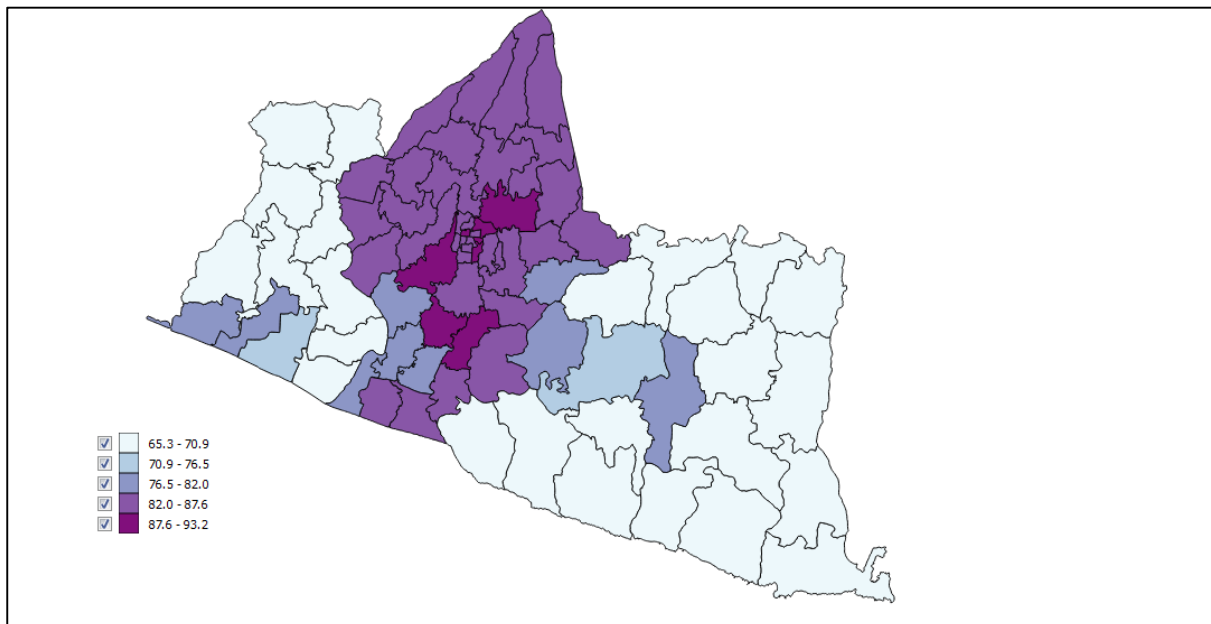
**Gambar 5.2. Indeks Angka Harapan Hidup Kecamatan
se-D.I. Yogyakarta Tahun 2018**



**Gambar 5.3. Indeks Pendidikan Kecamatan
se-D.I. Yogyakarta Tahun 2018**



**Gambar 5.4. Indeks *Purchasing Power Parity* Kecamatan
se-D.I. Yogyakarta Tahun 2018**



Tipologi Capaian IPM 2018 dan Angka Pertumbuhan IPM per Tahun

